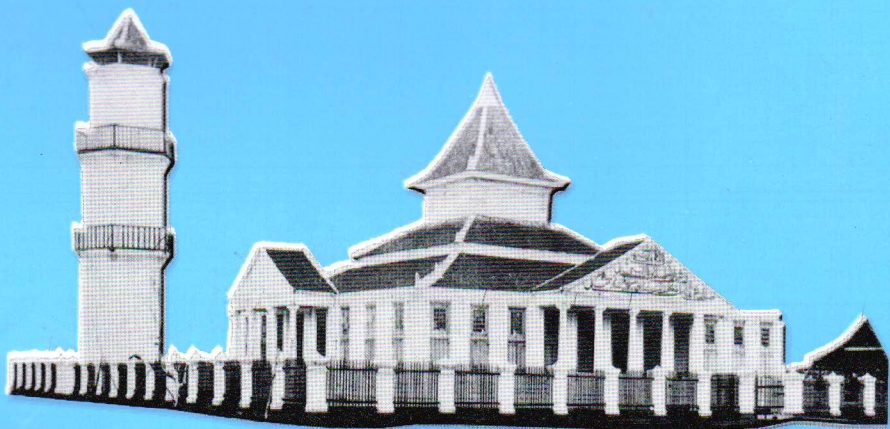


Volume 11 Nomor 1 Mei 2006

ISSN 0853-9030

Jurnal Arkeologi

Siddhayātra



**Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Balai Arkeologi Palembang**

Siddhayatra

Tinggalan Budaya Masa Lampau di Palembang : Manfaatnya untuk Pengembangan Wisata Budaya dalam Konteks IMT-GT Bambang Budi Utomo	1 - 12
Pengelolaan Sumberdaya Budaya di Perkotaan Daud Aris Tanudirjo	13 -18
Pemanfaatan Warisan Budaya Kota Palembang Hendri Yansyah	19-27
Arah Kebijakan Pelestarian Kawasan Kaitannya dengan Pengelolaan Warisan Budaya Junus Satrio Atmodjo	28-33
Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya di Wilayah Sumatera Selatan Noviarman Kailani	34-39
Revitalisasi dalam Rangka Konservasi Warisan Budaya Kota Palembang Rahman Zeth	40-44
Data Mutakhir Penelitian Arkeologi di Kota Palembang Retno Purwanti dan Aryandini Novita	45-56
Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs di Sumatera Selatan Winston Sam Douglas Mambo	57-61
Ketika Biduk Membutuhkan Dermaga : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian dan Pemanfaatan Warisan Budaya Yudhy Syarofie	62-72
Rumusan Hasil Lokakarya “Sebiduk Di Sungai Musi : Pengelolaan Warisan Budaya Kota Palembang”	73-74

Jurnal Arkeologi

Siddhayātra

DEWAN REDAKSI

Penyunting Penyelia	:	Prof. Dr. Mundardjito
Penyunting Pelaksana	:	Dr. Mahirta
Ketua Redaksi (merangkap anggota)	:	Drs. Nurhadi Rangkuti, M.Si.
Sekretaris (merangkap anggota)	:	Drs. Tri Marhaeni S. Budisantosa
Anggota	:	Kristantina Indriastuti, S.S.
Penerbit	:	Balai Arkeologi Palembang
Alamat Redaksi	:	Jalan Kancil Putih Raya, Lr. Rusa, Demang Lebar Daun Palembang 30137 Telp. (0711) 445247 Fax. (0711) 445246 e-mail balarplb@indo.net.id website: www.balarpalembang.go.id

Siddhayatra diterbitkan dua kali setahun oleh Balai Arkeologi Palembang. Penerbitan ini dimaksudkan untuk menggalakkan penelitian arkeologi dan menampung hasilnya sehingga dapat dinikmati oleh para ilmuwan dan masyarakat luas. Redaksi menerima sumbangan tulisan ukuran kuarto spasi tunggal, sepuluh karakter, maksimal 15 halaman. Naskah yang dimuat tidak harus sejalan dengan pendapat redaksi dan redaksi berhak menyunting naskah sejauh tidak mengubah isi. Penunjuk sumber agar dibuat dalam sebuah daftar yang disusun menurut abjad nama pengarang pada lembar khusus yang diberi judul DAFTAR PUSTAKA. Contoh :

DAFTAR PUSTAKA

Renfrew, Colin dan Paul Bahn. 1993. *Archaeology : Theories, Methods and Practice*. London: Thames and Hudson, Ltd.

KATA PENGANTAR

Jurnal arkeologi “Siddhayatra” Volume 11 Nomor 1 ini menyajikan sembilan makalah yang semuanya pernah dipresentasikan dalam Lokakarya Pengelolaan Warisan Budaya Kota Palembang tanggal 30 — 31 Mei 2006. Namun, dalam acara tersebut tidak semua pemrasaran menyampaikan gagasannya dalam bentuk makalah, sehingga tidak semuanya dapat diterbitkan.

Dalam makalah-makalah lokakarya tersebut muncul gagasan-gagasan tentang pengelolaan warisan budaya Kota Palembang yang dikemas dalam konsep revitalisasi, konservasi, dan preservasi. Konsep-konsep tersebut relevan dengan keadaan warisan budaya kota Palembang yang selama ini belum dikelola secara optimal. Selain itu, para pemrasaran sependapat pula bahwa dalam pengelolaan warisan budaya Kota Palembang diperlukan kerja sama semua *stake holder*, sehingga terwujud pemanfaatan warisan budaya yang berwawasan pelestarian.

Akhir kata redaksi berharap penerbitan ini dapat meningkatkan kepedualian kita terhadap warisan budaya Indonesia umumnya dan Kota Palembang khususnya.

TINGGALAN BUDAYA MASA LAMPAU DI PALEMBANG: MANFAATNYA UNTUK PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA DALAM KONTEKS IMT-GT

Bambang Budi Utomo¹

Abstrak

Pada mulanya Palembang merupakan pemukiman sederhana dan kemudian berkembang menjadi pemukiman yang kompleks. Pada mulanya Palembang merupakan sebuah pemukiman kecil tempat orang melakukan aktivitas pertanian dan perniagaan dan kemudian pada masa Sriwijaya berkembang menjadi sebuah kota menurut kriteria yang dikemukakan oleh Gordon Childe(1979). Ibukota Sriwijaya berada di kawasan sekitar Gedingsuro. Kerajaan Islam yang didirikan oleh Ki Gede ing Suro kembali menjadikan kawasan tersebut, tepatnya di area PT Pusri, menjadi ibukotanya. Selanjutnya karena dampak aktivitas politik VOC, pusat kota berpindah ke Beringin Janggut dan akhirnya ke Benteng Kuto Besak. Ketika pemerintah Hindia Belanda menjadikan Palembang sebagai gemeente, di Palembang didirikan bangunan-bangunan rumah kantor, rumah Belanda, dan rumah sakit. Kekayaan sejarah dan tinggalan arkeologi kota Palembang perlu dikembangkan dalam kerangka kawasan pertumbuhan IMT-GT yang wilayahnya memiliki kedekatan hubungan sejarah dan budaya.

Kata kunci : tinggalan masa lampau, Palembang, pengembangan wisata

PENGANTAR

“Semoga tenteram dan makmur Pada tanggal 16 Juni 682 dengan mudah dan kegembiraan ia datang dan mendirikan perkampungan, dan jadi Úriwijaya menang, perjalanan berhasil dan menjadi makmur seterusnya”.

Inilah catatan bersejarah paling lengkap, memuat hari-hari bersejarah bagi Dapunta Hyang yang mendirikan sebuah perkampungan dan sekaligus menjadikannya sebagai pusat pemerintahan Úriwijaya. Lebih dari 13 abad kemudian, perkampungan yang dibangun itu telah berkembang menjadi sebuah kota besar yang bernama Palembang.

Bagaimana perkampungan itu terus berkembang menjadi besar? Perkembangan lokasi Palembang sebagai pusat pemerintahan Úriwijaya lebih masuk akal kalau dianggap faktor setempat berupa jaringan komunikasi dan kegiatan lalu-lintas, tukar menukar informasi dan bahan dengan frekuensi tinggi

sudah terbentuk lebih dahulu, dan sudah berhasil mendorong manusia setempat untuk maju.

Pada awalnya Palembang, yang entah apa nama pada awalnya, merupakan sebuah permukiman kecil tempat orang melakukan segala macam aktivitas, baik bertani ataupun berniaga. Lokasi ini lama kelamaan terus berkembang dan kemudian pada masa Úriwijaya telah layak disebut sebagai sebuah kota

Kota merupakan hasil perkembangan bentuk permukiman. Mulai dari permukiman yang sederhana sampai ke permukiman yang kompleks. Suatu bentuk permukiman dapat disebut kota apabila memiliki kriteria-kriteria tertentu. Namun, untuk menentukan kriteria-kriteria itu sangat tidak mudah, sehingga sering menimbulkan perbedaan pendapat. Gordon Childe (1979:12-17) mengajukan pendapat mengenai beberapa kriteria sebuah kota, yaitu:

1. Ukuran kota lebih luas dan jumlah penduduk lebih padat jika dibandingkan dengan permukiman sebelumnya;

¹ Drs. Bambang Budi Utomo adalah peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional.

2. Komposisi dan fungsi penduduk kota sudah berbeda dengan penduduk desa;
3. Produser-produser primer harus membayar pajak pada raja;
4. Adanya *monumental public building*;
5. Adanya kelas-kelas penguasa (pendeta, pemimpin-pemimpin sipil, militer, dan penguawal)
6. Telah dikenal tulisan;
7. Telah dikenal pencatatan (administrasi);
8. Banyak spesialis, antara lain artis, tukang, pengrajin, dan pemahat.
9. Mengenal perdagangan jarak jauh; dan
10. Banyak ahli.

Meskipun kriteria-kriteria ini bukan merupakan ketentuan yang berlaku mutlak, akan tetapi apa yang diajukan oleh Gordon Childe ini dapat memberikan gambaran mengenai pengertian kota kuno (awal).

Kota Palembang yang dibelah oleh Sungai Musi, juga merupakan kota tempat bermuaranya Sungai Kramasan, Ogan, dan Komering di Sungai Musi. Melalui sungai-sungai ini komo-diti perda-gangan dari daerah pedalaman dibawa dan dipasarkan di Palembang. Kawasan pedalaman di daerah kaki Pegunungan Bukit Barisan merupakan penghasil komoditi perdagangan. Berdasarkan bukti-bukti arkeologis yang sampai kepada kita, kawasan ini telah lama dihuni manusia.

Sebagai sebuah kota tua, tentunya di Palembang banyak terdapat tinggalan budaya yang mewakili masanya. Dari masa Śrīwijaya tinggalan budayanya berupa artefak-artefak keagama-an yang mendapat pengaruh budaya India; dari masa "pendudukan" Majapahit ada bangunan bata di Gedingsuro; dari masa "pendudukan" orang-orang Tionghoa meninggalkan dan masih berkembang kesenian lakuer; dari masa Kesultanan Palembang-Darussalam meninggalkan bangunan-bangunan batu; dan demikian juga dari masa *Gemeente* Palembang. Semua ini merupakan aset budaya yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata budaya maupun wisata ziarah.

Permintaan Panitia Lokakarya kepada saya adalah menyajikan situs-situs Śrīwijaya di Palembang. Memang sejak dilakukannya penelitian Śrīwijaya yang intensif di Palembang tahun 1988, banyak tinggalan budaya dari masa itu yang ditemukan. Namun sejalan dengan ditemukannya tinggalan budaya tersebut, banyak pula situs yang rusak/hilang sebagai akibat pembangunan fisik. Sementara itu, Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya yang semula diperuntukkan bagi semacam Pusat Kajian Sriwijaya belum pernah berfungsi sebagaimana yang direncanakan.

Tanpa mengesampingkan permintaan Panitia Lokakarya, makalah yang saya sampaikan ini berisi informasi mengenai kepurbakalaan di Palembang sejak masa Śrīwijaya hingga masa *Gemeente* Palembang. Tujuannya agar audiense mengetahui apa yang telah terjadi dan yang ada di kota tempat tinggalnya. Pada bagian akhir saya akan sedikit menginformasikan bagaimana kaitannya dengan kawasan pertumbuhan perekonomian dengan negara tetangga Malaysia dan Thailand, dan apa yang seharusnya dilakukan agar tidak tertinggal.

KAWASAN PENDUKUNG

Jauh sebelum timbulnya peradaban yang ditandai dengan adanya institusi yang berbentuk *kadātuan* di Palembang, di daerah pedalaman hulu sungai-sungai yang bermuara di Palembang telah ada kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, di lereng dan kaki pegunungan, atau di tepi-tepi sungai. Tinggalan budaya dari kelompok masyarakat ini ada yang berupa alat-alat batu, tembikar, dan ada pula yang berupa bangunan seperti bilik-bilik batu, dan menhir. Seluruhnya dapat ditemukan di daerah lereng dan kaki Pegunungan Bukit Barisan di hulu sungai Musi dan anak-anaknya.

Di antara sisa hunian manusia tertua di daerah hulu Musi di temukan di wilayah Kabupaten Lahat, yaitu di Situs Bungamas,

Lubuk Layang, dan Sungai Saling. Di Situs Bungamas, sekitar 20 km. menuju arah barat laut Lahat, di dasar dan tepian Sungai Kikim ditemukan alat-alat batu "paleolitik" dan alat-alat batu inti terbuat dari fosil kayu. Aktivitas sesungguhnya diduga terjadi di daerah hulu sungai berupa bengkel pembuatan alat-alat neolitik dan bahkan ditemukan hunian yang lebih tua lagi yaitu alat-alat serpih dan alat masif dari masa paleolitik.

Tinggalan-tinggalan budaya yang ditemukan di Situs Bunga-mas, Lubuk Layang, dan Sungai Saling menunjukkan bahwa jauh sebelum adanya peradaban, di daerah hulu sungai Musi terdapat hunian manusia yang berasal masa yang tua, sekitar 8.000 tahun yang lalu. Manusia pada masa itu "tinggal" di daerah-daerah tepian sungai kecil dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka hidup dalam komunitas kecil dan belum menetap di suatu tempat.

Di daerah hulu Musi, di lereng dan kaki Pegunungan Bukit Barisan tidak hanya ditemukan sisa hunian paleolitik dan neolitik saja, di dataran tinggi Pasemah diperoleh petunjuk tinggalan budaya masa lampau yang sudah jauh berkembang pada tingkat yang lebih kompleks. Di daerah Pagaralam ditemukan tinggalan budaya masa lampau yang berupa arca-arca batu yang berbentuk manusia dan binatang. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, sebagian besar arca megalit di Pasemah adalah hasil perbuatan si Pahit Lidah kepada orang atau binatang yang disumpahnya menjadi batu. Seluruh arca-arca tersebut dapat ditemukan di situs-situs yang ada di daerah Lahat, Karang-indah, Tinggihari, Tanjungsirih, Pagaralam, Padang, Tebat sibentur, Tanjung menang, Batu gajah, sampai ke Air putih dan Tegurwangi.

Masih di dataran tinggi Pasemah, di Situs Tanjung ara (Pagaralam) ditemukan bilik-bilik batu yang pada salah satu dindingnya terdapat lukisan. Salah satu bentuk lukisannya menggambarkan orang sedang menggamit

kerbau dengan warna merah bata, hitam, dan kuning oker. Lukisan ini mirip dengan gaya arca-arca batu yang ditemukan di permukaan tanah. Hasil pengamatan yang pernah dilakukan atas lukisan-lukisan pada dinding batu tersebut, nampaknya menggambarkan aneka bentuk yang dinamis dengan memilih obyek lukisan manusia, binatang dan burung yang memakai kombinasi warna merah, kuning, putih, dan hitam yang distilir sedemikian rupa sehingga menjadi menarik. Tinggalan budaya yang sama ditemukan juga di Situs Tegurwangi dan Kota Raya Lembak yang keduanya juga terdapat di sekitar Pagaralam.

Sebuah kompleks megalit ditemukan di Situs Tinggihari berupa batu-batu menhir. Batu-batu menhir ini diberi bentuk yang menggambarkan manusia dan binatang, didirikan sepanjang jalan yang mendaki ke puncak bukit yang tingginya antara +700 — 1.000 meter d.p.l. Tanah pegunungan ini mempunyai kontur yang bervariasi di mana di bagian tengahnya dipotong oleh Sungai Lematang yang pada akhirnya bermuara di Sungai Musi. Situs ini terletak mulai dari tepi jalan yang menghubungkan Pulau Pinang dan Tinggihari, sekitar 4 km. Dari tepi jalan raya yang menghubungkan Lahat dan Pagar-alam. Pada saat ini telah dibuat jalan setapak yang menuju puncak bukit sehingga kita dapat mengunjungi masing-masing arca megalit. Dari tempat ini ditemukan arca-arca megalit yang seluruhnya berjumlah 9 buah.

Seluruh tinggalan budaya dari masa prasejarah tersebut memberikan informasi kepada kita bahwa pada masa lampau, di daerah hulu Musi sudah terdapat hunian manusia. Hunian awal ini mengambil lokasi di daerah tepian-tepian sungai pada bidang tanah yang tinggi. Hunian yang sedikit lebih maju ditemukan di daerah kaki Gunung Dempo di sekitar kota Pagaralam sekarang. Dari tempat ini banyak ditemukan arca-arca megalit dan bilik-bilik batu yang berhiaskan lukisan dari bahan oker.

Sebagaimana halnya dengan Palembang, hunian di daerah pedalaman juga mengalami perkembangan. Masuknya unsur budaya asing ke pedalaman menginformasikan bahwa masyarakat di kawasan tersebut telah mengadakan kontak komunikasi dengan Palembang. Unsur budaya asing yang masuk ke pedalaman, misalnya unsur budaya yang mendapat pengaruh India. Adanya candi atau stūpa dengan arcanya merupakan petunjuk itu.

Di daerah hulu sungai Musi, pada masa sejarah di mana di Palembang telah tumbuh peradaban, terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang kehidupannya telah mendapat pengaruh budaya India yang ditandai dengan kehadiran agama Hindu dan Buddha. Kelompok-kelompok masyarakat ini hidup dan mendirikan bangunan sucinya tidak jauh dari tepian sungai yang merupakan anak/cabang sungai Musi. Beberapa situs yang berkaitan dengan kelompok masyarakat ini ditemukan di Teluk Kijing, Lesung Batu, Tingkip, Bingin Jungut, Tanah Abang, dan Candi Jepara. Kecuali Situs Candi Jepara yang letaknya di tepi Danau Ranau, situs-situs lain letaknya di tepi sungai besar yang merupakan cabang dari sungai Musi.

Itulah kawasan pendukung Palembang yang turut ambil bagian dalam perkembangan Kota Palembang dari sebuah perkampungan di tempat yang strategis, kemudian menjadi sebuah kota besar yang mengalami perjalanan sejarah cukup panjang. Namun dalam perjalanan sejarahnya tidak terlalu mulus. Berbagai pepe-rangan yang diikuti dengan penghancuran turut me-warnai sejarah kota. Palembang pernah diduduki Majapahit bahkan kawanan lanun Tionghoa pada sekitar abad ke-15 Masehi.

KOTA ŚRĪWIJAYA

Kita tidak tahu dengan pasti, seberapa luas kota Śrīwijaya. Namun berdasarkan tinggalan budayanya yang ditemukan di Palembang, bentuk dan luas kotanya dapat direkonstruksi. Demikian juga identitas peruntukannya. Daerah

tepi utara sungai Musi, termasuk rawa-rawa di Talang Kikim, menunjukkan lokasi permukiman penduduk kota Śrīwijaya dengan indikatornya berupa pecahan-pecahan keramik dan tembikar, tiang-tiang kayu, sisa industri, dan sisa barang-barang keperluan sehari-hari.

Sisa bangunan-bangunan suci tampak mengelompok di beberapa tempat agak jauh dari tepian sungai Musi. Sisa kegiatan keagamaan ini, baik kegiatan upacara agama Buddha maupun Hindu, ditemukan di daerah yang tinggi dan tidak tergenang air, mulai Bukit Siguntang, Candi Angsoka, Lemahabang, dan Geding suro (2 dan 3 Ilir) menunjukkan sisa-sisa tempat kegi-atan upacara keagamaan dengan indikatornya berupa sisa bangunan bata, arca batu dan logam, manik-manik kaca dan batu, dan barang-barang upacara keagamaan. Jauh di sebelah barat laut kota, di sebuah tempat yang sekarang termasuk wilayah kecamatan Talang Kelapa, menunjukkan sisa Taman Śrīksetra yang pernah dibangun oleh Dapunta Hyang Śrījayanāśa. Daerah tempat ditemukannya Prasasti Talang Tuo merupakan tempat yang rupa buminya bergelombang lemah.

Berdasarkan tinggalan budayanya, dapat diperkirakan bahwa luas kota Palembang mulai dari tepi utara Musi sampai ke daerah Talang Kelapa. Akan tetapi permukiman penduduk hanya mengelompok di sepanjang sisi utara Musi, dan mungkin juga di sekitar bangunan-bangunan keagamaan. Dari ciri tinggalan budayanya, jelas bahwa pada sekitar abad ke-7 Masehi penduduk di Palembang telah menata kotanya dengan baik sesuai dengan peruntukannya.

Sejak tahun 1920-an dari kota Palembang dan sekitarnya telah ditemukan lebih dari 25 buah arca logam dan batu. Sebagian besar di antaranya merupakan arca Buddha/Bodhisattwa dari bahan logam, dan sebagian kecil merupakan arca dewa-dewa Hindu dari bahan logam dan batu. Arca-arca tersebut kini sebagian besar ada di Museum Nasional

Jakarta, sebagian lagi merupakan koleksi pribadi di luar negeri atau bahkan sudah hilang. Melihat gaya seni dan pertanggalannya, arca-arca Buddha tersebut berlanggam Śailendra abad ke-8-9 Masehi. Arca lainnya merupakan arca Hindu yang berlanggam Majapahit abad ke-14 Masehi.

Bukti-bukti arkeologis tersebut tentu saja didukung oleh data sejarah yang dipahatkan "abadi" pada batu, baik yang sudah dibentuk, maupun pada bongkahan batu kali. Hing-ga saat ini dari wilayah kota Palembang saja sudah ditemukan lebih dari 20 buah prasasti dari masa Śrīwijaya. Isinya bermacam-macam. Ada yang tentang pembangunan perkampungan, struktur birokrasi *kadātuan*, pembangunan taman, dan yang terbanyak tentang "perjalanan suci" (*siddhayātra*). Sebagian besar prasasti tersebut kini tersimpan di Museum Nasional, Jakarta.

Telah saya uraikan batas-batas kota Śrīwijaya berdasarkan tinggalan budayanya. Kemudian di mana kira-kira letak permukiman awalnya? Mengingat batu prasasti Kedukan Bukit merupakan sebuah batu yang mudah dipindahkan, justru bukan di daerah Kedukan Bukit permukiman awalnya. Permukiman awal masa Śrīwijaya diduga ada di sekitar Situs Gedingsuro sampai Telaga Batu. Dari daerah ini ditemukan sebuah prasasti persumpahan yang lengkap berisi nama-nama pejabat *kadātuan* yang diambil sumpahnya. Prasasti persumpahan yang sudah dibentuk ini selayaknya ditempatkan di pusat kota tempat tinggal para pejabat yang diambil sumpahnya. Selain prasasti persumpahan tersebut, banyak lagi ditemukan prasasti *siddhayātra* yang dituliskan pada bongkahan batu kali.

Setelah Śrīwijaya mengalami kemunduran dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Jambi (abad ke-13 Masehi), beberapa abad kemudian (abad ke-15 Masehi) di Palembang terjadi masa kekosongan pemerintahan. Berbagai penguasa dari tempat lain menduduki Palembang, misalnya Majapahit pada abad ke-14-15 Masehi. Bahkan pada abad ke-15 Palembang

diduduki oleh lanun dari Nan-hai sampai akhirnya datang budaya Islam.

Mengenai keberadaan lanun Nan-hai di Palembang serta datangnya Chêng Ho untuk meringkusnya langsung, dapat dije-laskan karena di Palembang diduga telah lama bermukim orang-orang Tionghoa. Orang-orang Tionghoa bermukim mungkin sejak awal adanya hubungan dagang dengan Tiongkok (sejak abad ke-7 Masehi). Lamanya keberadaan kelompok masyarakat Tionghoa ini dapat mempengaruhi kebudayaan lokal Palembang sebagaimana tercermin dalam hasil budayanya, misalnya seni lakuer dan bentuk-bentuk atap bangunan tradisional Palembang.

KOTA PALEMBANG-DARUSSALAM

Pada awal abad ke-17, Palembang menjadi pusat pemerintahan kerajaan yang bernuansa Islam dengan pendirinya Ki Gede ing Suro. Pada masa ini pusat pemeri-tahan di daerah sekitar Kelurahan 2-Iilir, di tempat yang sekarang merupakan kompleks PT. Pusri. Secara alamiah lokasi keraton ditempatkan di antara dua sungai, dan secara teknis diperkuat oleh dinding tebal dari kayu unglan dan *cerucup* yang membentang antara Plaju dengan Pulau Kembaro, sebuah pulau kecil yang letaknya di tengah sungai Musi.

Keraton Palembang yang dibangunnya itu disebut Keraton Kuto Gawang yang bentuknya empat persegi panjang dibentengi dengan kayu besi dan kayu unglan yang tebalnya 30 x 30 cm/batangnya. Kota berbenteng yang di kemudian hari dikenal dengan nama Kuto Gawang ini mempunyai ukuran 290 *Rijnlandsche roede* (1093 meter) baik panjang maupun lebarnya. Tinggi dinding yang mengitarinya 24 kaki (7,25 meter). Orang-orang Tionghoa dan Portugis berdiam berseberangan yang terletak di tepi sungai Musi.

Kota berbenteng ini sebagaimana dilukiskan pada tahun 1659 (Sketsa Joan van der Laen), menghadap ke arah Sungai Musi (ke selatan) dengan pintu masuknya melalui

Sungai Rengas. Di sebelah timurnya berbatasan dengan Sungai Taligawe, dan di sebelah baratnya berbatasan dengan Sungai Buah. Dalam gambar sketsa tahun 1659 tampak Sungai Taligawe, Sungai Rengas, dan Sungai Buah tampak terus ke arah utara dan satu sama lain tidak bersambung. Sebagai batas kota sisi utara adalah pagar dari kayu besi dan kayu unglan. Di tengah benteng keraton tampak berdiri megah bangunan keraton yang letaknya di sebelah barat Sungai Rengas. Benteng keraton mempunyai tiga buah *baluarti* (*bastion*) yang dibuat dari konstruksi batu. Orang-orang asing ditempatkan/bermu-kim di seberang sungai sisi selatan Musi, di sebelah barat muara sungai Komering (sekarang daerah Seberang Ulu, Plaju).

Melihat gambar sketsanya, Keraton Kuta Gawang ini terletak di sebuah runtunan bangunan bata yang dibangun pada masa pengaruh Majapahit. Bangunan bata tersebut dikenal dengan nama Candi Gedingsuro (menggambil nama pendiri Kera-jaan Palembang-Islam, Ki Gede ing Suro). Di bagian atas runtunan bangunan terdapat makam para pendiri kerajaan, di antaranya Ki Gede ing Suro.

Setelah dihancurkan VOC tahun 1659, oleh Susuhunan Abdurrahman pusat pemerintahan dipindahkan ke arah hulu Musi, di suatu tempat yang bernama Beringin Janggut. Lokasinya kira-kira di sekitar kawasan Mesjid Lama (Jl. Segaran). Sayang data mengenai keberadaan, bentuk, dan ukuran keraton ini hingga saat ini tidak ada. Perkiraan lokasi hanya didasarkan atas toponimi yang masih tertinggal.

Daerah sekitar Keraton Beringin Janggut dibatasi oleh sungai-sungai yang saling berhubungan. Kawasan keraton dibatasi oleh Sungai Musi di selatan, Sungai Tengkuruk di sebelah barat, Sungai Penedan di sebelah utara, dan Sungai Rendang/Sungai Karang Waru di sebelah timur. Sungai Penedan merupakan sebuah kanal yang menghubungkan Sungai Kemenduran, Sungai Kapuran, dan Sungai Kebon Duku

Karena sungai-sungai ini saling berhubungan, penduduk yang mengadakan perjalanan dari Sungai Rendang ke Sungai Tengkuruk, tidak lagi harus keluar melalui Sungai Musi. Dari petunjuk ini dapat diperoleh gambaran bahwa aktivitas sehari-hari pada masa itu telah berlangsung di darat agak jauh dari Sungai Musi.

Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I (Jayo Wikramo, 1741-1757), pusat pemerintahan dipindahkan lagi ke sebelah barat Sungai Tengkuruk (sekarang Jl. Jenderal Soedirman, kaki sisi utara Jembatan Ampera). Keraton yang dibangun ini dikenal dengan nama Keraton Kuto Tengkuruk atau Keraton Kuto Batu. Pada masa pemerintahannya dapat dikatakan Palembang mengalami kemajuan pesat dalam hal pembangunan fisik, misalnya dibangun Masjid Agung (dahulu bernama Masjid Sultan), Keraton Kuto Tengkuruk, dan Makam Lemahabang.

Kawasan inti Keraton Kesultanan Palembang Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I luasnya sekitar 50 hektar dengan batas-batas di sebelah utara Sungai Kapuran, di sebelah timur berbatasan dengan Sungai Tengkuruk (sekarang menjadi Jl. Jenderal Soedirman), di sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Musi, dan di sebelah barat berbatasan dengan Sungai Sekanak. Pada awalnya di areal tanah yang luasnya sekitar 50 hektar ini hanya terdapat bangunan (Benteng) Kuto Batu atau Kuto Tengkuruk dan bangunan Masjid Agung dengan sebuah menara yang atapnya berbentuk kubah. Pada saat ini batas kota Palembang kira-kira di sebelah timur berbatasan dengan Kompleks PT. Pusri, di sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Musi, di sebelah barat berbatasan dengan Sungai Lambidaro (36 Ilir), dan di sebelah utara hingga sekitar Pasar Cinde.

Pada masa pemerintahan Sultan Muhamad Bahaudin (1776-1803), dibangun Keraton Kuto Besak. Letaknya di sebelah barat Keraton Kuto Tengkuruk. Kuto ini mempunyai ukuran

panjang 288,75 meter, lebar 183,75 meter, tinggi 9,99 meter, dan tebal dinding 1,99 meter membujur arah barat-timur (hulu-hilir Musi). Di setiap sudutnya terdapat *bastion*. *Bastion* yang terletak di sudut barat laut bentuknya berbeda dengan tiga *bastion* lain, sama seperti pada *bastion* yang sering ditemukan pada benteng-benteng lain di Indonesia. Justru ketiga *bastion* yang sama itu merupakan ciri khas *bastion* Benteng Kuto Besak. Di sisi timur, selatan, dan barat terdapat pintu masuk benteng. Pintu gerbang utama yang disebut *lawang kuto* terletak di sisi sebelah selatan menghadap ke Sungai Musi. Pintu masuk lainnya yang disebut *lawang buratan* jumlahnya ada dua, tetapi yang masih tersisa hanya sebuah di sisi barat.

Perang Palembang 1821 dan dibubarkannya institusi Kesultanan pada 7 Oktober 1823, bangunan Kuto Tengkuruk diratakan dengan tanah. Di atas runtuhnya Kuto Tengkuruk, atas perintah van Sevenhoven kemudian dibangun rumah *Regeering Commissaris* yang sekarang menjadi Museum Sultan Mahmud Badaruddin II. Pada masa ini kawasan inti keraton hanya terdapat bangunan Masjid Sultan, Kuto Besak, dan bangunan *Regeering Commissaris*. Satu kompleks dengan Masjid Sultan, di tepi sungai Tengkuruk terdapat bangunan Tangga Raja. Bangunan ini merupakan semacam bangunan dermaga tempat merapatnya *lancang kuning*, perahu panjang milik kesultanan.

GEMEENTE PALEMBANG

Dengan dibubarkannya Kesultanan, Palembang menjadi ibukota *Residentie Palembang* yang sejak tahun 1906 dipimpin oleh seorang *Burgemeester* (Walikota). Berdasarkan Stbl. 1906 No. 126, pemerintahan kota berbentuk *Gemeente* (*Haminte* menurut lafal *wong* Palembang) dengan luasnya 224 km. persegi. Batas kotanya kira-kira sampai Km. 5 di sebelah utara, Kompleks PT. Pusri di sebelah timur, Kampung Seberang Ulu di sebelah selatan, dan Kampung 36 Ilir di sebelah barat.

Bangunan-bangunan yang dibangun pada masa *Gemeente* Palembang, misalnya Rumah Sakit Charitas yang lokasinya di pertigaan Jl. Mayor Ruslan dan Jl. Jend. Soedirman, Menara Air (sekarang Kantor Walikota Palembang), *Societeit* (sekarang Balai Prajurit), Jl. Tengkuruk (bekas Sungai Tengkuruk yang sekarang Jl. Jend. Soedirman), Pasar 16 Ilir, Pelabuhan Boom Baru, *veerpont* (tempat penyeberangan), jaringan Kereta Api Kertapati, dan perumahan di Talang Semut. Perumahan di Talang Semut dapat dikatakan seperti Real Estate yang dibangun oleh developer melalui tender yang diumumkan di surat kabar.

Seperti pada masa Kerajaan Palembang, sampai masa *Gemeente* Palembang, sebagian besar orang dari etnis Tionghoa dan etnis Arab bertempat tinggal di wilayah Seberang Ulu. Komunitas Tionghoa tinggal di sekitar 7 Ulu, sedangkan komunitas Arab tinggal di sekitar Naga Sewidak. Mereka tinggal dalam satu komunitas dengan beberapa rumah tinggal yang hingga sekarang masih dapat dilihat. Di dalam komunitas etnis tersebut ada seorang pemukanya yang pada Zaman Kumpeni mereka diberi pangkat Mayor atau Kapitein. Agak ke arah hulu, di sekitar Kertapati terdapat permukiman orang-orang Keling (Tambi). Di situ masih berdiri sebuah bangunan Masjid Keling.

KAWASAN PERTUMBUHAN

Palembang yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan, seperti wilayah provinsi lain di Sumatera termasuk dalam kawasan pertumbuhan yang tergabung dalam Indonesia, Malaysia, Thailand – Growth Triangle (IMT-GT). Semula tidak seluruh provinsi yang ada di Sumatera masuk dalam IMT-GT. Belakangan menyusul Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, dan Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam kawasan pertumbuhan IMT-GT. Pertumbuhan di dalam kerjasama ini adalah pertumbuhan ekonomi. Konsekuensi dari masuk ke kawasan pertumbuhan IMT-GT

adalah harus memacu pembangunan sarana dan prasarana di wilayah masing-masing provinsi agar tidak tertinggal dengan provinsi-provinsi di Malaysia dan Thailand.

“Wilayah IMT-GT mempunyai kedekatan atau kesamaan sejarah dan budaya yang akan mempersatukannya ke depan. Wilayah-wilayah (provinsi) yang tergabung dalam IMT-GT kaya akan hasil budaya, sosial-ekonomi, warisan alam yang dapat menjadi pendukung untuk mempromosikan pertumbuhan melalui kerjasama yang saling menguntungkan di antara negara anggota”. Demikian pernyataan yang dikemukakan *Secretary General, Ministry of Tourism Malaysia* dalam sambutannya pada *The 3rd Meeting of the IMT-GT Implementing Technical Group on Tourism Development* di Langkawi pada 5-6 Sept. 2005.

Pernyataan tersebut, kalau kita kaji dari sisi arkeologi dan sejarah memang ada kaitannya. Kita mundur ke belakang pada masa Śrīwijaya atau Dinasti Śailendra di Jawa, tampak dari hasil seni arcanya menunjukkan kesamaan budaya. Lepas dari di mana pusat kekuasaan dinasti Śailendra pada masa itu, arca-arca abad ke-8-9 Masehi yang ditemukan di Thailand, Malaysia, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa menunjukkan gaya seni Śailendra. Sebuah prasasti tahun 775 Masehi yang ditemukan di Ligor (Nakhon Sri Thammarat, Thailand Selatan), menyebutkan seorang raja dari Dinasti Śailendra mendirikan *Trisamaya Caitya* untuk pemujaan Tārā, Padmapāni, dan Śakyamuni. Ini merupakan suatu bukti adanya kedekatan budaya, sosial, dan politik antar kerajaan pada masa itu.

Kedekatan “emosional” antara Indonesia dan Malaysia, selain masih satu rumpun bahasa dan sukubangsa, dinyatakan dalam kitab *Sejarah Melayu* yang ditulis pada 13 Mei 1612 oleh Tun Seri Lanang (Bendahara Paduka Raja). Dalam kitab itu dikisahkan bahwa yang mendirikan Bandar Melaka dari sebuah permukiman nelayan menjadi sebuah bandar besar adalah Parameswara, seorang bangsawan

Palembang yang menyingkir keluar dari pertikaian politik. Parameswara disebutkan bahwa leluhurnya turun dari Bukit Siguntang. Karena itulah sebagian orang Melaka (terutama kaum bangsawannya) menganggap *pepundennya* adalah Bukit Siguntang. Pada saat tertentu akan menyempatkan diri pergi ke Bukit Siguntang untuk berziarah.

Kembali ke dalam konteks IMT-GT, dalam kaitannya antara Palembang dan Melaka sudah barang tentu mempunyai hubungan kesejarahan yang erat. Setahun sebelum sidang “The 3rd. Meeting of the IMT-GT Implementing Technical Group on Tourism Development” di Langkawi, di Vientiane (Laos) diadakan sidang ASEAN Tourism Forum (ATF). Dalam sidang ATF tersebut antara lain ada usulan dari Thailand tentang dibentuknya “ASEAN Heritage Cities” yang tujuannya:

- Menggalakan kerjasama pariwisata bersejarah antar negara anggota.
- Mendorong untuk pengelolaan peninggalan warisan budaya dan sejarah yang lebih baik di masing-masing negara anggota.
- Mempromosikan wisata bersejarah ASEAN dan mendorong arus wisatawan ke dan di kawasan ASEAN.
- Menggalakan hubungan dan pemahaman antar warga negara ASEAN dan memberikan gambaran kepada dunia di luar ASEAN tentang integrasi dan keanekaragaman budaya ASEAN.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut adalah di setiap negara anggota ASEAN diminta untuk mengidentifikasi kota-kota di negara masing-masing yang memiliki warisan/tinggalan budaya. Namun, belakangan usulan ini diroboh menjadi ASEAN Award untuk Heritage City dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

Lepas dari diroboh tidaknya kesepakatan sidang ATF, mungkin untuk Palembang dan Melaka perlu dilanjutkan karena konteksnya dengan kawasan pertumbuhan IMT-GT. Dalam kaitan ini Palembang perlu kerja keras untuk pembenahan agar dapat mengimbangi Melaka

yang sudah jauh lebih maju dan tertib. Dalam hal ini dapat mengadopsi konsep "Sister City", tetapi dalam hal sejarah dan budaya.

Hal lain yang perlu ditindaklanjuti dan diimplementasikan Palembang dari "The 3rd. Meeting of the IMT-GT Implementing Technical Group on Tourism Development" adalah *Sumatera Travel Fair* yang rencananya untuk pertama kali akan dilaksanakan pada Juli 2006. Seterusnya akan bergilir di ibukota-ibukota provinsi wilayah IMT-GT di Sumatera. Dalam hal ini Indonesia mengharapkan bahwa Sumatera Travel Fair ini akan menjadi salah satu kesempatan untuk promosi di kawasan IMT-GT. Untuk menyelenggarakan hajatan ini tentu Palembang memerlukan persiapan yang matang sesuai dengan kaidah-kaidah kepariwisataan.

PENGEMBANGAN WISATA

Palembang merupakan kota tua yang usianya pada tahun ini menginjak 1324 tahun. Luas arealnya sudah lebih dari tiga kali lipat sejak dibangun pada tahun 682 Masehi. Kota Tua Palembang adalah aset yang harus dikembangkan untuk wisata budaya dan sekaligus wisata ziarah. Mengenai Wisata Ziarah yang dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika berkunjung ke Kamboja, harus disikapi secara lentur. Ketika itu gagasan yang dikemukakan adalah wisata ziarah agama Buddha dengan obyek Angkor Wat dan Candi Borobudur. Dalam konteksnya dengan Palembang, maka yang dapat dikembangkan adalah wisata ziarah Melaka dan Bukit Siguntang (Palembang).

Dalam usaha pengembangannya sebagai obyek wisata, ada beberapa hal yang dapat saya usulkan, yaitu:

- Sebagai kota tua Palembang mempunyai beberapa wilayah yang perlu ditata dan dikonservasi, seperti kawasan Inti Keraton yang luasnya 50 ha; Situs Gedingsuro; Situs Bukit Siguntang; Kampung Arab; dan Kampung Tionghoa. Obyek-obyek ini di antaranya telah ditetapkan sebagai Benda

Cagar Budaya (Benteng Kuto Besak dan Situs Gedingsuro).

- Penataan lingkungan tidak hanya dilakukan di wilayah yang mengandung BCB saja, tetapi juga dilakukan di kawasan industri tradisional, seperti industri lakuer di kawasan Pasar Kuto (11 Ilir), dan industri songket di 30 Ilir.
- Mengembangkan wisata sungai untuk memperkenalkan bahwa Palembang pada Zaman Kumpeni disebut *de stad der twintig eilanden* (Kota Duapuluh Pulau). Untuk itu lingkungan sekitar sungai perlu ditata.
- Dalam usaha mengembangkan kawasan wisata dengan obyek yang telah dikemukakan tersebut, dalam RUTR Kota Palembang dibuat zoning dengan sistem sel.
- Kawasan cagar budaya yang perlu dibuat zoning, terdiri dari Kawasan Inti Keraton (50 ha.), Situs Gedingsuro, Bukit Siguntang, Karanganyar, Kampung Tionghoa (7 Ulu), Kampung Arab (Naga Sewi-dak), kawasan industri lakuer (11 Ilir), dan kawasan industri songket (30 Ilir).
- Hal lain yang perlu ditata adalah kepastian hukum dan masalah keamanan. Kepastian hukum yang dimaksud adalah terlalu banyaknya dan selalu berubahnya aturan.

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan lokakarya ini. Semoga melalui lokakarya lintas sektoral ini pembangunan fisik di Palembang dapat lebih terarah dengan memperhatikan aset tinggalan budaya masa lampau.

Uji wong Palembang Bari,

Bersih, Aman, Rapih, Indah.

Apo lagi nak dicari,

Kalu barinyo lah ilang ?!

KEPUSTAKAAN

Agreed Minutes "Eleventh Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Tri-angle Senior Officials Meeting", 24-25 August 2004 Pattani, Thailand.

- Agreed Minutes "The 3rd IMT-GT Implementing Technical Group Meeting on Tourism Development", Awana Porto Malay, Langkawi, Malaysia 5-6 September 2005.
- Bambang Budi Utomo. 1985. "Karanganyar as a Srivijayan site: New evidence for the study of settlement pattern of the Srivijayan period", dalam *SPAFA Final Report: Consultative workshop on Archaeological and Environmental Studies on Srivijaya* Bangkok: SPAFA Coordinating unit.
- Boechari. 1986. "New Investigations on the Kedukan Bukit Inscription", dalam *Untuk Bapak Guru*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- . 1989. "Harijadi kota Palembang berdasarkan Prasasti Kedukan Bukit". Makalah dalam *Seminar Hari jadi Kota Palembang yang ke-1307*. Palembang,
- Bosch, F.D.K.. 1941. "De Inscriptie van Ligor". dalam *TBG* 81.
- . 1975. *Çrivijaya, Çailendra dan Sanjaya-vamça* (Seri Terjemahan No. 50). Jakarta: Bhratara.
- Brandes, J.L.A.. 1904. "Toelichting op het Rapport van den Controleur der Onderafdeeling Lematang Ilir dan de in die Streek Aangetroffen Oudheden", dalam *NBG* 42 Bijlage VI.
- Bronson, Bennet dan Jan Wisseman. 1978. "Palembang as Srivijaya: The lateness of early cities in Southern Southeast Asia", *Asian Perspective* 19 (2): 220-239. The University Press of Hawaii.
- Bronson, Bennet dkk.. 1973. *Laporan Penelitian Arkeologi di Sumatra*. Jakarta: Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional.
- Casparis, J.G. de. 1956. *Inscriptie uit de Çailendratijd* (Prasasti Indonesia I). Bandung: Masa Baru.
- . 1956. *Selected Inscription from the 7th. to the 9th. Century A.D.* (Prasasti Indonesia II). Bandung: Masa Baru.
- Childe, V. Gordon. 1979. "The Urban Revolution", dalam Gregory L. Possehl (ed.), *Ancient Cities of the Indus*: 12-17. Durham, North Carolina: Carolina Academic Press.
- Cœdés, G., 1934, "On the Origin of the Çailendra of Indonesia", dalam *JGIS* Vol. I: 66-70.
- . 1982. "Kerajaan Sriwijaya", dalam *Kedatuan Sriwijaya: Penelitian tentang Sriwijaya* (Seri Terjemahan Arkeologi No. 2). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- . 1982. "Prasasti berbahasa Melayu Kerajaan Sriwijaya", dalam *Kadatuan Sriwijaya: Penelitian tentang Sriwijaya* (Seri Terjemahan Arkeologi No. 2), Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Cœdés, G dan L. Ch. Damais. 1989. *Kedatuan Sriwijaya: Penelitian tentang Sriwijaya* (Seri Terjemahan Arkeologi No. 2). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Cortesaõ, Armando (ed.). 1967. *The Suma Oriental of Tome Pires and The Book of Francisco Rodrigues*. [translated from the Portuguese MS in the Bibliotheque de la Chambre des Deputes, Paris, and edited by Armando Cortesaõ]. Nendeln/Liechtenstein: Kraus Reprint Limited.
- Dinas Purbakala. 1955. "Kissah perjalanan ke Sumatra Selatan dan Djambi", dalam *Ameria* 3: 1-36. Djakarta: Dinas Purbakala.

- Djadiningrat, Hoesen. 1913. *Critische beschouwing van de Sedjarah Banten*, Proefschrift Harleem.
- Djohan Hanafiah. 1989a. *Kuto Besak. Upaya Kesultanan Palembang menegakkan Kemerdekaan*, Jakarta: C.V. Haji Masagung.
- . 1989b. *Palembang Zaman Bari Citra Palembang Tempo Doeloe*, Palembang: Humas Pemda Kotamadya Palembang.
- Djohan Hanafiah dan A.W. Widjaja (ed.). 1995. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Daerah Sumatera Selatan*. Palembang: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- Encyclopædie van Nederlandsch Indie* Vol II., 1917, Leiden: E.J. Brill.
- de Graaf, H.J. dan Th. Pigeaud. 2001. *Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan sejarah politik abad XV dan XVI*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafitti.
- Groeneveldt, W.P. 1960. *Historical Notes on Indonesia and Malaya Compiled from Chinese Sources*. Djakarta: Bhratarata.
- Hirth, Friederich dan W.W. Rockhill (eds.). 1966. *Chau JuKua. His Work on the Chinese and Arab Trade in the Twelfth and Thirteenth Centuries, entitled Chu-fan-chi*. Amsterdam: Oriental Press.
- Krom, N.J.. 1931. "Antiquities of Palembang", dalam *ABIA* (hal.) 29-33.
- . 1938. "De heiligdommen van Palembang", dalam *MKAWAL* I: 392-423.
- Kulke, Hermann. 1985. "Kedatuan Srivijaya: Kraton or Empire of Srivijaya", makalah pada *Seminar on the Asian City and State*.
- Marsden, William. 1966. *History of Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- McKinnon, E. Edwards. 1979. "Spurmarked Yueh-type sherds at Bukit Siguntang", dalam *JMBRAS* 52 (2): 41-47
- Miksic, John N.. 1979. *Archaeology, Trade and Society in Northeast Sumatra*. (Ph. D Thesis). New York: Cornell University.
- . 1984. "Penganalisaan Wilayah dan Pertumbuhan Kebudayaan Tinggi di Sumatra Selatan", dalam *Berkala Arkeologi* 5(1). Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogya-karta.
- Mills, J.V.G.. 1970. *Ma Huan. Yingyai Sheng-lan*. 'The Overall Survey of the Ocean's Shore' (1433). [translated from the Chinese text edited by Feng Ch'engChün with introduction, notes and appendices by JVG Mills]. Cambridge: University Press for the Hakluyt Society.
- Oei Soan Nio. 1972. *Beberapa Catatan tentang W.P. Groeneveldt: Historical Notes on Indonesia and Malaya Compiled from Chinese Sources*. Jakarta: Panitia Penyusunan Buku Standard Sejarah Nasional Indonesia.
- Pigeaud, Th. G. Th.. 1960-1963. *Java in the Fourteenth Century: A Study in Cultural History. The Nāgarakrtāgama by Rakawi Prapañca of Majapahit, 1365 A.D.* The Hague: Martinus Nijhoff.
- Poerbatjaraka, R. Ng, 1952. *Riwajat Indonesia I*. Djakarta: Pembangunan.
- Satari, Sri Soejatmi. 2002. "Sebuah Situs Hindu di Sumatra Selatan: Temuan Kelompok Candi dan Arca di Bumiayu", dalam *25 Tahun Kerjasama Pusat Penelitian Arkeologi dan École française d'Extrê-Orient*. Jakarta: École française d'Extrê-Orient.

- Schnitger, F.M.. 1936. *Oudheidkundige vondsten in Palembang*. Leiden: E.J. Brill.
- _____. 1937. *The archaeology of Hindoo Sumatra*. Leiden: E.J. Brill.
- Sevenhoven, I.L.. 1971. *Lukisan tentang Ibukota Palembang*. Jakarta: Bhratara.
- Soekarto Karto Atmodjo, M.M.. 1993. "Om yam", dalam *Kadatuan Sriwijaya dalam Perspektif Sejarah dan Arkeologi*. Palembang: Pemerintah Daerah Tk. I Propinsi Sumatra Selatan.
- Suleiman, Satyawati. 1981. *Sculptures of Ancient Sumatra*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Takakusu, J. 1896. *A Record of Buddhist Religion as Practised in India and the Malay Archipelago (A.D. 671-695) by I-tsing*, Oxford.
- Tardjan Hadidjaja. 1951. *Sedjarah Melaju*. Djakarta: Firma Penerbitan Saptadarma.
- Tjandrasasmita, Uka. 1984. "Jaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia", dalam Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto (ed.) *Sejarah Nasional Indonesia* Vol. III, Jakarta: Balai Pustaka.
- Westenenk, L.C.. 1923. "Boekit Sigoentang en Goenoeng Mahameroe uit de Sedjarah Melayu", dalam *TBG* 68 (1): 212-226
- Woelders, M.O.. 1975. "Het Sultanaat Palembang 1811-1825". *VKI* 72. s'Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Wolters, O.W.. 1974. *Early Indonesian Commerce. A Study of the Origins of Srivijaya*. Ithaca, London: Cornell University Press.

PENGELOLAAN SUMBERDAYA BUDAYA DI PERKOTAAN

Daud Aris Tanudirjo¹

Abstrak

Pengelolaan warisan budaya banyak diperbincangkan, tetapi hakekat pengelolaan warisan budaya itu belum cukup dipahami. Pengelolaan warisan budaya pada hakekatnya adalah upaya memberi makna baru pada warisan budaya. Makna suatu warisan budaya berbeda antar satu pihak dengan pihak lain, sehingga pengelola seharusnya menerapkan manajemen konflik. Dalam era global pengelolaan warisan budaya kota berperan amat penting dalam menciptakan jatidiri dan identitas komunitas kota. Kota-kota besar yang memperhatikan warisan budaya, baik yang bendawi maupun tradisi, ternyata mendapatkan keuntungan besar dalam era global. Dalam pengelolaannya memperhatikan prinsip keaslian, kontekstualisasi, dan interaktivitas

Kata kunci : pengelolaan, sumberdaya budaya, perkotaan

“Setiap kota adalah kumpulan dari warisan budaya; beberapa di antaranya menjadi warisan budaya terbesar di dunia”

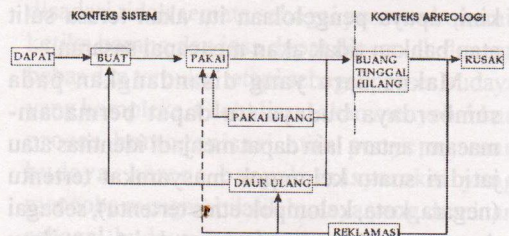
(Boniface dan Fowler, 1993)

Dalam dasawarsa terakhir ini, masalah pengelolaan sumberdaya budaya, khususnya warisan budaya, menjadi salah satu bahasan yang menarik. Hal ini disebabkan karena kini banyak orang melihat sumberdaya budaya itu sebagai sumberdaya yang berpotensi untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas, terutama dikaitkan dengan potensinya sebagai daya tarik wisata. Selain itu, sumberdaya budaya dianggap mempunyai nilai-nilai yang dapat dijadikan identitas suatu bangsa atau suatu daerah dalam era global ini.

Namun, banyak orang memiliki persepsi yang berbeda tentang bagaimana sumberdaya budaya itu harus dikelola dan dimanfaatkan. Lebih daripada itu, banyak orang yang tidak cukup memahami apa hakekat pengelolaan sumberdaya budaya itu. Untuk itu, sebelum lebih jauh berbicara mengenai pengelolaan sumberdaya budaya di perkotaan, perlu dikemukakan lebih dulu hakekat pengelolaan sumberdaya budaya itu, baik yang bersifat bendawi, tindakan-tindakan, maupun gagasan-gagasan. Untuk itu, kerangka transformasi

budaya yang dikemukakan oleh Michael B. Schiffer (1976) akan sangat membantu.

PROSES TRANSFORMASI



Menurut Schiffer, sumberdaya budaya selalu akan mengalami proses didapat, dibuat, dan dipakai sesuai dengan tujuan pembuatannya. Semua kegiatan itu berada pada konteks sistem. Artinya, sumberdaya budaya itu masih berada dan berfungsi di tengah masyarakat. Dalam konteks sistem, sumberdaya budaya dapat dipakai berulang-ulang sesuai fungsi semula (reuse) atau dapat mengalami daur ulang melalui proses pembuatan kembali menjadi sesuatu yang baru. Namun, ada pula sumberdaya budaya yang

¹ Dr. Daud Aris Tanudirjo adalah staf pengajar Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

dianggap sudah tidak diperlukan lagi lalu dibuang, ditinggalkan atau hilang, sehingga masuk ke dalam konteks arkeologis. Sumberdaya budaya yang sudah masuk ke konteks arkeologi dapat saja kemudian punah. Sebaliknya, sumberdaya itu juga dapat difungsikan lagi dengan dimasukkan kembali pada konteks sistem, melalui reklamasi atau di sini lebih populer disebut revitalisasi. Dalam proses itu, sumberdaya budaya dapat langsung digunakan seperti semula (*reuse*) atau dapat pula didaur ulang (*recycle*) sebelum dapat dimanfaatkan. Melalui kerangka Schiffer ini, dapat dipahami bahwa hakekat pengelolaan sumberdaya budaya adalah melestarikan sumberdaya budaya agar tetap ada dalam konteks sistem dan berguna bagi kehidupan masyarakat sekarang. Untuk itu, seringkali sumberdaya budaya itu harus melalui proses daur ulang dan reklamasi. Dengan kata lain, pengelolaan sumberdaya budaya adalah upaya untuk memberi makna baru bagi sumberdaya budaya itu. Karena itu, jika tidak ada makna baru yang dapat dirasakan masyarakat masa kini, upaya pengelolaan itu akan terasa sulit atau bahkan tidak akan mencapai sasaran.

Makna baru yang disandangkan pada sumberdaya budaya itu dapat bermacam-macam, antara lain dapat menjadi identitas atau jatidiri suatu kelompok masyarakat tertentu (negara, kota, kelompok etnis tertentu), sebagai daya tarik wisata, atau untuk kajian ilmu pengetahuan. Makna yang berikan akan sangat tergantung pada keinginan dan kesepakatan bersama seluruh unsur masyarakat. Dalam konteks ini, perlu adanya kajian tentang nilai penting sumberdaya budaya, sosialisasi nilai penting, mencari kesepakatan dalam memberi makna pada sumberdaya budaya, lalu menetapkan cara-cara pengelolaan (*management-plan*) yang paling tepat.

Pengelolaan sumberdaya budaya di perkotaan memang tidaklah semudah jika dilakukan di kawasan yang relatif berpenduduk sedikit. Hal ini disebabkan karena kawasan perkotaan mempunyai ciri yang khas, yaitu keberagamannya dalam berbagai hal. Kota

muncul karena berbagai alasan, di antaranya akibat perkembangan suatu permukiman menjadi pusat pemerintahan, pusat religi, maupun pusat perdagangan. Pada era globalisasi seperti saat ini, kota berperan penting sebagai tempat pertukaran budaya. Karena itulah, pada umumnya kota mempunyai keberagaman budaya yang tinggi. Kenyataan ini membuat upaya mencari kesepakatan pemaknaan baru sumberdaya budaya menjadi semakin tidak gampang. Setiap orang atau kelompok akan memiliki tafsir dan keinginannya sendiri untuk memberikan makna baru. Barangkali memang benar apa yang kemukakan beberapa pakar arkeologi (a.l. Hodder, 1999; Cleere, 1990; Little, 2002) bahwa warisan budaya tidak hanya memiliki publik yang tunggal tetapi jamak. Masing-masing pihak merasa punya kepentingan dan ingin mengambil manfaat dari warisan budaya. Hal ini tentu saja wajar, karena warisan budaya memang dapat memiliki nilai penting yang berbeda bagi setiap pihak. Ada yang menilai pentingnya suatu warisan budaya dari segi ilmu pengetahuan (untuk pengajian dan pengujian akademik), sejarah (sebagai bukti-bukti peristiwa penting dalam kehidupan manusia), etnik (jatidiri dan latar kehidupan suatu bangsa tertentu), estetis (bukti hasil seni yang adiluhung), maupun publik, yaitu kepentingan masyarakat luas termasuk untuk pendidikan masyarakat, daya tarik wisata, serta keuntungan ekonomis (Schiffer dan Gumerman, 1977). Perbedaan kepentingan ini jelas berpotensi menjadi sumber pertentangan atau konflik. Dengan latarbelakang seperti itu, pengelolaan sumberdaya budaya di perkotaan harus mampu menerapkan manajemen konflik.

Artinya, pengelola harus bersikap tidak berpihak. Mereka harus lebih berperan sebagai mediator, fasilitator, atau pun penjaga-pengelola (lebih lanjut lihat Tanudirjo, 2003). Sebagai mediator, mereka perlu lebih banyak melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam pengambilan keputusan sejak awal, dari studi kelayakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan. Hal itu dapat tercapai antara lain

lewat kerjasama dan konsultasi dengan berbagai unsur dalam masyarakat, khususnya masyarakat setempat (Tanudirjo, 2000). Dengan demikian, mereka dapat mengabdikan untuk kepentingan yang beragam dari masyarakat luas.

Sebagai *fasilitator*, pengelola harus mampu membantu proses pemaknaan atau pemanfaatan sumberdaya budaya itu. Mereka harus dapat memberikan masukan-masukan sesuai dengan keahlian dan pengetahuan, tetapi masyarakat yang akan menentukan pilihan mereka sendiri. Selain itu, mereka harus dapat membantu masyarakat atau pihak-pihak yang berbeda kepentingan menemukan solusi konflik, ketika terjadi perbedaan kepentingan dalam memaknai warisan budaya.

Pengelola warisan budaya yang bijaksana akan menempatkan dirinya sebagai *penjaga-pengelola* (= *steward*; lihat Mayer-Oakes, 1990). Secara profesional, pengelola warisan budaya bertanggungjawab terhadap kelestarian dan pemanfaatan warisan budaya. Namun mereka tidak dapat berbuat semena-mena terhadap sumber daya itu karena itu semua bukan milik mereka. Sebaliknya, penjaga-pengelola harus lebih banyak mendengar kemauan dan kepentingan pemilik sumberdaya itu sendiri, yaitu masyarakat luas. Hanya dengan cara demikian, maka pengelolaan warisan budaya akan dihargai oleh masyarakat, dan tidak sebaliknya malah dicela dan dicap sebagai penghambat pembangunan.

Ciri kota yang lain adalah penduduk yang relatif padat, sehingga kebutuhan akan lahan menjadi tinggi, sementara rangsangan untuk menganut budaya baru atau gaya hidup baru begitu kuat. Akibatnya, proses transformasi yang digambarkan oleh Schiffer berjalan lebih dinamis. Proses daur-ulang banyak terjadi untuk mengikuti kecenderungan budaya baru. Bangunan lama digusur dan digantikan dengan yang baru. Gaya hidup yang lama cepat digantikan dengan gaya hidup baru. Di perkotaan yang berciri kehidupan materialis dan konsumtif, sumberdaya yang memiliki nilai-nilai sejarah, kebudayaan, dan ilmu

pengetahuan dengan mudah dikorbankan untuk kepentingan komersial semata. Karena itulah, sumberdaya budaya amat rawan menghadapi kehancuran, dengan mengatasnamakan dinamika perkembangan kota itu sendiri. Di Indonesia, bukti-bukti mengenai hal ini sudah tak terkirakan banyaknya. Karena itulah, pengelolaan sumberdaya budaya di perkotaan memang membutuhkan perhatian khusus. Pengelola yang bertanggungjawab harus mampu mempertahankan warisan budaya, dengan memberikan alasan masuk akal dan alternatif jalan keluar atau solusi yang dapat diterima untuk mempertahankannya.

Sebenarnya justru dalam Era Global seperti saat ini, sumberdaya budaya berperan amat penting dalam menciptakan jatidiri komunitas kota. Di banyak negara yang sudah berkembang, misalnya, bangunan-bangunan lama justru dilestarikan dengan baik sebagai bagian dari identitas atau jatidiri seluruh kota dan penduduknya. Hal ini dapat terjadi karena para pengambil keputusan di negara maju sangat paham arti globalisasi. Globalisasi disadari tidak semata sebagai proses ekonomi, ketika barang dan jasa dapat diperoleh dengan bebas dan terbuka, tetapi sebagai proses budaya yang kompleks. Globalisasi akan menyebabkan proses homogenisasi atau penyeragaman budaya, karena banyak masyarakat yang mencoba mengambalih budaya yang dominan sebagai budaya mereka. Apabila penyerapan unsur budaya dominan terjadi begitu kuat maka mereka akan kehilangan jatidiri (Friedman, 1994; Holton, 1998; Robertson, 1992). Menyadari hal ini, banyak negara maju yang tidak terlena pada budaya dominan. Mereka tetap berusaha untuk mempertahankan jatidiri mereka, melalui hal-hal yang unik atau sesuatu yang tidak terdapat di tempat lain, di antaranya warisan budaya yang telah lama mereka lestarikan. Para pemerhati budaya seperti Boniface & Fowler (1993), misalnya, menunjukkan bagaimana kota-kota besar yang tetap memperhatikan tinggalkan-tinggalan budaya lama justru mendapat untung besar dalam era globalisasi.

London dan Paris disebut sebagai dua kota yang menjadi daya tarik tersendiri karena warisan budayanya. Wisatawan datang untuk melihatnya, karena kota-kota itu unik dengan kawasan kuno. Di tengah budaya dunia yang menjadi cenderung homogen, orang pasti akan berkeinginan untuk melihat dan mengagumi hal-hal yang khas dan unik. Keinginan ini semakin nyata jika dikaitkan dengan kecenderungan berwisata yang muncul dalam dasarwarsa terakhir ini.

Seperti dikemukakan oleh ahli kepariwisataan Buhalis dan Fletcher (1995), akhir-akhir ini telah terjadi perubahan besar dalam industri pariwisata. Apabila beberapa saat lalu orang cenderung melakukan wisata bersama dalam paket-paket wisata (*mass-tourism*) kini mereka cenderung melakukan wisata yang bersifat pribadi. Pada paket-paket wisata, wisatawan menghendaki kemewahan dan potongan harga yang besar, sehingga pengelola wisata cenderung menyediakan fasilitas mewah dan berusaha menekan harga serendahnyanya. Karena itu, mereka tidak mau membayar ongkos sosial dan kemerosotan lingkungan akibat pariwisata. Sebaliknya, kecenderungan berwisata yang baru (sering disebut *ecotourism*, *alternative tourism*, *greentourism*) justru membawa niat untuk mendapat pengalaman unik sambil ikut melestarikan sumberdaya wisata yang mereka kunjungi beserta lingkungannya. Para wisatawan justru ingin terlibat langsung dalam kegiatan budaya yang ada dan memberikan sumbangan bagi pelestariannya.

Dalam konteks ini, kota-kota yang memiliki warisan budaya yang unik baik yang bendawi (*tangible*) seperti tinggalan-tinggalan kuno, maupun tradisi (*intangible*) berupa adat istiadat dan kegiatan-kegiatan budaya, kini lebih menarik wisatawan daripada kota-kota yang tanpa warisan budaya. Tentu saja, daya tarik ini akan sangat terkait dengan bagaimana sumberdaya budaya itu disajikan kepada masyarakat.

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam hal penyajian ini: keaslian

(*authenticity*), kontekstualisasi (*contextualization*), dan interaktivitas (*interactivity*). Setiap upaya pelestarian pasti bertujuan untuk sedapat mungkin mempertahankan keaslian apa yang ingin dilestarikan. Karena itu, prinsip keaslian harus selalu dianut. Dalam hal ini, keaslian nilai-nilai penting dari sumberdaya budaya itulah yang harus tetap dilestarikan. Untuk dapat melestarikan, nilai-nilai penting itu harus disajikan dengan cara-cara yang kreatif sehingga nilai-nilai itu dapat diketahui masyarakat luas. Tanpa ada informasi tentang nilai penting, masyarakat tidak akan menghargai sumber daya budaya itu. Karena itu, banyak warisan budaya di kota yang pelestariannya tidak didukung oleh masyarakat karena mereka tidak tahu nilai pentingnya. Informasi nilai penting adalah salah satu kunci keberhasilan pelestarian. Mempertahankan keaslian juga menjadi salah satu cara untuk memberikan kesempatan pada masyarakat yang plural atau multikultural untuk menafsirkan menurut versi masing-masing. Dengan demikian, cara ini setidaknya juga akan mengurangi kemungkinan konflik dalam pemanfaatannya. Dalam konteks kepariwisataan, penelitian menunjukkan umumnya masyarakat yang hidup dengan segala kecanggihan teknologi lebih merindukan suasana asli (*authentic*), karena di situlah mereka dapat menemukan jatidiri mereka yang tidak dapat mereka temukan dalam kehidupan keseharian mereka (Lanfant, 1995).

Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan dengan skema Schiffer di atas, kelestarian sumberdaya budaya juga akan tergantung pada upaya pemaknaan kembali, maka perlu adanya proses kontekstualisasi. Artinya, nilai-nilai penting tadi harus dijelaskan dalam konteks masa kini. Selama ini, pelestarian lebih sering dilakukan demi pelestarian itu sendiri, sehingga masyarakat tidak benar-benar dapat merasakan manfaatnya. Seharusnya, pelestarian harus dipahami sebagai upaya mempertahankan atau mengembalikan warisan budaya ke dalam konteks sistem.

Karena itu, seringkali perlu proses “daur ulang” agar dapat bermakna kembali sesuai dengan konteks masa kini. Karena itu, pelestarian juga memungkinkan adanya perubahan dalam batas-batas tertentu, sejauh tidak akan menghilangkan nilai-nilai penting yang dikandungnya. Upaya kontekstualisasi, seharusnya ditujukan untuk memberi ‘roh kehidupan’ kembali bagi warisan budaya yang pernah hilang, ditinggalkan, atau menjelang punah. Salah satu contoh yang banyak disebut sebagai keberhasilan proses kontekstualisasi ini adalah pendirian bangunan baru piramida kaca yang dirancang seorang Amerika keturunan Cina di Museum Louvre, Paris. Bangunan terkesan modern berlanggam non-western itu justru menjadi bagian tak terpisahkan (menjadi lorong masuk museum) dari kompleks bangunan tua di sekitarnya. Keduanya menjadi paduan serasi antara yang baru dan yang lama, dan keduanya menjadi warisan budaya yang bernilai tinggi (Boniface dan Fowler, 1993).

Proses kontekstualisasi akan lebih berhasil apabila kadar interaktivitas antara sumberdaya budaya dengan masyarakat masa kini semakin tinggi. Sebagaimana telah dikemukakan masyarakat saat ini mengutamakan kualitas pengalaman yang dirasakan ketika mengunjungi suatu tempat. Mereka ingin lebih ‘aktif terlibat’ dalam proses memahami tempat yang dikunjungi. Karena itu, para pengelola harus lebih mampu menghadirkan warisan budaya dengan lebih hidup, antara lain melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pengunjung, di antaranya peragaan kembali (*reenactment*), eksperimen (*experiment*) cara-cara kehidupan masa lampau, meniru cara pembuatan benda kuno, bahkan juga proses penelitiannya (Tanudirjo, 2001). Penyajian informasi tambahan secara audio-visual atau multimedia akan meningkatkan keterlibatan pengunjung. Dalam konteks ini, diharapkan ruang-ruang yang ditempati oleh sumber daya budaya diharapkan dapat menjadi ruang publik baru bagi masyarakat perkotaan. Di ruang publik seperti inilah masyarakat perkotaan yang cenderung individualistik akan dapat

menemukan kedudukan dan hubungan sosialnya kembali.

Di samping aspek-aspek di atas, aspek lain yang juga harus diperhatikan dalam pengelolaan sumberdaya budaya di perkotaan adalah teknologi konservasi, khususnya berkaitan dengan sumberdaya budaya bendawi. Pada umumnya, kota merupakan pusat dagang dan sekaligus industri. Karena itu, biasanya di perkotaan tingkat persinggungan antara sumberdaya budaya dengan faktor penyebab kerusakan, seperti polusi udara, kebisingan, getaran lalu lintas, dan keamanan, semakin tinggi. Untuk itu, dibutuhkan teknologi konservasi yang lebih tepat guna dan canggih. Upaya-upaya monitoring dan mitigasi harus diperhatikan benar. Selain itu, manajemen resiko dan bencana harus benar-benar diperhatikan. Fasilitas-fasilitas itu harus dipersiapkan dengan baik sesuai dengan ciri dan sifat sumberdaya budaya yang ada.

Akhirnya, dalam makalah yang singkat ini, tidak mungkin dapat dikemukakan semua aspek pengelolaan sumberdaya budaya di perkotaan dengan tuntas dan rinci. Masih ada sejumlah aspek lain yang perlu juga dipahami dalam proses pengelolaan sumberdaya budaya di perkotaan. Namun, aspek-aspek yang telah dikemukakan di atas diharapkan mampu menjadi masukan yang tentunya diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan dasar pelaksanaan pengelolaan sumberdaya budaya di Palembang.

DAFTAR RUJUKAN

- Boniface, P dan P.J. Fowler. 1993. *Heritage and tourism in 'the global village'*. Routledge, London-New York.
- Buhalis, D dan J. Fletcher. 1995. “Environmental impacts on tourist destinations : an economic analysis,” dalam H. Coccossis dan P. Nijkamp (eds.), *Sustainable tourism development*. Avebury, Singapore-Sydney, hlm. 3 – 24

- Cleere, Henry F. 1990. "Introduction: the rationale of archaeological management", dalam Henry F. Cleere (ed), *Archaeological heritage management in the modern world*. London: Unwin-Hyman.
- Friedman, J. 1994. *Cultural identity and global process*. Sage publication.
- Hodder, I. 1999. *The archaeological process, an introduction*. Oxford: Blackwell.
- Holton, R.J. 1998. *Globalization and the nation state*. MacMillan Press.
- Little, Barbara J. 2002. Archaeology as a shared vision, dalam Barbara J. Little (ed.), *Public benefits of archaeology*. Gainesville. University Press of Florida. Hlm. 3-19
- Mayer-Oakes, William J. 1990. "Science, service, and stewardship: a basis for the ideal archaeology of the future," dalam Henry F. Cleere (ed), *Archaeological heritage management in the modern world*. London: Unwin-Hyman
- Robertson, R 1992. *Globalization, social theory and global culture*. Sage Publication
- Schiffer, M.B. 1976. *Behavioural archaeology*. New York: Academic Press
- Lanfant, M.F. 1995. "International tourism, Internalization and the challenge of identity", dalam M.F. Lanfant, J.B. Allock, and E.M. Bruner (eds.), *International tourism : identity and change*. Sage Publication.
- Schiffer, M.B. 1976. *Behavioral arcaeology*. New York Academic Press
- Schiffer, M. B. and G.J. Gummerman (ed). 1977. *Conservation Archaeology*. New York : Academic Press.
- Tanudirjo, D.A. 1998. "CRM sebagai manajemen konflik". *Artefak* No.19 Februari 1998.
- Tanudirjo, D.A. 2000. "Reposisi arkeologi dalam era global." *Buletin Cagar Budaya 1(2): 11 – 26*, Juli 2000 (suplemen)
- Tanudirjo, D.A. 2001. "'Wisata Arkeologi' antara Ilmu dan Hiburan", dalam M.I. Mahfud (ed.), *Memediasi masa lalu, spektrum arkeologi dan pariwisata*. Makasar : Balai Arkeologi Makasar dan Lephah. Hlm. 90-110.

PEMANFAATAN WARISAN BUDAYA KOTA PALEMBANG

Hendri Yansyah¹

Abstrak

Warisan budaya kota Palembang membuktikan bahwa Palembang adalah kota air. Warisan budaya kota Palembang telah dimanfaatkan secara positif untuk objek wisata, pendidikan, penelitian, sarana perkantoran, tempat hiburan, pengembangan bisnis, dan sarana peribadatan. Namun, pemanfaatannya belum optimal karena perawatan dan pemeliharannya kurang diperhatikan oleh Pemerintah, apalagi swasta. Sementara ini pembenahan wisata terfokus pada perbaikan sarana transportasi, gedung perkantoran, pasar, sarana ibadah, terminal dan beberapa sarana umum lainnya yang menunjang kegiatan wisata air. Program pengembangan jangka panjang telah disusun berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 6 tahun 2006 tentang Penetapan Palembang sebagai Kota Wisata Sungai

Kata Kunci : pemanfaatan, warisan budaya, Palembang

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Palembang merupakan kota yang sangat tua di Indonesia. Prasasti Kedukan Bukit, yang berangka tahun 682 M, menceritakan pembangunan *wanua*. Secara ilmiah diyakini bahwa itu adalah kota Palembang. Prasasti yang ditulis dalam bahasa Melayu Kuno dan beraksara Palawa disebut Prasasti Kedukan Bukit karena ditemukan dikawasan Kedukan Bukit. Dari penelitian para ahli bahwa *wanua* itu dibangun pada hari kelima paro terang bulan Asadha tahun 604 Saka atau tanggal 16 Juni 682 Masehi. Ini adalah dasar para ahli dalam menetapkan hari jadi Kota Palembang yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Palembang No. 57/UM/WK, tanggal 6 Mei 1972. Pada tahun 2006 ini Kota Palembang berusia 1324 tahun.

Kota Palembang adalah kota air, yang ditengah-tengah kota mengalir Sungai Musi. Sungai Musi ini membagi Kota Palembang atas dua bagian yaitu wilayah Seberang Ilir dan Seberang Ulu. Gambaran kota Palembang *tempo doeloe* banyak diinformasikan oleh para pedagang maupun pelancong misalnya saja

keadaan kota Palembang padat tahun 1000 M dilaporkan oleh pedagang Arab seperti yang digambarkan oleh Ajaib Al-Hind dalam buku Tibbets. Begitu pula Ma-huan tahun 1416 M dalam buku *Ying-yai-sheng-lan*, keduanya menggambarkan kota Palembang sebagai kota yang dikelilingi air dengan banyak anak sungai sulit menemui tanah kering, penduduk membuat rumah diatas rumah rakit yang terbuat dari kayu dan bambu. Rumah rakit itu diikatkan pada tiang, bila air pasang rakit akan mengambang dan tidak tenggelam. Sedangkan rumah pejabat istana berada ditempat yang tinggi (kering) tidak jauh dari sungai.

Kalau kita tinjau dari pengertian kota "Palembang" seperti yang dituliskan oleh Wilkinson 1903, kata Palembang dari kosa kata *lembang* (sebuah kosa kata Melayu kuno). *Lembang* berarti tanah yang rendah, tempat yang berserak-serak, akar yang membengkak karena lama terpendam dalam air. Menurut bahasa Melayu - Palembang *lembang* atau *lembeng* berarti rembesan air. Awalan *pa* atau *po* artinya menunjukkan tempat. Orang-orang Cina pada waktu itu menyebutnya sebagai Kung atau Kiu-kiang yang artinya pelabuhan lama atau terusan lama. Menurut Sevenhoven 1971 dan de Suerler 1855 menterjemahkannya

¹ Drs. H. Hendri Yansyah adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang.

sebagai tanah yang hanyutkan ketepi (tanah yang terdampar).

Kesemuanya menunjukkan arti tentang Palembang sebagai kota air. Ini tidak jauh dari kenyataan yang ada sampai sekarang, bahkan dari data statistik 1990 mengatakan bahwa masih terdapat 52,24 % tanah yang tergenang air. Tahun 1990 masih tercatat sebanyak 117 buah anak sungai yang mengalir di tengah kota.

Berapa luas kota Palembang terutama pasca-Sriwijaya, tentunya sanga sulit ditemukan, mengingat pada umumnya masyarakat membuat rumah dari bahan kayu yang tidak bertahan lama. Dari catatan pelaut Arab, Abu Zaid Hasan, mencatat bahwa pada abad ke-10 M, luas kota di dengar dari kokok ayam di waktu subuh dan terus menerus berkokok bersahutan denga ayam jantan yang lainnya berjarak lebih dari 100 *prasang* (1 *prasang* kurang lebih 6, 25 km), karena kampungnya bersambung satu sama lain tanpa terputus. Dari segi ukuran luas boleh dikatakan Kota Palembang sangat luas, dari ukuran jarak kedudukan prasasti Kedukan Bukit (682 M) yang berada di kaki Bukit Siguntang. Ujung Timur terdapat Prasasti Telaga Batu (Kampung 2 Ilir di belakang kompleks PT Pusri), sedangkan bagian barat lautnya terdapat prasasti Talang Tuo (termasuk Kecamatan Talang Kelapa), yakni pembangunan Taman Sriksetra oleh Sri Jayanasa. Lokasi tersebut telah mencerminkan lingkaran kota Palembang moderen sekarang yang luasnya 400,62 Km².

Para pelaut tempo doeloe merasakan jarak dari satu tempat ketempat lain di Palembang cukup jauh , oleh karena bentuk kota (morfologi) Palembang berbentuk pita (*ribbon shaped city*). Ini disebabkan oleh karena peranan Sungai Musi selain sebagai jalur transportasi, juga merupakan ruang perkotaan, dimana rumah-rumah rakit terhampar disungai tersebut.

Mengingat peranan Sungai Musi sejak dahulu sangat penting baik dari segi sarana transportasi, pemukiman dan fungsi lainnya, tidak menutup kemungkinan peninggalan budaya masa lalu masih terdapat di sepanjang

alur Sungai Musi yang digunakan sebagai kota Palembang.

B. TUJUAN PENULISAN

Penulisan makalah dimaksudkan untuk mengkaji ulang tentang peninggalan budaya kota Palembang yang dikaitkan denga upaya pengelolaan warisan budaya tersebut. Makalah in disampaikan pada lokakarya yang bertema "Sebiduk Disungai Musi" yang diselenggarakan oleh Balai Arkeologi Palembang.

C. PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dijelaskan diawal tulisan bahwa kota Palembang merupakan Kota tua yang memiliki corak dan ragam pemerintahan, corak dan ragam budaya, adat-istiadat dan agama/kepercayaan. Tidak semua tinggalan budaya ini dapat kita temukan mengingat antara lain:

1. Bahan yang digunakan pada umumnya dari kayu sehingga tidak bertahan lama.
2. Banyak dibumi hanguskan Belanda ketika benteng kuto besak jatuh ketangan Belanda
3. Kondisi alam kota Palembang tempo doeloe yang berawa-rawa dan banyak air sehinga sulit mencari tempat untuk membangun tempat beribadatan, keraton, rumah dan lainnya yang bahan dari batu.

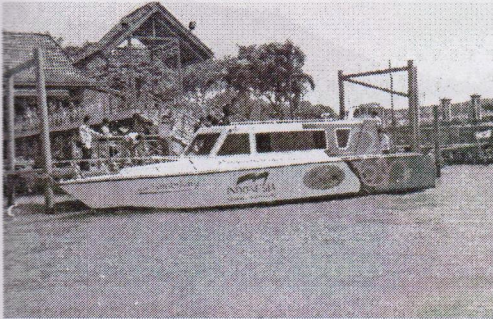
Namun demikian bukan berarti tidak ada sama sekali warisan budaya tempo doeloe di Kota Palembang yang dapat disaksikan benda-benda yang dimaksud antara lain.

1. Benteng Kuto Besak



Bangunan ini dibangun dari tahun 1780 – 1797, atas prakarsa Sultan Mahmud Badaruddin I. Pelaksana dan penyelesaian akhir dilaksanakan oleh Sultan Muhammad Baharuddin diresmikan pada tanggal 21 Februari 1797. Benteng Kuto Besak ini berukuran 290 m, lebar 180 m, tinggi 660 – 720 m. Bangunan ini merupakan kebanggaan *wong* Palembang karena satu-satunya yang memiliki tembok sebagai syarat sebuah Benteng. Ketangguhan benteng telah diuji pada masa perang Menteng 1819 dan jatuh pada Belanda tahun 1821.

2. Dermaga



Di depan Benteng Kuto Besak terdapat sebuah dermaga yang dahulu disebut tangga dalam atau biasa juga disebut *pelabuhan dalem*. Tempat ini dahulu digunakan sultan dan pembesar kerajaan untuk menambatkan perahu. Agak menjorok ke Sungai Musi berdiri sebuah bangunan seperti rumah kecil, yang merupakan gerbang masuk beratap limas. Bangunan kecil itu disebut *tangga raja*, ialah tangga tempat jalan sultan dari atau ke sungai, begitu juga dengan para pembesar kerajaan, para tamu dan sebagainya. Pada tahun 1916 sebelum Sungai Tengkuruk ditimbun atau diuruk terdapat *tangga raja* menuju ke Masjid Agung.

3. Bekang II Sriwijaya

Bangunan peninggalan Belanda ini yang masih bertahan hingga sekarang. Bangunan ini bergaya Indis, dibangun awal abad ke-20 M. Saat ini digunakan oleh Kodam II Sriwijaya sebagai gedung perbekalan.

4. Pasar 16 Ilir



Pada masa Kesultanan Palembang Darussalam (Sultan Mahmud Badaruddin I) di pasar 16 Ilir sekarang dibangun Kraton dan Benteng yang disebut Kuto Tengkuruk. Akibat penyerangan Belanda benteng dan kraton dibumi-hanguskan. Setelah Sungai Tengkuruk diuruk dibangunlah Kota Palembang, tidak ketinggalan pasar 16 Ilir sebagai pasar Induk Palembang sampai sekarang.

5. Pasar Kuto / Kuto Batu

Disebut Kuto Batu karena di sini juga dibangun benteng yang di kelilingi tembok batu karena itu disebut *kuto batu*. Sekitar Kuto Batu itu dibangun perkampungan Arab dengan rumah kayu yang sudah berusia ratusan tahun. Menurut sejarah perkampungan Arab ini dibangun atas hibah dari Sultan karena seorang Pemuda Arab kawin dengan cucu Sultan.

6. Masjid Lawang Kidul



Masjid ini dibangun kurang lebih 1310 H oleh seorang ulama besar Palembang bernama Mgs. H. Abdul Hamid atau Kiyai Merogan. Walaupun sudah berusia ratusan tahun, namun

masih kokoh berdiri setelah direnovasi tahun 1987. Ukuran asli adalah 20 x 20 m dan diperluas menjadi 40 x 41 m.

7. Kuto Gawang

Suatu daerah yang sangat strategis yakni muara Sungai Buah dan Sungai Taligawe. Karena itu di sini dibangun benteng yang terbesar di antara benteng yang ada atas prakarsa Ki Gede Ing Suro Tuo. Sekeliling benteng berupa pagar kayu unglan dan kayu besi. Fungsi benteng adalah melindungi kraton dan perumahan penduduk. Para pendatang tinggal di sepanjang Sungai Musi. Benteng ini dibakar oleh Belanda tahun 1659 M setelah terjadi pertempuran hebat. Di situs kraton pada tahun 1959 dibangun pabrik Pupuk Sriwijaya.

8. Pulau Kemaro



Pulau yang terletak ditengah Sungai Musi, dahulu juga sebagai tempat pertahanan Sultan Mahmud Badaruddin II tahun 1819. Di pulau ini berkembang juga legenda percintaan antara putri Sultan (Siti Fatimah) dengan pemuda pedagang Cina (Tan Bun An). Kembaro/ Kemaro berarti daerah yang tidak pernah tenggelam/tergenam air walaupun air pasang. Mengingat besarnya kepercayaan masyarakat pada legenda Tan Bun An, pada tanggal 15 setelah Imlek diadakan upacara Cam Go Me yang banyak diminati umat Budha dan Konghucu, dalam negeri maupun luar negeri.

9. Makam Bagus Kuning

Bagus Kuning adalah nama lain dari Tubagus Kuning, salah seorang panglima dari kerajaan Banten. Pada waktu terjadi peperangan antara Banten dan Palembang pada tahun 1596, Tubagus Kuning membelot ke Palembang dan oleh Sultan Palembang diangkat menjadi panglima perang. Di sini ditemukan juga legenda Makam Kramat Bagus Kuning dengan kera-kera jelmaan pengiringi Bagus Kuning.

10. Perkampungan Arab 7 Ulu



Perkampungan ini merupakan perpindahan dari perkampungan Arab *seberang ilir* (utara Sungai Musi) pada abad ke-18. Suku Arab yang ada di sini adalah Al Hadadat, Al Ahas, Al Kap, Al Hasegaf, ± 70 kepala keluarga yang berdiam ditempat ini. Bangunan rumah dari kayu yang berusia ratusan tahun. Papan-papan yang digunakan ada yang berukuran 20 m tanpa sambung.

11. Klenteng Dewi Kwan Im/Soei Goiat Kiong



Klenteng ini dibangun ± tahun 1839 M untuk sarana ibadah bagi warga keturunan Tionghoa. Di sini juga berkembang legenda Siti Fatimah karena dalam kelenteng ada tanah gundukan yang diyakini sebagai makam Siti Fatimah seperti yang ada di Pulau Kemaro. Ada kepercayaan di ruang peribadatan ini tidak boleh menempatkan daging babi sebagai sesaji, dan tidak boleh dimasuki anjing di dalam ruangan ada patung Kwan Im (Dewi Pengasih), Peso Sen (Dewa Pengobatan) dan Kwan Tun (Dewa Kesetiaan).

12. Rumah Kapiten



Rumah berbentuk klenteng terdiri dari tiga bangunan di kelilingi tembok tebal berbentuk "L" dengan ukuran panjang 165,9 m lebar 85,60 m. Pada masa Belanda ada seorang Cina yang bertugas sebagai penghubung antara Belanda dengan etnis Cina.

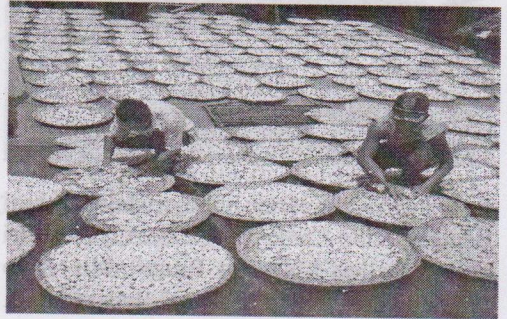
13. Rumah Rakit



Rumah rakit adalah rumah yang mengapung di atas Sungai Musi. Dibuat dengan kayu atau bambu dengan atap *kujang* (nipah), sirap atau seng. Rumah tersebut merupakan bentuk rumah

tertua di Palembang dan diperkirakan sudah ada sejak zaman Sriwijaya. Dari tulisan Cina 1368 – 1643 ditulis tentang rumah rakit yang bentuknya tidak banyak berubah. Kini rumah rakit berfungsi sebagai tempat tinggal, gudang, warung, dan usaha kecil (usaha rumah tangga).

14. Pengrajin Kerupuk Palembang



Pengrajin kerupuk Palembang banyak memanfaatkan pinggir sungai untuk menjemur krupuk agar cepat kering. Kebiasaan ini sudah berlangsung sudah puluhan tahun yang silam.

15. Jembatan Ampera



Jembatan ini adalah salah satu kebanggaan *wong* Palembang karena megah dan unik. Jembatan Ampera dibangun antara tahun 1962 – 1965 atas prakarsa Presiden RI Ir. Soekarno, dibiayai oleh pemerintah Jepang melalui biaya pampasan perang ± 40 \$ AS. Panjang jembatan 1777 m, lebar, lebar 23 m, tinggi dari dasar tanah 63 m dan tinggi dari atas air 11,50 m. Pada mulanya bagian tengah jembatan dapat

diangkat secara otomatis, terakhir berfungsi tahun 1970.

16. Museum SMB II



Pada awalnya museum ini merupakan lokasi Benteng Kuto Lamo yang dalamnya berdiri kraton Sultan Mahmud Badaruddin Joyo Wikramo atau Sultan Mahmud Badaruddin I. Tahun 1821 keraton ini mendapat serangan Belanda dan 7 Oktober 1823 oleh J.L Van Sevenhoven diperintahkan untuk dibongkar guna menghilangkan monumental Kesultanan Palembang atas balasan dari dibakarnya loji Sungai Aur tahun 1811. Bangunan ini selesai dibangun tahun 1825 dan dijadikan komisiariat pemerintahan Hindia Belanda untuk Sumatera Bagian Selatan, sekaligus kantor Residen. Bangunan ini pernah digunakan Markas Sriwijaya 1960-1974 sebelum dijadikan museum sampai sekarang.

II. PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN PENINGGALAN BUDAYA SEPANJANG SUNGAI MUSI

A. PEMANFAATAN

Sebagai warisan budaya yang tiada ternilai harganya benda-benda tinggalan sejarah ini sangatlah penting untuk dipelihara, dirawat dan dilestarikan dengan harapan agar dapat memberikan manfaat sepanjang masa dari satu generasi berikutnya. Hanya saja sampai saat ini dengan alasan klasik berupa dana, pemeliharaan dan perawatan benda-benda peninggalan sejarah ini belum banyak tersentuh, baik pihak pemerintah apalagi pihak

swasta. Dengan sendirinya pemanfaatan benda-benda tersebut belum optimal oleh semua pihak dalam arti yang positif antara lain :

- Untuk Objek Wisata
- Untuk Pendidikan dan Penelitian
- Untuk sarana Perkantoran
- Untuk tempat Hiburan
- Untuk sarana Peribadatan
- Untuk pengembangan Bisnis/ Ekonomi dan lainnya

Kesemua tujuan itu belum sepenuhnya menyentuh benda-benda peninggalan sejarah khususnya sepanjang alur Sungai Musi, kecuali beberapa tempat antara lain :

1. Objek Wisata :
Benteng Kuto Besak, Pulau Kamaro, Pelabuhan Boom Baru, Jembatan Ampera, Alur Sungai Musi antara Pulau Kemaro dengan Pulokerto dan lainnya.
2. Tempat Hiburan :
Pelataran Benteng Kuto Besak
3. Tempat Ibadah dan Ritual lainnya :
Pulau Kamaro, Masjid Ki Merogan/Lawang Kidul, Makam Ki Bagus Kuning dan lainnya.
4. Tempat Makan sambil santai :
Rumah Rakit
5. Sarana Umum atau Pemerintah :
Benteng Kuto Besak, Rumah Bari (Museum SMB II).

Untuk sementara waktu pembenahan wisata masih terfokus untuk wilayah daratan Kota Palembang, seperti perbaikan sarana transportasi, gedung-gedung perkantoran, pasar, sarana ibadah, terminal dan beberapa sarana umum lainnya. Karena bagaimanapun ini termasuk faktor penunjang kegiatan wisata air.

Dengan penancangan "Palembang sebagai Kota Wisata Sungai" oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 27 September 2005 dan ditindak lanjuti dengan peraturan Walikota Palembang No. 6 tahun 2006 tentang Penetapan Palembang sebagai Kota Wisata Sungai, kota Palembang semakin berbenah diri terutama yang berhubungan dengan wisata air.

B. PENGEMBANGAN

Program pengembangan jangka panjang sesuai dengan PW No. 6 tahun 2006 tentang Penetapan Palembang sebagai Kota Wisata Air telah diprogramkan Pengembangan Citra Pariwisata yang tergambar dalam Visi dan Misi Pariwisata Palembang. Visi pariwisata Palembang adalah "Palembang Kota Wisata yang berbudaya dan berkualitas". Sementara itu, visinya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan citra wisata, mempromosikan *brand image*
2. Mengembangkan Sungai Musi sebagai fokus utama wisata
3. Melestarikan potensi alam dan peninggalan sejarah lima zaman
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ODTW
5. Mendorong tumbuhnya pasar dan investasi wisata
6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat
7. Mengembangkan kualitas SDM
8. Memberdayakan masyarakat
9. Meningkatkan minat kunjungan wisata

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut disusunlah program pengembangan Pariwisata Palembang meliputi :

1. Pengembangan Wisata Pusat Kota :
 - a Konservasi dan revitalisasi: restorasi BKB, penggalian, penelitian tapak Kraton Kuto Besak, pengembangan museum.
 - b Pengembangan dan penataan kawasan perdagangan Jl. Sekanak dan Pasar 16 Ilir.

- c Pengembangan aktivitas/atraksi: lomba perahu bidar, Musi River, panorama, presentasi Palembang lima zaman.
2. Pengembangan Wisata Ulu :
 - a Pembangunan dan revitalisasi kawasan Kampung Kapiten: Rumah Kapiten, Bangunan Klenteng 10 Ulu, Rumah Rakit, Plaza depan Rumah Kapiten.
 - b Pembangunan dan revitalisasi kawasan Kampung Arab, Masjid 12 Ulu, Masjid Ki Merogan.
 - c Penyediaan fasilitas penunjang: deramaga penyeberangan Ilir-Ulu, *river front* 7 Ulu, 10 Ulu dan 12 Ulu.
3. Pengembangan pemukiman etnik dan Kedatuan Sriwijaya :
 - a Rehabilitasi Komplek Makam Sultan Muhammad Mansyur 32 Ilir.
 - b Pengembangan aktivitas/atraksi: Atraksi, Ritual, Rekreasi Kota, dan lain-lain.
 - c Pembangunan Museum Bahari (Maritim)
 - d Rehabilitasi TPKS Palembang
 - e Pengembangan-pengembangan lainnya yang tidak perlu disebutkan di sini bahwa tidak terkait dengan pengembangan budaya sepanjang Sungai Musi.

Dari visi dan misi yang dijelaskan di atas terlihatlah keseriusan Pemerintah untuk menjaga/melestarikan tinggalan budaya khususnya di sepanjang Sungai Musi.

PEMANFAATAN WARISAN BUDAYA SUNGAI MUSI

No	Objek Peninggalan Budaya	Segi Kepariwisataaan	Segi Ekonomi	Segi Pendidikan	Segi Budaya
1	Benteng Kuto Besak	- Objek Wisata	- Dimanfaatkan oleh rumah sakit kodam II Sriwijaya	- Objek Penelitian	- Bangunan Kuno
2	Dermaga BKB	- Objek Wisata	- Tempat Rekreasi ada retribusi		
3	Bekang II Sriwijaya	- Objek Wisata	- Dimanfaatkan Kodam II Sriwijaya	- Objek Penelitian	
4	Pasar 16 Ilir	- Objek Wisata	- Pasar Tradisional		
5	Kuto Batu	- Objek Wisata		- Objek Penelitian	- Rumah Kuno
6	Masjid Lawang Kidul	- Objek Wisata		- Objek Penelitian	- Bangunan Kuno
7	Pulau Kemaro	- Objek Wisata	- Ada retribusi	- Objek Penulisan	- Rumah ibadah Cina
8	Makam Bagus Kuning	- Objek Wisata			- Makam Keramat
9	Perkampungan Arab	- Objek Wisata		- Objek Penelitian	- Bangunan Kuno
10	Kelenteng Dewi Kwan Im	- Objek Wisata			- Sarana Ibadah
12	Rumah Kapitan	- Objek Wisata	- Ada warung, dll	- Objek Penelitian	- Bangunan Kuno
13	Rumah Rakit Pengrajin	- Objek Wisata	- Penunjang ekonomi Rakyat	- Objek Penelitian	- Bangunan Antik
14	Kerupuk/Kempelang	- Objek Wisata	- Penunjang ekonomi Rakyat		
15	Jembatan Ampera	- Objek Wisata			
16	Museum SMB	- Objek Wisata		- Objek penelitian	- Bangunan antik - Museum daerah kumpul benda-benda kuno

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Banyak bukti otentik tentang Kota Palembang sebagai kota air. Sebagai kota tua di Indonesia banyak menyimpan benda-benda budaya sebagai bukti peradaban masyarakat Palembang dari masa kemasa.

Karena Sungai Musi sebagai satu-satu sarana transpor air, tidak menutup

kemungkinan sebagian besar penduduk bermukim di atas rakit dan daerah pinggiran Sungai Musi. Oleh karena banyak ditemukan benda budaya di sepanjang Sungai Musi.

B. SARAN

Karena benda-benda peninggalan budaya sangat penting kegunaannya diharapkan untuk di pelihara terus menerus agar memberi manfaat bagi generasi penerus.

ARAH KEBIJAKAN PELESTARIAN KAWASAN KAITANNYA DENGAN PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA

Junus Satrio Atmodjo¹

Abstrak

Pembangunan ekonomi Indonesia berdampak pada pola pemanfaatan ruang, khususnya di perkotaan. Dengan kekuatan ekonomi dan alasan kepentingan ekonomi, seseorang dengan pemahaman dangkal kata "moderen" dan "menjadi moderen" mampu menggusur suatu pemukiman komuniti lama beserta nilai-nilai budayanya yang khas. Disadari bahwa perkembangan suatu kota tidak terhindarkan, tetapi perlu dicarikan solusi agar masyarakat memahami dan memberikan persetujuan berdasarkan kesepakatan, bukan pemaksaan. Pemerintah memperhatikan pelestarian warisan budaya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Tujuannya untuk mengoptimalkan apresiasi masyarakat dan menjadikannya sarana pengembangan edukasi, rekreasi, dan kebudayaan. Pelestarian warisan budaya kota Palembang memerlukan informasi yang baik tentang jenis warisan budaya atau sebaran dan kepadatan, masa yang diwakili, kelompok masyarakat yang menghuni, serta tingkat kepentingannya. Pelestarian bukan semata upaya mempertahankan keaslian fisik suatu kawasan, melainkan upaya menghidupkan kawasan itu dengan memanfaatkan unsur-unsur lama dalam konteks baru.

Kata kunci : arah kebijakan, pelestarian kawasan, warisan budaya

I. PENGANTAR

Perkembangan ekonomi Indonesia yang sangat dinamis telah membawa sejumlah dampak pada pola pemanfaatan ruang, khususnya di daerah perkotaan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Bertambahnya rumah penduduk, gedung, dan fasilitas publik seperti jalan raya, jembatan, atau perluasan pasar menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi dan peran ruang.

Perubahan itu dapat disebabkan oleh "pembangunan-pembangunan" yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan swasta, atau oleh masyarakat pada umumnya. Kota Palembang sudah tentu tidak terlepas dari proses ini, ketika ruang dan tanah menjadi semakin penting peranannya di tahun-tahun belakangan ini dan yang akan datang. Semakin banyak bangunan tua yang digusur untuk memberi tempat pada bangunan-bangunan baru yang lebih megah, mewah, atau lebih "gaya" melenyapkan

bangunan lama yang kuno, tradisional, ketinggalan jaman, atau bahkan buruk penampilannya. Banyak konsep yang diajukan untuk melakukan perubahan itu. Tetapi di dalam konteks lingkungan kota yang penuh sesak dengan penduduk, itu berarti bahwa sebuah pengorbanan perlu dilakukan untuk memperoleh ruang yang layak.

Hilangnya ruang-ruang pemukiman (*settlement*) ini segera diikuti oleh perpindahan penduduk yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya karena tidak mampu berkompetisi kekuatan-kekuatan yang lebih besar. Orang lain akan menggantikan tempat itu sebagai penghuni baru, di mana umumnya mereka tidak memiliki hubungan emosional apa pun dengan tempat itu kecuali untuk mengaktualisasi kepentingan dirinya.

Di dalam kajian-kajian ilmu budaya, khususnya arkeologi, perubahan pemanfaatan ruang secara demikian akan menyebabkan

¹ Drs. Junus Satrio Atmodjo, M.Hum adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

hilangnya nilai-nilai budaya yang terkait dengannya. Nilai-nilai ini dibangun oleh komunitas lama yang mendiami ruang tersebut, di mana hubungan interaksi antara masyarakat dengan tempat tinggalnya telah membentuk karakter yang khas.

Kepentingan ekonomi dan pemahaman yang dangkal tentang arti kata “modern” atau “menjadi modern” (*modernized*) ternyata sering menjadi alasan untuk melakukan perubahan-perubahan tata ruang yang berdampak pada kehidupan budaya masyarakat.

II. HUBUNGAN RUANG DENGAN KEBUDAYAAN

Banyak yang tidak menyadari bahwa antara kebudayaan dan lingkungan fisik yang menjadi tempat tinggalnya membentuk sebuah hubungan simbiosis yang saling mempengaruhi. Bentuk rumah, bahan-bahan yang dipakai, lapangan bola voli, atau lokasi masjid merupakan cara masyarakat membagi ruang dalam pemukiman mereka. Pembagian ini bukan sekedar dibuat berdasarkan atas hak pemilikan tanah, melainkan juga nilai-nilai budaya yang mereka anut. Misalnya lokasi-lokasi yang dianggap sakral seperti makam atau rumah ibadat, lokasi-lokasi yang dianggap kurang baik atau sebaliknya yang dianggap baik, daerah “terhormat” dan daerah “yang kurang terhormat”, demikian seterusnya. Nilai-nilai ini melekat dalam ingatan kolektif masyarakat yang diperoleh secara turun temurun melalui tradisi lisan (cerita, mitos, legenda), tertulis (naskah keluarga), atau nama-nama tempat (toponimi). Dengan kata lain, masyarakat yang dipengaruhi oleh tradisi tersebut akan memiliki peta virtual wilayah tempat tinggalnya sebagai bagian dari sistem pengetahuan mereka.

Di dalam wilayah itulah kehidupan budaya masyarakat berlangsung. Kegiatan keseharian seperti mengaji, belajar, bermain, membangun rumah, berolah raga, atau berkesenian berlangsung di tempat yang sama. Hubungan

ini mencerminkan keterkaitan yang erat antara manusia dengan lingkungan geografisnya.

Masih di lingkungan ruang yang sama, setiap anggota masyarakat itu akan hidup berdampingan dengan bangunan-bangunan kuno yang sudah menjadi petanda lingkungan (*landmark*) budaya mereka. Peninggalan-peninggalan arkeologis ini sudah menjadi bagian dari identitas komunal yang diwariskan oleh generasi sebelumnya, sehingga terbentuk hubungan emosional yang erat bersifat timbal balik antara keduanya. Cerita-cerita, legenda, mitos, sejarah oral atau rekaman berupa foto dan gambar merupakan media yang penghubung yang membentuk ikatan emosional tersebut.

Oleh karenanya perlu disadari bahwa kita tidak dapat melepaskan proses pembangunan kota tanpa memperhatikan kehidupan budaya masyarakat lokal yang mendiaminya. Memindahkan penduduk, membongkar kawasan lama, atau mengatur asesibilitas tanpa mengindahkan karakter budaya penghuninya tentunya akan menimbulkan keresahan. Perasaan tidak dihormati dan tercerabut dari ruang tempat tinggalnya sering memicu pernyataan untuk menolak.

Harus diakui pula bahwa perkembangan sebuah kota tidak mungkin dihindari tanpa mengorbankan komponen-komponen tua di dalamnya untuk diganti dengan yang baru, tetapi perlu dicari solusi agar masyarakat memahami dan memberikan persetujuan dilakukannya perubahan itu. Sebuah mekanisme “tawar menawar” perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang menguntungkan semua pihak berdasarkan atas kesepakatan, bukan sebaliknya melalui pemaksaan.

III. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGELOLA WARISAN BUDAYA

Sebelumnya perlu diketahui bahwa perwujudan kebudayaan terbagi menjadi dua, yaitu budaya non bendawi (*intangibile culture*)

dan budaya bendawi (*tangible culture*). Unsur-unsur seperti nilai, norma, keyakinan, konsep, atau cita rasa yang bersifat abstrak adalah bagian dari budaya non bendawi. Ungkapan dari unsur-unsur ini hanya bisa diamati melalui perilaku aktual dan ucapan-ucapan para penganutnya. Adapun unsur-unsur yang bersifat kebendaan berupa artefak (benda buatan manusia), fitur (bangunan-bangunan), atau pola-pola pada permukaan bumi (lansekap) seluruhnya merupakan bagian dari budaya bendawi. Jenis budaya ini sebenarnya merupakan hasil perilaku yang dipengaruhi oleh budaya non bendawi.

Konsep pelestarian warisan budaya yang dicantumkan oleh pemerintah dalam naskah **Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)** sudah mengacu kepada pengertian ini, dengan tidak memfokuskan program-program RPJM pada salah satu wujud kebudayaan tertentu saja.

Namun rumusan dari konsep itu di bab **Prioritas Pembangunan Nasional** ternyata kurang jelas karena berbunyi: "*Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, kehidupan beragama, dan ketahanan budaya*". Selanjutnya diterangkan bahwa: "*Kualitas sumberdaya manusia juga didorong agar memperkuat ketahanan budaya nasional antara lain dengan mengembangkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian yang beradab serta mendorong apresiasi aset budaya nasional. Budaya baca dan budaya menulis didorong guna membangun masyarakat pembaca, masyarakat belajar, dan masyarakat yang kritis sebagai basis pengembangan budaya keilmuan dan masyarakat yang cerdas, inovatif, dan produktif*".

Terasa sekali bahwa perhatian terhadap faktor pendidikan dan iptek sangat dominan di sini, bila dibandingkan dengan maksud dilakukannya penguatan kebudayaan yang menjadi tujuan sesungguhnya. Masalah pelestarian warisan budaya dan kemajemukan budaya misalnya, tidak disinggung sama sekali dalam rumusan tersebut.

Penjelasan yang lebih baik dapat kita temukan pada uraian **Bidang Pembangunan Sosial Budaya**. Disebutkan bahwa kebangkitan ekonomi Indonesia di masa lalu ternyata kurang diimbangi oleh program-program penguatan karakter bangsa sehingga melemahkan ketahanan budaya nasional. Ini terlihat dari semakin menurunnya penghargaan masyarakat terhadap budaya sendiri sebagai akibat masuknya unsur-unsur budaya baru yang gagal diselaraskan dengan unsur-unsur lama. Kekaguman terhadap budaya asing, khususnya bangsa-bangsa yang dianggap maju, sering ditiru begitu saja tanpa memperhatikan melalui proses penyalarsan.

Sesuai tujuan dilakukannya pembangunan bidang sosial budaya, BAPPENAS menetapkan empat program pokok di sektor kebudayaan, yaitu:

1. Program pengembangan nilai-nilai sosial-budaya bangsa
2. Program pengelolaan keragaman budaya
3. Program pengembangan seni dan budaya iptek
4. Program pengelolaan aset budaya.

Adalah program keempat yang berhubungan langsung dengan pelestarian warisan budaya. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan apresiasi masyarakat dan menjadikannya sarana pengembangan edukasi, rekreasi, dan kebudayaan.

Dasar pemikiran program keempat ini menetapkan bentuk-bentuk kebudayaan yang ada di Indonesia sebagai aset, sebagai modal bagi upaya pembanunan di masa mendatang. Warisan budaya, apa pun juga bentuknya, diartikan sebagai bagian dari aset tersebut.

Berdasarkan pemikiran ini, sifat kemajemukan budaya Indonesia sebenarnya sudah terakomodasi, bahkan ditempatkan sebagai pondasi yang kokoh bagi proses adaptasi terhadap budaya-budaya asing yang masuk melalui berbagai media. Kesadaran tentang kemajemukan ini hanya mungkin terbentuk apabila masyarakat menyadari perbedaan-perbedaan itu sebagai hal yang alami dan diterima sebagai sebuah kenyataan.

Di lain pihak, potensi budaya butuh untuk disiapkan agar mampu menjadi sarana edukasi bagi generasi muda, sebagai sarana rekreasi (termasuk wisata), dan terbentuknya unsur-unsur baru yang memperkaya kebudayaan itu sendiri maupun peradaban bangsa secara keseluruhan.

Tekad pemerintah untuk mendorong terwujudnya masyarakat madani serta menguatnya peran sistem pemerintahan daerah karenanya perlu dilihat kaitannya dengan tujuan dibalik program-program tersebut.

IV. KERAGAMAN WARISAN BUDAYA

Sebagai sebuah kota berusia tua, Palembang memiliki peninggalan-peninggalan yang jumlahnya cukup banyak. Setiap peninggalan menempati situs berlainan, beberapa situs bahkan berasal dari masa yang berbeda-beda pula. Sehingga, layaklah bila kita bertanya: "Bagian mana dari kota yang mau dilestarikan"? Dan, "Konsep pelestarian seperti apa yang akan kita terapkan untuk kota ini"?

Dua pertanyaan ini memang tidak mudah dijawab. Dibutuhkan informasi yang baik tentang jenis warisan, atau persebaran, dan densitas, masa yang diwakili, kelompok masyarakat yang bertempat tinggal, serta tingkat kepentingannya. Dari sisi arkeologi mudah saja, selama peninggalan masa lalunya masih ada maka lokasi itu akan disebut sebagai situs. Semua situs dan peninggalan-peninggalan yang ada di lokasi itu seluruhnya terlindungi oleh hukum. Permasalahannya menjadi lain bila lokasi itu dihubungkan dengan sejarah dan identitas budaya penduduk kota dengan meniadakan hubungan-hubungan emosional yang sudah terbentuk selama puluhan tahun.

Tidak terbayangkan oleh kita bila Pasar 16 Ilir yang ramai tiba-tiba dihancurkan untuk membangun kompleks perumahan mewah. Pasti banyak orang yang tidak setuju, karena pasar ini sudah menjadi milik publik (*public domain*), bukan lagi milik perorangan atau pemerintah. Apa yang ada di sana sebenarnya hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,

sehingga masyarakat merasa berhak untuk mempertahankannya. Hal yang sama juga terjadi bila Jembatan Ampera atau Benteng Kutubesak diperlakukan secara demikian.

Perlu disadari bahwa hampir semua wilayah di dalam kota tidak pernah bersifat monokultur. Banyak unsur dari berbagai lingkungan budaya berlainan hidup berdampingan di ruang yang sama dengan ciri khasnya masing-masing.

Signifikansi budaya dari kawasan-kawasan dan tinggalan-tinggalan ini menyebabkan kita tidak dapat menanganinya secara asal-asalan. Sebuah konsep pelestarian wilayah memperhatikan identitas budaya kota yang diwakili oleh satuan-satuan ruang dan unsur-unsur binaan yang ada di dalam ruang tersebut. Terutama hubungannya dengan sejarah.

Di lain pihak, pemanfaatan yang sembarangan oleh masyarakat perlu pula dibenahi agar tidak mengubah pola-pola yang pernah ada serta menimbulkan dampak negatif pada masyarakat yang tinggal di dalam satuan ruang tersebut. Berubahnya fungsi pemakaman kuno di belakang Pasar Cinde misalnya, secara nyata telah menyebabkan musnahnya sejumlah makam kuno milik keluarga penghuni kota Palembang lama. Hal serupa juga terjadi di Jakarta dengan semakin menciutnya areal pemakaman kuno di berbagai pelosok kota sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan lahan perumahan.

Jadi permasalahannya adalah bukan bagaimana kita mempertahankan keaslian fisik sebuah kawasan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana membuat kawasan itu tetap hidup dengan memanfaatkan unsur-unsur lama dalam konteks baru.

Paduan antara unsur-unsur lama dan baru ini dalam sebuah kesatuan akan menempatkan konsep modernisasi yang telah kita singgung sebelumnya dalam konteks fungsi dan bukan dalam konteks bentuk. Disinilah sebenarnya letak pemahaman kita tentang "pengelolaan", yaitu upaya-upaya untuk menata sejumlah kepentingan agar tidak saling berbenturan.

Artinya, perubahan total wilayah-wilayah kota sebenarnya tidak perlu dilakukan apabila

peran-peran baru dapat diimplementasikan pada ruang yang sama. Selain identitas budaya dari ruang yang direvitalisasi itu tidak terganggu, masyarakat akan menerimanya sebagai sebuah peluang baru untuk mengembangkan perekonomian mereka. Selain itu, masyarakat yang wilayahnya dikelola tetap dapat melakukan kegiatan hariannya tanpa khawatir kehilangan lahan dan identitas budaya mereka.

Masalahnya mungkin bisa menjadi lain apabila seluruh unsur-unsur lama itu dihilangkan dan diganti dengan yang baru. Penduduk lama mungkin akan melihatnya sesuai sesuatu yang asing, yang tidak ada kaitannya dengan mereka sehingga menolak gagasan-gagasan dilakukannya perubahan.

V. ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan uraian-uraian di dalam RPJM, setidaknya terdapat 4 prinsip dasar dari pembentukan kebijakan² pelestarian yang digunakan untuk mengelola warisan budaya:

- a. *Pembangunan yang berkesinambungan*: pengelolaan warisan budaya harus menjamin kelangsungan hidup masyarakat.
- b. *Peran aktif masyarakat di dalam proses pembangunan*: pengelolaan warisan budaya harus melibatkan masyarakat.
- c. *Peningkatan ketahanan budaya*: pengelolaan warisan budaya harus membuka peluang bagi penguatan budaya lokal.
- d. *Terciptanya peluang-peluang ekonomi di semua sektor bagi kepentingan masyarakat*: pengelolaan warisan budaya harus mampu menciptakan dimensi baru bagi pengembangan ekonomi masyarakat.

Agar kebijakan itu dapat menyentuh keempat prinsip dasar tersebut, maka diperlukan kejelasan tentang:

- a. Tujuan dilakukannya pelestarian (multi dimensi)
- b. Dasar-dasar hukum yang digunakan dan

- c. relevansinya dengan tujuan dibuatnya kebijakan
- c. Luas dan batas-batas wilayah yang akan dikelola
- d. Aspek-aspek yang dipertahankan atau diubah untuk mencapai tujuan itu
- e. Skala waktu
- f. Siapa saja yang dilibatkan dalam pengelolaan
- g. Cakupan dari perubahan yang hendak dicapai dan manfaatnya
- h. Sistem pengelolaan dan tanggung jawab masing-masing sektor.

Berdasarkan uraian ini kiranya perlu digaris bawahi bahwa apapun kebijakan pengelolaan warisan budaya yang akan rumuskan, sebaiknya semenjak awal sudah melibatkan para pemangku kepentingan (*stake holder*). Masyarakat pengguna ruang dan kelompok-kelompok lain yang memiliki akses pada ruang itu harus dilibatkan guna mencapai sebuah keputusan yang berimbang. Peran pemerintah sebagai fasilitator sangat dibutuhkan untuk memberikan jalan keluar bila terjadi kebuntuan-kebuntuan.

Di tingkat pelaksanaan nantinya setelah kebijakan itu dapat dirumuskan dan diperkuat menjadi sebuah peraturan, kembali masyarakat harus diberi kewenangan untuk melakukan pengaturan-pengaturan terhadap warisan budaya mereka sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut.

VI. PENUTUP

Sebagai sebuah kota yang berumur ratusan tahun, Palembang memiliki ciri budaya yang spesifik dibandingkan dengan kota-kota lain di Sumatera atau Indonesia. Dinamika pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan peran kota telah memberi karakter pada penduduk dan wilayah kota yang sangat luas. Setiap petak tanah di wilayah kota memiliki sejarahnya sendiri, mulai dari zaman Sriwijaya hingga sekarang. Tetapi sejarah pula yang akan

² Kebijakan adalah sebuah upaya untuk melakukan pengaturan guna mencapai sebuah tujuan umum.

membawa kota ini ke masa depannya. Sebuah masa depan yang membutuhkan rancangan dan persiapan matang.

Sebuah kota dapat dikatakan dewasa bila mampu melakukan pengaturan terhadap dirinya sendiri. Mengganti pemukiman yang kumuh menjadi layak huni, jalan yang sempit menjadi lebar, atau tersedianya pasokan air bersih bagi semua penduduk adalah indikasi dari sebuah kematangan.

Rasa banga penduduk atas kotanya akan menjadi indikator apakah kota ini menjadi bagian dari jatidiri mereka ataukah tidak. Kebanggaan ini menjadi alasan untuk tetap tinggal di dalam kota dan melakukan aktivitas sehari-hari. Ikatan bathin di antara sesama warga kota juga berlangsung dengan lingkungan tempat tinggal. Nilai-nilai yang dianut bersama oleh warga merupakan pengikat yang sangat penting bagi kelangsungan hidup kota. Tanpa ikatan ini mustahil kota dapat mencapai kedewasaannya.

Adalah sangat penting untuk menyadari bawa budaya mengambil peran penting di

dalam proses pendewasaan tersebut karena di dalam kebudayaan selain tersimpan nilai-nilai juga tersimpan pengetahuan, identitas, dan yang lebih penting keinginan untuk hidup bersama. Untuk itu dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang jelas agar kota mampu berkembang sesuai harapan.

Pekerjaan besar ini tidak mungkin dilakukan hanya oleh pemerintah tetapi perlu melibatkan seluruh komponen penghuni kota. Pemerintah tidak memiliki kemampuan yang sedemikian besar untuk menata kehidupan seluruh warga kota. Oleh karena itu sangat penting disadari bawa pengelolaan warisan budaya di dalam kota, di mana pun letaknya, perlu memperoleh dukungan para pemangku kepentingan. Pola-pola kebijakan dan peraturan-peraturan yang kemudian dikeluarkan untuk melakukan penataan itu sebaiknya sudah merupakan **disepakati** oleh para pemangku kepentingan tersebut. Tanpa kesepakatan ini, pendewasaan kota di berbagai sektor akan terhambat, bahkan tidak tertutup kemungkinan justru berjalan mundur.

ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA DI WILAYAH SUMATERA SELATAN

Noviarman Kailani¹

Abstrak

Sumatera Selatan memiliki potensi warisan seni dan budaya serta lingkungan alam yang dapat dikembangkan untuk kepariwisataan. Namun, dalam pengelolaannya menghadapi permasalahan-permasalahan yang harus diatasi. Menanggapi isu-isu strategis dan permasalahan-permasalahan itu Provinsi Sumatera Selatan menyusun arah kebijakan pengelolaan warisan budaya. Arah kebijakan pengelolaan warisan budaya Sumatera Selatan berdasarkan pada pendekatan aspek-aspek perlindungan, tataruang, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan sosial-budaya, dan partisipasi masyarakat. Arah kebijakan pengelolaan warisan budaya diarahkan pada aspek pelestarian dan pemanfaatan.

Kata kunci : arah kebijakan, pengelolaan, warisan budaya, Sumatera Selatan

I. KONDISI DAN POTENSI WARISAN BUDAYA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Bidang pariwisata, seni dan budaya merupakan bidang pembangunan yang memiliki potensi yang begitu besar untuk dikembangkan. Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi pariwisata, seni dan budaya yang sebenarnya memiliki jual yang tinggi. Potensi tersebut tersebar di 14 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan

Kota Palembang

Potensi sumber daya wisata yang cukup besar terutama adanya sungai Musi, peninggalan ataupun situs peninggalan kerajaan Sriwijaya (Bukit Siguntang, Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya) peninggalan kasultanan Palembang Darussalam (bangunan kuno, pemakaman raja, pemukiman lama, adat istiadat), peninggalan zaman kolonial Belanda (bangunan pemerintahan, perumahan) kerajinan rakyat (songket, ukiran). Kawasan Benteng Kuto Besak dan sekitarnya, menyimpan banyak bangunan bersejarah peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam maupun zaman kolonial, diantaranya :

- Benteng Kuto Besak, bangunan bekas keraton Palembang Darussalam didirikan tahun 1780 dan ditempati secara resmi pada tahun 1779. Benteng ini berukuran panjang 288,75 m, lebar 183,75 m, tinggi 9,99 m dan tebal dinding 1,99 m.
- Masjid Agung Palembang, dibangun oleh Sultan Machmud Badarrudin 1 (Sultan Joyo Wikromo) pada 1738 dan selesai pada tahun 1748.
- Museum SMB II (bangunan eks-rumah Residen zaman kolonial) dan Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera).
- Kantor Wali Kota dengan bentuknya yang khas (eks-bangunan kantor *Waterleidend* pada zaman kolonial)

Selain itu, kota Palembang memiliki kompleks makam Sultan Palembang, letaknya menyebar di beberapa tempat, antara lain di 1 Ilir dan sekitarnya terdapat kompleks Sultan Makhmud Badarrudin 1 (Kawah Tengkuemp), makam Pangeran Sabokingking, makam Ki Gede Ing Suro Tuo, makam Ki Gede Ing Suro Mudo, serta makam Sultan Agung. Di lokasi lain terdapat kompleks makam Sultan Muhammad Mansyur di 32 Ilir dan Makam Cindewelang di Ilir Barat

Peninggalan Kedaduan Sriwijaya, di antaranya :

¹ Ir. H. Noviarman Kailani adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS) dibangun pada tahun 1993 di situs Karanganyar dan pulau Cempaka yang dikelilingi kanal air kuno yang dihubungkan dengan Sungai Musi.
- Bukit Siguntang dengan tinggi 27 meter dpl (tanah tertinggi di kota Palembang). Di lokasi ini terdapat beberapa makam kuno, antara lain makam raja Sigentar Alam, Putri Kembang Dadar, Putri Rambut Selako, Panglima Bagus Kuning, Pangeran Raja Batu Api. Di bukit ini pada tahun 1920 ditemukan arca bergaya seni Amarawati dengan raut wajah Srilangka abad IX Masehi.
- Sungai Kedukan Bukit, sungai buatan untuk fungsi pertahanan kedatuan Sriwijaya, merupakan tempat ditemukan prasasti kedukan Bukit. Sedangkan untuk pemukiman masyarakat tepi Sungai Musi, terdiri dari
- Permukiman tradisional masyarakat "Palembang Lamo" di sepanjang Sungai Musi, dengan bentuk arsitektur *rumah limas* atau *rumah panggung*.
- Permukiman masyarakat etnis Cina berupa rumah panggung dan rumah rakit di perairan Sungai Musi, dengan pusat di sekitar Rumah Kapiten (7 Ulu) dan Kelenteng 10 Ulu.
- Pemukiman masyarakat keturunan Arab di tepi sungai Musi, berpusat di sekitar Masjid 12 Ulu dan Masjid Lawang Kidul (Pasar Kuto).

Kabupaten Ogan Ilir

Potensi obyek dan daya tarik di wilayah ini di antaranya :

- Potensi wisata budaya terutama berkaitan dengan adat istiadat, pola pemukiman, kegiatan kerajinan/industri rumah tangga. Desa-desa pusat kerajinan terutama di Kecamatan Tanjung Batu, yaitu :
 - Kerajinan tenun songket, pandai besi di Tanjung Pinang Limbang Jaya
 - Pembuatan perahu di Desa Sungai Lebung.

- Kerajinan logam (aluminium, kuningan) Di Tanjung Atap
- Pembuatan rumah kayu di Desa Tanjung Batu seberang.

Kabupaten Banyuasin

Pola kehidupan masyarakat nelayan di perairan muara sungai (S. Musi, S. Lalan, S. Banyuasin) berpotensi sebagai sumberdaya wisata. Masyarakat nelayan di wilayah ini mempunyai pola bermukim yang khas dan unik dimana perkampungan penduduk didirikan di atas permukaan air dan ditopang oleh ribuan tiang dari kayu Nibung.

Kabupaten Musi Banyuasin

Daya tarik wisata wilayah ini berupa danau/lebak yang sudah dikembangkan menjadi tempat rekreasi masyarakat diantaranya : Danau Ulak Lia.

Kabupaten Muara Enim

Kawasan situs percandian agama Hindu peninggalan abad ke XII Masehi, terdapat di Desa Bumiayu, Kecamatan Tanah Abang.

Kota Prabumulih

Secara umum di kota Prabumulih belum banyak digali potensi daya tarik wisata. Makam Gunung Ibul dan Danau Bunud merupakan sumberdaya wisata yang ada di kota ini.

Kabupaten Ogan Komering Ilir

Potensi obyek dan daya tarik wisata budaya terutama berkaitan dengan adat istiadat (upacara adat, kesenian) pola pemukiman penduduk beserta kegiatan kerajinan dan industri rumah tangga.

Kabupaten Musi Rawas

Potensi obyek wisata alam terkait dengan kondisi fisik alam di wilayah Kabupaten Musi Rawas, terutama berupa perairan danau, goa stalakit-stalakmit serta hutan suaka alam.

- Danau Raya, merupakan wilayah genangan air rawa lebak yang luas dengan kondisi lingkungan di sekitarnya yang masih alami.

Air danau tidak pernah kering sepanjang tahun.

- Goa Napal Licin, merupakan goa alam dengan panaroma dalam goa yang kaya akan beragam bentuk stalaktit dan stalakmiit. Perjalanan menuju goa merupakan atraksi petualang tersendiri karena pengunjung harus melalui jalur sungai berbatu- batu licin dengan arus air yang sangat deras.
- Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) merupakan kawasan hutan lindung yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi *ecotourism*. Sebagian besar kawasan hutan masih alami dan liar serta merupakan habitat beberapa jenis satwa/hewan langka, seperti gajah (*elephas maximus*), berbagai macam kera dan harimau (*panthera tigris*).

Kota Lubuk Linggau

Sumberdaya objek wisata yang lain terkait dengan budaya masyarakat kota Lubuk Linggau, di antaranya yang menarik yaitu Benteng Kuto Ulak Lebar, ialah benteng dari gundukan tanah peninggalan pemukiman masyarakat kuno yang pernah menetap di tepian Sungai Kelingi (terkait dengan legenda Bujang Kurap). Di lokasi juga dijumpai beberapa makam kuno, satu di antaranya dinyakini masyarakat sebagai makam Bujang Kurap.

Kabupaten Lahat

Di samping potensi obyek wisata alam, di wilayah Kabupaten Lahat terdapat potensi obyek wisata yang lain terkait dengan perjalanan sejarah dan budaya masyarakat pada zaman dahulu., di antaranya batuan megalith, perkampungan masyarakat tradisional. Arca batu megalith warisan budaya prasejarah berupa sekitar 187 buah arca batu peninggalan masyarakat Megalit (3000 tahun silam). Umumnya berbentuk patung manusia, binatang, batu lumpang dan menhir. Potensi wisata budaya ini tersebar di beberapa wilayah

kecamatan yang terutama adalah kompleks megalit Tinggi Hari, Desa Pulau Pinang (20 km dari Lahat). Perkampungan Masyarakat adat, merupakan pemukiman masyarakat tradisional *besemah* dengan pola pemukiman dan bentuk asitektur bangunan yang sangat khas.

Kota Pagar Alam

Megalit dari wilayah ini merupakan warisan budaya prasejarah yang tak ternilai (dari 3000 tahun silam). Megalit berupa arca batu berbentuk manusia dan binatang, rumah batu, batu lesung, serta makam batu. Potensi obyek wisata budaya ini tersebar di beberapa wilayah kecamatan di kota Pagar Alam. Perkampungan masyarakat adat merupakan permukiman masyarakat tradisional Besemah dengan pola dan bentuk arsitektur bangunan yang khas, terutama yang masih terpelihara adalah di Desa Pelan Kenidai.

Ogan Komereng Ulu

Beberapa sumberdaya warisan budaya antara lain benda-benda peninggalan prasejarah, adat istiadat dan budaya, antara lain:

- Batu lesung bintang, batu berukir, dan batu tapak kaki merupakan peninggalan prasejarah (megalit).
- Adat budaya daerah (upacara adat, pakaian, seni tari, seni tembang) serta pemukiman tradisional masyarakat (Rumah Ulu).

Kabupaten OKU Timur

Potensi wilayah pertanian di Kabupaten OKU Timur sangat mendukung keanekaragaman obyek dan daya tarik wisata terutama sumberdaya wisata Bendungan Perjaya, sebagai prasarana irigasi yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang.

Kabupaten OKU Selatan

Beberapa sumberdaya wisata budaya antara lain adat istiadat (upacara adat, pakaian, kesenian) pada pemukiman penduduk beserta kegiatan kerajinan.

II. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Masih besarnya peranan pemerintah dalam pengelolaan warisan budaya, peranan pemerintah masih tetap dominan dan cenderung menjadi bagian birokrasi pemerintah. Sementara itu, peran partisipasi masyarakat luas belum dapat diwadahi secara luas. Selama ini pelestarian warisan budaya masih banyak dilakukan oleh pemerintah provinsi. Peranan masyarakat dan swasta dirasakan masih belum optimal.

Adanya berbagai kepentingan untuk memanfaatkan warisan budaya. Ada banyak kepentingan dalam pengelolaan warisan budaya seperti menilai pentingnya suatu warisan budaya dari segi ilmu pengetahuan (untuk pengkajian dan pengujian akademik), etnik (jatidiri dan latar kehidupan suatu bangsa tertentu), estetika (bukti hasil seni yang indah), maupun publik (kepentingan masyarakat secara umum) termasuk untuk pendidikan masyarakat, daya tarik wisata, serta keuntungan ekonomis lainnya. Perbedaan kepentingan ini dapat menjadi sumber pertentangan atau konflik. Adanya konflik kepentingan dan pluralisme yang berkembang dalam masyarakat juga menimbulkan wacana baru dalam visi pelestarian. Kebijakan pelestarian terkesan selalu diarahkan pada upaya untuk tidak mengubah atau mengembalikan keadaannya semula warisan budaya. Kebijakan ini seperti itu dirasakan terlalu kaku, dan kurang dapat mewadahi upaya pemanfaatannya. Seolah-olah pelestarian adalah untuk pelestarian itu sendiri.

Proses globalisasi, perubahan cara pandang yang menyatakan bahwa warisan budaya dimana pun berada adalah warisan budaya umat manusia, sehingga adanya tuntutan dimana setiap orang atau pihak boleh memaknai warisan budaya menurut apa yang digagasnya.

III. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA DI WILAYAH SUMATERA SELATAN

Ada beberapa arahan kebijakan dalam pengelolaan warisan budaya Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:

1. Arah Kebijakan pengelolaan warisan budaya berdasarkan pada pendekatan 6 aspek, yaitu :
 - a. Memperhatikan *aspek ekonomis*, artinya, kebijakan pengembangan dan penataan kawasan/bangunan warisan budaya, sedapat mungkin diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat luas, seperti penyediaan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai.
 - b. Memperhatikan *aspek sosial- budaya*. Revitalisasi dan penataan kawasan/bangunan warisan budaya harus pula didukung oleh berbagai kegiatan sosial budaya, seperti atraksi tradisional ataupun kontemporer. Dari kegiatan ini diharapkan pula tumbuh kecintaan masyarakat pada peninggalan bangunan bersejarah, di samping menumbuhkan kreativitas kesenian dan interaksi sosial lainnya.
 - c. Memperhatikan *aspek ilmu pengetahuan*. Perlindungan terhadap kawasan/bangunan warisan budaya pada dasarnya adalah untuk memberikan kepada generasi muda untuk memahami sejarah bangsanya. Pengembangan iptek dalam kaitannya dengan hal tersebut diharapkan memberi kesempatan kepada pelajar, mahasiswa, ilmuwan, dan seterusnya, untuk meneliti berbagai hal yang berkaitan dengan keberadaan kawasan/bangunan tersebut. Arah kebijakan ini dilakukan dengan membangun Graha Budaya dan Graha Teknologi di Kawasan Jaka Baring Palembang.
 - d. Memperhatikan *aspek partisipasi masyarakat*. Sebagai layaknya yang terjadi pada proses-proses

pembangunan pada umumnya, penataan dan pengembangan kawasan/bangunan warisan budaya juga harus melibatkan partisipasi masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pemeliharanya. Masyarakat luas dapat berpartisipasi dengan cara yang paling sederhana seperti memberi informasi penting dan tidak mengganggu kawasan/bangunan tersebut, sampai ikut memikirkan pengembangannya.

e. Memperhatikan *aspek perlindungan*.

Agar kawasan/bangunan warisan budaya dapat terlindungi dari kerusakan dan perusakan, maka perlu diberikan insentif bagi yang menangkap basah perusak dan memberi sanksi bagi yang merusak.

f. Memperhatikan *aspek tata ruang*.

Penataan dan pengembangan kawasan/bangunan warisan budaya harus terintegrasi dengan tata ruang kota, agar terjadi interaksi yang dinamis, antara budaya satu dengan yang lainnya.

2. Arah kebijakan pengelolaan warisan budaya diarahkan pada pelestarian dan bukan menuju pada *protectionist*, melainkan lebih pada konsep simultan antara preservasi dan keterpaduan pembangunan. Hal ini berarti bahwa pengembangan pelestarian harus dibarengi dengan konsep pemasaran yang komprehensif untuk pengembangan wisata. Arah kebijakan ini diterapkan pada kegiatan Pengembangan Bukit Siguntang Palembang dan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS).
3. Pelestarian warisan budaya dilakukan dengan mengembangkan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota serta *sharing* dalam pembiayaannya. Arah kebijakan ini dilakukan pada kegiatan Candi Bumiayu di Kabupaten Muara Enim dan Kegiatan Penataan Kawasan Sungai Musi di Kota Palembang.

4. Pelestarian warisan budaya berdasarkan pada masalah konseptual dan fungsional, selain meletakkannya pada latar belakang historis masa lalu, juga pada tuntutan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Arah kebijakan ini dilakukan pada Plaza Benteng Kuto Besak Palembang.

5. Pelestarian warisan budaya dijabarkan dalam konsep preservasi-revitalisasi, yang merupakan upaya memelihara dan melestarikan lingkungan atau aktivitasnya ke arah terpeliharanya kualitas dan kesinambungan nilai sejarah sosial dan budaya, dengan cara: memberikan vitalitas baru, yaitu dengan *adaptive reuse*, renovasi bangunan dan ruang; meningkatkan vitalitas yang ada; menghidupkan kembali vitalitas lama yang telah pudar. Arah kebijakan ini dilakukan pada kegiatan Gedung Residen (Eks-Gedung BP7 Palembang) yang akan dikembangkan menjadi Museum Tekstil.

IV. HARAPAN BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM LOKAKARYA PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA DI KOTA PALEMBANG

1. Harus ada kesadaran bersama bahwa wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi warisan budaya yang besar, sehingga perlu dirintis usaha-usaha pelestarian lingkungan binaan bersejarah dalam konteks kebudayaan secara menyeluruh.
2. Mengalang kekuatan-kekuatan pelestarian di Sumatera Selatan sebagai langkah awal menuju tercapainya kesinambungan nilai-nilai budaya masa kini dan esok. Perlu ditekankan pengelolaan warisan budaya dilakukan secara terencana, terarah dan terpadu, misalnya kaum intelektual yang mempunyai reputasi, pribadi atau lembaga swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang ini berkampanye tiada henti untuk

- mendorong pelestarian warisan budaya di Sumatera Selatan.
3. Perlu dibentuk organisasi non-pemerintah yang mengkonsolidasikan organisasi pelestarian baik skala provinsi maupun kabupaten dan kota yang didukung oleh jaringan informasi dan kerjasama terpadu. Di forum ini diharapkan melalui media massa cetak dan elektronik memainkan peran aktif menyajikan berita atau fitur ihwal masalah warisan budaya dan gedung bersejarah.
 4. Organisasi non-pemerintah ini nantinya perlu melakukan tindakan yang nyata dalam bentuk pertemuan-pertemuan, penyebarluasan pemahaman tentang maksud, tujuan dan arti penting dari upaya konservasi yang dinamis, sebagai suatu perkembangan ilmu baru yang beranjak lepas dari preservasi yang statis.
 5. Untuk menjamin keberhasilan usaha pelestarian budaya yang merupakan kepentingan seluruh masyarakat, dinilai perlu untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.
 6. Pemerintah Kabupaten dan Kota perlu mengembangkan sebuah manajemen konservasi dan revitalisasi yang mampu mengaplikasikan dan memadukan rencana-rencana yang sudah ada, dengan melakukan *review* dan *updating* kinerja kawasan; perumusan visi misi terutama yang sesuai dengan aspirasi komunitas, investor dan kondisi obyektif sekarang dan kecenderungan mendatang. Selanjutnya menyusun suatu rencana pengelolaan konservasi dan revitalisasi yang bersifat *area management*, yang memuat skenario paket-paket pembangunan (*development packages*) untuk swasta; rencana investasi dari komunitas (*community investment plan*); komitmen investasi fasilitas dan infrastruktur publik.
 7. Dalam praktek pengelolannya diperlukan koordinasi manajemen publik yang efektif melalui pelayanan satu pintu. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah pengembangan institusi publik dan perangkat Peraturan Daerah yang bersifat memberdayakan, dan dikelola oleh manajer dan tim publik yang bersih dan profesional.
 8. Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inventarisasi terhadap bangunan bersejarah dan menetapkan Peraturan Daerah terhadap bangunan-bangunan bersejarah tersebut.
 9. Mendorong kabupaten/kota untuk menerbitkan buku tentang sejarah dan latar belakang sebuah gedung semacam buku *guide* tentang warisan budaya. Selanjutnya ke depan gedung itu diperkenalkan kepada publik dan masyarakat termasuk kepada para pelajar, sehingga mereka lebih tahu sejarah dan latar belakang warisan budaya seperti gedung-gedung tua, museum, candi dan sebagainya. Lalu ada semacam estafet pengetahuan suatu gedung secara turun menurun

V. PENUTUP

Pentingnya pengelolaan dan pelestarian warisan budaya kini sudah semakin tinggi. Bahkan, warisan budaya ini merupakan pusaka bagi Sumatera Selatan. Artinya, sumber daya warisan budaya ini mempunyai kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu dan melindungi Provinsi Sumatera Selatan dalam menapaki jalan ke masa depan. Sebagai pusaka, warisan budaya harus tetap dijaga agar kekuatannya tidak hilang dan dapat diwariskan kepada generasi penerus tanpa berkurang nilainya, karena warisan budaya adalah sumberdaya budaya yang tak-terbaharui (*non-renewable*), terbatas (*finite*), dan khas (*contextual*). **Hanya bangsa yang mencintai sejarahnya yang bisa menjadi bangsa yang besar.**

REVITALISASI DALAM RANGKA KONSERVASI WARISAN BUDAYA KOTA PALEMBANG

R.A. Rahman Zeth¹

Abstrak

Warisan budaya akan menjadi objek yang menarik, sehingga dikunjungi banyak orang dengan cara revitalisasi, yaitu mengubah tempat agar dapat digunakan untuk fungsi yang lebih sesuai. Dalam rangka revitalisasi diperlukan konservasi yang memperhatikan keaslian ekspresi, gaya bangunan, keunikan seni kriya, lingkungan sekitar bangunan, kekhasan bangunan yang digunakan, keluwesan ruang dan kesinambungan pemanfaatannya dari waktu ke waktu. Dengan pengelolaan secara intensif, warisan budaya yang tidak menonjol dapat menjadi industri kepariwisataan yang mampu menyedot jutaan wisatawan. Untuk itu diusulkan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Revitalisasi warisan budaya kota Palembang dilaksanakan dalam rangka pengembangan Kota Palembang sebagai Kota Wisata Sungai.

Kata kunci: revitalisasi, konservasi, wisata

1. PENDAHULUAN

Perkembangan peradaban dan teknologi dewasa ini dengan sendirinya diiringi berbagai kemajuan seperti tingkat konsumsi, perkembangan budaya dan tingkat kehidupan. Tingkat kebutuhan yang semakin tinggi diikuti dengan penyediaan kebutuhan dalam waktu yang relatif singkat.

Sejak berabad-abad yang lalu manusia terus mengekspresikan keinginannya dalam bentuk karya cipta seperti prasasti, tempat ibadah, maupun tempat tinggal. Karya cipta tersebut dari generasi ke generasi terus berkembang dan mengalami perubahan yang antara lain disebabkan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia.

Perbedaan sentuhan karya tersebut menyebabkan perbedaan hasil dan sekaligus membedakan nilai seninya. Perbedaan itulah membuat hasil karya tersebut mempunyai nilai seni yang tinggi. Namun dengan bertambahnya jumlah penduduk yang cepat akan membawa dampak tersendiri bagi lingkungannya termasuk hasil karya manusia yang seharusnya merupakan bukti peninggalan sejarah dan sekaligus karya seni yang merupakan daya tarik

bagi orang lain untuk mengunjungi daerah tersebut.

Sejumlah prasasti telah ditemukan di daerah Palembang yaitu Prasasti Kedukan Bukit antara lain menyebutkan bahwa pada tahun 605 saka atau tanggal 16 Juni 682 M, Dapunta Hyang membuat "wanua" (perkampungan) Sriwijaya. Dari penemuan di atas membuktikan bahwa kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan yang sangat maju dan kemajuan itu tentunya didukung dengan pembangunan berbagai fasilitas untuk rakyat.

Pada waktu Pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo dibangun beberapa bangunan yang monumental di Palembang yang juga terletak di tepi Sungai Musi. Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (S.M. Badaruddin I) memerintah tahun 1724 — 1758, seorang tokoh pembangunan yang modern, realis dan pragmatis. Beliau adalah tokoh utama dalam pembangunan Palembang Darussalam.

Tiga buah bangunan monumental ditegakkannya, dengan visi arsitektur dan kegunaan yang berlainan satu sama lain, yaitu :

1. Makam berbentuk Kubah dibangun tahun 1728 M dengan beberapa gapura dan pagar pintu melengkung dengan tiang bergaya Eropa.

¹ Ir. H.R.A. Rahman Zeth, M.Si adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan.

2. Benteng Kuto Besak berbentuk gaya Eropa dengan empat sudut serta tembok lapisan dalam yang melindungi keraton di dalam benteng dan dibangun tahun 1737 M.
3. Masjid Agung Palembang yang dibangun tahun 1738.

Semua peninggalan di atas merupakan karya cipta masyarakat dari generasi ke generasi dan mempunyai nilai seni tersendiri dengan ciri yang berbeda pula. Dari karya ini juga menunjukkan bagaimana tingkat peradaban manusia pada generasi tersebut. Hal ini tentunya menarik untuk dilihat, bahkan salah satu sebab mengapa suatu tempat dikunjungi oleh banyak orang karena di tempat tersebut terdapat tinggalan sejarah yang bernilai seni tinggi.

II. REVITALISASI DALAM RANGKAIAN KONSERVASI

Revitalisasi adalah mengubah tempat agar dapat digunakan untuk fungsi yang lebih sesuai. Yang dimaksud dengan fungsi yang lebih sesuai adalah kegunaan yang tidak menuntut perubahan drastis atau yang hanya meminimalkan dampak negatif.

Konservasi dalam kaitan kebijakan tata ruang berarti pemakaian, pengelolaan dan perencanaan cermat atas seluruh sumber daya yang menentukan kebutuhan masa depan, baik yang alami maupun yang terbangun. Konservasi dalam kaitan pencahangan kota adalah suatu gerakan yang bertujuan melindungi warisan berbentuk obyek bangunan-bangunan dan kawasan yang dianggap memiliki nilai seni budaya atau sejarah. Konservasi dalam kaitannya dengan lingkungan fisik bersejarah adalah segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik, yang meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan dan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat yang akan mencakup alam, kesenian, arkeologi, dan lingkungan binaan.

III. MAKNA KONSEP REVITALISASI

Pertambahan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai serta percepatan pembangunan kota merupakan permasalahan tersendiri bagi penataan perkotaan. Akibatnya pembangunan kota terkesan tidak indah, semrawut, bahkan kurang sehat. Tempat-tempat bersejarah yang merupakan daya tarik daerah yang semestinya dipertahankan mulai kurang diperhatikan, bahkan ada beberapa yang diganti dengan bangunan baru. Padahal bangunan-bangunan tersebut bukan hanya perlu dilestarikan, namun lebih jauh dari pada itu yaitu revitalisasi.

Banyak kalangan masyarakat yang melihat kegiatan pelestarian semata-mata dari sisi pengawetan bangunan bersejarah secara terpisah, padahal kegiatannya juga meluas tidak terbatas pada pemulihan fungsi sesuai aslinya, tetapi dapat pula memberikan fungsi baru yang lebih tanggap terhadap tuntutan perkembangan zaman. Bagian yang dilestarikan pun tidak mutlak harus keseluruhan kompleks bangunan. Dapat saja hanya bagian bangunan tertentu yang dipertahankan, bahkan mungkin hanya menyisakan wajah depannya saja. Jadi penanganan konservasi tidak dapat disamaratakan, melainkan harus melalui pengkajian sampai detail kasus per kasus secara spesifik.

Ada tiga elemen penggerak pembangunan yaitu *people*, *power* dan *profit*. Yang tampak paling dominan dalam upaya revitalisasi bisa dijalankan, maka pihak yang perlu dihimbau atau didekati adalah melakukan revitalisasi. Pihak Pemerintah melakukan perencanaan, sedangkan pelaksana dan publikasi dapat dilakukan oleh swasta.

Konsep seperti pemberian fungsi baru pada bangunan lama kiranya layak untuk dikembangkan. Bangunan bersejarah dipertahankan bentuk, gaya dan ragamnya secara fisik, tetapi ruangan dalamnya diolah untuk mewadahi tuntutan kebutuhan ruang yang berbeda dari kegunaan aslinya. Kecenderungan munculnya bangunan baru yang angkuh,

sepatutnya ditangkal dengan sandaran pada etika perencanaan dan cara-cara pembangunan yang sarat dengan kepekaan kultural.

Mengingat masalah pembangunan di perkotaan merupakan masalah kompleks dan integritas, maka dalam pembangunan dan pengembangannya harus dipertimbangkan mengenai keaslian ekspresi, gaya bangunan, keunikan seni kriyanya, lingkungan sekitar bangunan, kekhasan bahan bangunan yang digunakan, keluwesan atau fleksibilitas ruang dan kesinambungan pemanfaatannya dari waktu ke waktu. Kesemua faktor tersebut sangat besar artinya dalam kegiatan yang menyangkut revitalisasi kawasan bersejarah.

Berikut usulan pragmatis revitalisasi terhadap kota Palembang yang mempunyai bangunan bersejarah yaitu :

1. Pengaturan kembali arus lalu-lintas agar bangunan dan lingkungan bersejarah yang masih bertahan tidak terganggu oleh debu, getaran dan bau dari kendaraan bermotor, khususnya kendaraan berat, misalnya pada Masjid Agung Palembang perlu dialihkan sebagian kendaraan untuk tidak melewati, sehingga mengurangi polusi disekitar mesjid serta mengurangi suara bising.
2. Perencanaan dan Perancangan perkotaan yang mengacu pada kekhasan nuansa yang bersejarah seperti tata lampu dengan sedikit menerangi bangunan bersejarah pada bagian atapnya sehingga dapat menambah nilai estetika bangunan tersebut.
3. Penyusunan rencana kegiatan bazar, pameran atau pementasan seni budaya di ruang terbuka seperti di Masjid Agung dapat dibuat sebagai tempat pusat penggalan kebudayaan dan tempat pameran dan pegelaran busana muslim.
4. Penanaman pohon yang dapat menyejukan guna menghijaukan kota dan menyegarkan kawasan bangunan bersejarah.
5. Pembuatan gapura bertuliskan "Selamat Datang" dengan ukiran yang bernuansa khas daerah terutama di kawasan bangunan bersejarah.

IV. KONSERVASI WARISAN BUDAYA SEBAGAI OBJEK WISATA

Bagi kepentingan kepariwisataan objek-objek bersejarah sebagai warisan budaya perlu mendapat perhatian seksama, dijaga dan dipelihara keberadaannya. Banyak kota di Indonesia yang telah kehilangan objek-objek yang bernilai sejarah yang sebenarnya "laku dijual" sebagai objek wisata, karena terbuai oleh pembangunan yang lebih banyak mengikuti selera dan kepentingan seseorang yang sifatnya sesaat tanpa menghiraukan kepentingan masa depan, lebih berorientasi pada aspek ekonomi dan politik semata. Pembongkaran atau perombakan bangunan bersejarah untuk dialihgunakan adalah salah satu contoh yang mengabaikan rancangan kota secara keseluruhan yang memungkinkan kerusakan lingkungan geografis, pencemaran seni budaya dan hilangnya sifat-sifat kepribadian bangsa.

Palembang sebagai kota tua mempunyai banyak objek wisata yang perlu dipelihara dan dijaga kelestariannya seperti situs sejarah, jembatan, tempat peribadatan tua dan rumah adat yang masih lengkap dengan sejarah pembangunannya dapat "dijual" sebagai komoditi wisata.

Kota-kota yang telah mengelola sektor kepariwisataan secara intensif adalah kota yang potensi wisatanya tidak begitu menonjol, namun ditangani secara profesional dapat menjadi industri sehingga mampu menyedot jutaan wisatawan.

Sebagai daerah tujuan wisata Palembang cukup banyak dan beragam memiliki potensi kepariwisataan yang dapat dipasarkan/dijual. Palembang menyimpan peninggalan sejarah yang tak ternilai. Budaya Melayu turun di Palembang dari Bukit Siguntang. Banyak peninggalan-peninggalan bersejarah sejak Kesultanan Palembang Darussalam, berupa bangunan tua yang masih berdiri dengan kokoh yang memerlukan upaya sungguh-sungguh dari semua pihak untuk memugar, menjaga dan melestarikannya.

V. LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN

Untuk meningkatkan daya saing diperlukan jalinan kerja sama dalam perencanaan ruang kota. Kota Palembang yang letaknya di tepi Sungai Musi akan menambah kekhasan Palembang sebagai kota di tepi sungai. Konservasi Palembang sebagai kota bersejarah dari berbagai zaman dengan lokasi yang berada di tepi sungai memerlukan dasar kebijakan dalam cakupan luas. Pelestarian sumberdaya seharusnya mendukung kehidupan dalam jangka panjang. Pelestarian dalam arti luas ini bukan lagi terikat pada menjaga keutuhan semula, melainkan menjaga esensi keberadaan dan kejadiannya. Maka perubahannya memerlukan tolok ukur yang terkendali. Dalam pengendaliannya amat berperan faktor sosial, budaya dan ekonomi.

Agar yang diharapkan dapat dipenuhi dengan tidak mengabaikan faktor tersebut di atas, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan dan peninjauan kembali ketentuan pelaksanaan pelestarian lingkungan dan bangunan, antara lain ketentuan pokok pemugaran lingkungan dan bangunan, pedoman teknis pelestarian dan ketentuan insentif dan bonus pembangunan pelestarian.
2. Peningkatan kemampuan teknis dan administratif personil pelestarian.
3. Inventarisasi, identifikasi, penggambaran dan pendokumentasian bangunan bersejarah.
4. Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan unit-unit terkait seperti LSM, Asosiasi Profesi dan penyandang dana.
5. Pemugaran bangunan bersejarah milik Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
6. Peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat yang akan melaksanakan pemugaran bangunan bersejarah milik mereka.

7. Perencanaan dan perancangan kawasan bersejarah seperti Benteng Kuto Besak, Mesjid Agung dan bangunan tua yang mempunyai nilai sejarah.

VI. PALEMBANG SEBAGAI KOTA WISATA SUNGAI

Palembang adalah ibukota Provinsi Sumatera Selatan dan sekaligus sebagai pusat pengembangan wilayah pembangunan bertopografi datar, bergelombang dan berawa. Dengan kondisi topografi tersebut 45,25 % dari luas wilayah adalah tergenang air (tergantungan musiman, tergenang karena hujan) 54,75 % tidak tergenang air.

Kota Palembang dibelah Sungai Musi menjadi dua wilayah, yaitu Sebarang Ulu dan Sebarang Ilir. Di sepanjang Sungai Musi hulu dapat dilihat rumah-rumah rakit, rumah mengambang di atas air. Keberadaan Sungai Musi dan peranannya hingga kini memberi citra tersendiri bagi Kota Palembang, maka tidaklah berlebihan dikatakan bahwa Palembang adalah Kota Sungai yang sungai tersebut berfungsi sebagai urat nadi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dalam upaya mengembangkan Kota Palembang sebagai Kota Wisata Sungai beberapa kegiatan dapat diciptakan atau direkayasa, sehingga berkembang.

Usaha pelayanan jasa angkutan wisata sungai harus direncanakan dan dirancang mulai dari objek wisata, jalur wisata sungai, jenis modal yang akan dioperasikan dan harus memenuhi baku kelayakan operasi yang aman dan nyaman. Dalam pelayanan jasa angkutan sungai khususnya di Sungai Musi, Pemerintah seyoganya berperan secara aktif melayani kepentingan masyarakat.

Industri Pariwisata sudah cukup membuktikan peranan pentingnya dalam sektor ketenagakerjaan. Pengembangan kepariwisataan akan memperluas kesempatan kerja. Kesempatan kerja akibat kegiatan kepariwisataan muncul secara berantai. Industri kepariwisataan bersifat menyerap kebutuhan tenaga kerja, bersifat "padat karya". Produk

kerajinan rakyat dan produk seni yang bersifat padat karya akan menemukan pasarnya. Jasa pemandu wisata pun akan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

Pembangunan daerah melalui kegiatan kepariwisataan dianggap penting dalam kebijakan ekonomi, terutama dalam menghadapi timbulnya perpindahan penduduk dari desa ke kota yang akan berakibat semakin padatnya suatu kota, sehingga akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Menurut beberapa ahli ekonomi, pariwisata dapat ditinjau sebagai suatu yang dapat memberikan kenikmatan kepada pendatang dan kesejahteraan bagi penduduk di sekitar objek wisata.

Dalam kondisi ini wisata sungai dapat diharapkan berkembang apalagi bila ditangani secara terpadu dan profesional. Kita dapat belajar dari Eropa, Cina dan Thailand bagaimana mereka mengelola sungai sebagai objek wisata unggulan dan untuk kepentingan pendidikan maupun untuk kepentingan seminar.

VII. PENUTUP

Untuk menghidupkan terus kota Palembang yang memiliki sejarah beserta ragam gaya dan ciri khasnya diperlukan transformasi. Dengan cara demikian kota terbangun dengan sendirinya dan bangunan-bangunan sebagai wadah intervensinya. Gagasan untuk menyelamatkan dan mengelola berbagai tempat bersejarah sebagai warisan budaya yang mempunyai nilai sejarah, nilai kejuangan, kepeloporan dan kebanggaan Kota Palembang, perlu terus digalang, dipelihara, dibina untuk memupuk semangat perjuangan dan cinta daerah sendiri. Perencanaan di semua lini harus memperhatikan pelestarian bangunan dan benda-benda yang mengandung nilai sejarah dan meningkatkan vitalitas yang ada serta menghidupkan kembali vitalitas lama yang telah pudar.

DATA MUTAKHIR PENELITIAN ARKEOLOGI DI KOTA PALEMBANG

Retno Purwanti dan Aryandini Novita¹

Abstrak

Kota Palembang memiliki tinggalan arkeologi dari masa Sriwijaya, pra-kesultanan, kesultanan, dan kolonial Belanda. Namun, karena pola aktivitas dari masa ke masa di Kota Palembang cenderung sama, maka terjadi situs yang lebih tua dimanfaatkan kembali pada masa kemudian. Akibatnya situs yang lebih tua mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia pada masa kemudian. Makalah ini berupaya mengungkapkan hasil penelusuran kembali jejak-jejak kota lama dengan meneliti tinggalan monumental maupun artefaktual. Dalam penelitian ditemukan komponen-komponen kota lama berupa makam, masjid, gereja, dan kelenteng.

Kata kunci : data mutakhir, penelitian arkeologi, Palembang, pra kesultanan, kesultanan, kolonial

A. PENDAHULUAN

Dalam arkeologi di Indonesia, masalah lingkungan hidup yang bersifat alami maupun buatan belum pernah dibicarakan secara luas. Meskipun akibat dari urbanisasi, polusi, krisis energi dan transportasi sebagai akibat kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan dengan percepatan yang berakselerasi telah banyak menimbulkan dampak bagi kelangsungan hidup manusia, namun akibatnya bagi kelangsungan atau kelestarian sumber daya budaya belum banyak terfikirkan. Oleh karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan mengenai makna peninggalan-peninggalan masa lalu yang merupakan simbol-simbol zaman itulah akhirnya ka 'daerah rawan' pembangunan fisik khususnya daerah agraris tradisional, permukiman kuna yang kumuh serta lahan-lahan di sekitar bangunan kuna yang dianggap kurang produktif dilihat dari segi ekonomi modern dianggap merupakan lahan yang berpeluang untuk dirombak sesuai dengan kebutuhan gaya hidup modern. Apalagi selama ini pembangunan senantiasa dirancang secara fragmentik dan parsial dan diarahkan untuk kepentingan sesaat khususnya untuk memenuhi kebutuhan hidup (sektor ekonomi) telah pula membawa konsekuensi terhadap rusaknya sejumlah situs-situs arkeologi. Dengan alasan

demi tercapainya target pembangunan, serta untuk mencapai tingkat pemerataan di seluruh wilayah maka aspek budaya kadang-kadang telah berbenturan dengan aspek-aspek lain. Tidak jarang pada tingkat keputusan, dengan berbagai dalih dan cara akhirnya aspek budaya harus tunduk terhadap kepentingan ekonomi, menyerah kalah dan membiarkan situs-situs penting dan potensial untuk digusur, dibongkar dan dihilangkan dari muka bumi untuk selamanya tanpa meninggalkan catatan sedikitpun.

Pengalaman menunjukkan bahwa kurangnya wawasan terhadap aspek pelestarian karena dituntut oleh kebutuhan guna meningkatkan pendapatan seringkali menimbulkan keputusan yang keliru. Di sisi lain, juga sering terjadi minimnya perhatian terhadap kemungkinan tersebut di atas serta kurang terkoordinasinya antar instansi yang terlibat dalam pembangunan akhirnya mengakibatkan terjadinya perbenturan kepentingan. Hal ini biasanya berimbas pada pengorbanan terhadap eksistensi sektor budaya.

Berdasarkan tinggalan arkeologi diketahui bahwa permukiman di Kota Palembang telah berlangsung sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Melalui pendekatan ekologi, diketahui bahwa pada masa itu aspek-aspek permukiman

¹ Dra. Retno Purwanti dan Aryandini Novita, S.S. adalah peneliti Balai Arkeologi Palembang.

ditempatkan sesuai kondisi geografis Kota Palembang, yaitu pada lahan yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya yang berupa sungai dan rawa (Purwanti dan Taim, 1995:65 — 69). Lokasi-lokasi tersebut kemudian berkembang hingga masa Kesultanan Palembang bahkan hingga saat ini. Berdasarkan hal ini dan keberadaan situs-situs dari masa kesultanan, secara geografis terlihat adanya pola yang sama dalam penempatan lokasi-lokasi permukimannya.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya disimpulkan bahwa permukiman di Palembang merupakan *multi-component site*. Hal ini dapat terlihat di situs-situs arkeologi yang berasal dari masa kesultanan terkadang juga ditemukan tinggalan-tinggalan arkeologi dari masa sebelumnya, misalnya situs Sabokingking, Gedingsuro, situs Sultan Mahmud Badaruddin II, dan situs candi Angsoka.

Dalam berbagai definisi kota tercakup unsur keluasan wilayah, kepadatan penduduk yang bersifat heterogen dan bermata pencaharian non pertanian, serta fungsi administrasi, ekonomi dan budaya. Unsur-unsur tersebut kemudian terwujud ke dalam fisik kota yang berupa komponen-komponen kota (Adrisijanti 2000:3). Komponen-komponen kota pada tiap-tiap periode berbeda-beda, tergantung dengan kebutuhan masyarakat waktu itu. Sesuai dengan semakin berkembangnya sebuah kota, maka komponen-komponen tersebut terwujud secara bertahap.

Pada umumnya kota-kota yang berkembang pada masa Islam di Indonesia berdiri di pinggir sungai atau pantai dan memiliki sistem pertahanan tertentu. Tempat tinggal penguasa terkadang dikelilingi oleh benteng dengan kegiatan perekonomian berlangsung di luar benteng. Secara umum ciri-ciri tersebut sesuai dengan karakteristik kota Islam yang dikemukakan oleh Hourani, yaitu

- Memiliki benteng,
- Mempunyai kediaman penguasa yang terdiri atas istana, bangunan-bangunan pemerintahan, dan bangunan untuk pasukan pengawal,

- Mempunyai fasilitas umum (*civic center*) yang terdiri atas masjid, madrasah dan pasar
- Mempunyai perkampungan untuk penduduk dengan pengelompokan atas dasar etnis, agama dan ketrampilan,
- Di luar benteng terdapat perkampungan untuk komunitas dengan beberapa pekerjaan tertentu dan pemakaman (Adrisijanti, 2000:27).

Kota merupakan salah satu organisasi sosial dari sekumpulan individu dalam jumlah yang cukup besar, sangat kompleks dengan berbagai strategi hidup yang kurang terikat lagi pada pertanian. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa kota juga merupakan suatu pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Kompleksitas kota pada dasarnya menciptakan pengelompokan-pengelompokan penduduk dan pemukiman antara lain sesuai dengan asal-usul, latar belakang ekonomi dan status sosial. Penempatan kelompok-kelompok ini kemudian akan terlihat dalam tata ruang kota.

Kota Palembang merupakan kota kuna, yang selalu diharapkan menjadi kebanggaan "Wong Kito". Bahkan kalau merujuk pada umurnya yang sudah mencapai 1324 tahun pada tanggal 16 Juni 2006 nanti, maka kota Palembang "bisa" menjadi kota tertua di Republik Indonesia tercinta ini. Tetapi apakah wujud fisik kota ini menunjukkan penampakan yang tua, renta dengan segala bentuk keunikannya? Tentu saja tidak, justru sebaliknya wujudnya jauh dari apa yang dibayangkan orang tentang romantisme suatu kota kuna dengan segala keeksotisannya. Bagaimana tidak, bila yang tampak di depan mata kita sekarang adalah, Kota Palembang yang sedang giat-giatnya membangun gedung-gedung moderen, yang justru menenggelamkan "kekunaan". Kesan tua itu benar-benar tertutupi dengan "kemegahan dan ketinggian" berupa bangunan-bangunan mal-mal, hotel-hotel berbintang dan sebentar lagi apartemen, dengan bentuk arsitektur yang monoton dan miskin makna? Dan tragisnya, justru pertumbuhan kota dan urbanisasi yang terjadi dewasa ini sering

dianggap sebagai indikator kemajuan dan modernisasi. Padahal disadari atau tidak proses pertumbuhan kota dan urbanisasi seperti ini selalu diikuti dengan timbulnya persoalan-persoalan sosial dan budaya (Suryo, t.t.:1). Untuk dapat memahami persoalan-persoalan tersebut dan mencari jalan keluarnya, diperlukan peruntutan sejarah pertumbuhan kota. Dalam rangka peruntutan tersebut, arkeologi, khususnya arkeologi perkotaan, dapat memberikan sumbangannya berupa penelusuran jejak-jejak perkotaan yang masih tersisa sampai saat ini.

Dengan berpedoman pada permasalahan tersebut maka, dalam tulisan ini akan dicoba untuk menelusuri kembali jejak-jejak kota lama yang berupa komponen-komponen kota di Palembang. Identifikasi komponen-komponen kota lama di Palembang bukanlah pekerjaan yang mudah, karena arus pembangunan yang telah terjadi selama ini senantiasa mengorbankan tinggalan-tinggalan sejarah dan budaya, yang seharusnya bisa menjadi simbol peradaban kota. Penelusuran jejak-jejak komponen kota ditelusuri melalui tinggalan-tinggalan sejarah dan arkeologi, baik yang berupa bangunan monumental maupun artefaktual. Di samping itu juga akan ditelusuri salah satu komponen kota, yaitu kelompok-kelompok pemukiman, yang masih tersisa dalam bentuk toponimi.

B. SEBUTAN KOTA PALEMBANG

Wolterbeek dan Muntinghe yang membuat peta kota Palembang pada tahun 1819 menjuluki kota Palembang dengan *Venice from The East* (Venesia dari Timur). Sebutan ini diberikan karena Palembang memiliki lebih dari seratus anak sungai yang semuanya bermuara ke sungai Musi sebagai sungai utama dan membelah kota Palembang menjadi dua bagian, yaitu kawasan Ulu dan Ilir. Sungai Musi ini telah mempunyai peran penting dalam kesejarahan Palembang dan menjadi urat nadi transportasi dan komunikasi jauh sebelum Belanda mencengkeram kota ini. Sebutan lain

yang diberikan Belanda adalah *De Stad Twintig Einlanden* (Kota Dua Puluh Pulau), dimana pulau-pulau terbentuk akibat perpotongan anak-anak sungai yang membelah daratan. Pada zaman kolonialisme ini pula Palembang mendapat julukan *Palembangsche Beneden Landen* atau Daerah Tanah Datar.

C. DEFINISI DAN KOMPONEN-KOMPONEN KOTA LAMA

Di Indonesia ada nama-nama tempat yang menggunakan kata kota atau *kuta*, misalnya Kutaraja (Banda Aceh sekarang) dan Kutarenon di Lumajang, Jawa Timur. Dalam bahasa Sansekerta, *kuta* berarti benteng atau kubu pertahanan (Williams, 1899:288). *Kuta* dalam bahasa Jawa Kuna berarti 'benteng'.

Perkataan "kota" dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti yang masing-masing sangat tergantung pada konteksnya, yaitu:

1. dinding (tembok) yang mengelilingi benteng (tempat pertahanan),
2. daerah perkampungan yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat, dan
3. daerah yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, kebudayaan, (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989:463).

Dalam bahasa Melayu perkataan kota juga memiliki pengertian yang serupa dengan pengertian dalam bahasa Indonesia (Nasir, 1970:11).

Childe (1979:12) mengatakan: *The concept of city is notoriously hard to define*". Oleh karena itu, di samping arti kata kota secara leksikografis, para ahli mengemukakan pula pengertian-pengertian tentang kota berdasarkan bidang keilmuan masing-masing. Sebagai contoh, John Sirjamaki – seorang ahli sosiologi – menyatakan bahwa kota adalah permukiman yang permanen, relatif luas penduduknya padat serta heterogen, dan memiliki organisasi-organisasi politik, ekonomi, agama, dan budaya (Sirjamaki, 1964:4 -- 6). Dengan memadukan beberapa pendapat di atas, ahli perkotaan

berbangsa Perancis, Dora Jane Hamblin mengemukakan bahwa kota adalah tempat yang dihuni secara permanen oleh suatu kelompok yang lebih besar dari suatu klan. Di kota terjadi suatu pembagian kerja, yang kemudian melahirkan kelompok-kelompok sosial dengan differensiasi fungsi, hak, dan tanggungjawab (Hamblin, 1975:11). Memang dalam berbagai definisi tentang kota tercakup unsur keluasan wilayah, kepadatan penduduk yang bersifat heterogen dan bermaata pencaharian non-pertanian, serta fungsi administratif-ekonomi-budaya (Jones, 1966:11). Unsur-unsur tersebut terwujud pula ke dalam fisik kota, sehingga terbentuklah ciri-ciri fisiknya. Ciri-ciri tersebut kemudian sebagian tertinggal sebagai data arkeologi, dan sebagian lain yang lebih besar jumlahnya musnah oleh faktor alam dan manusia. Data arkeologi tersebut berupa artefak dalam berbagai bentuk, sedangkan data nonartefak yang ditinggalkan suatu kota berupa toponim.

Di Indonesia, kota-kota kuna biasanya berdiri di daerah-daerah pantai, di tepi sungai, atau di lembah-lembah dengan dilengkapi berbagai sarana dan prasarana baik politik, keamanan, ekonomi, keagamaan, maupun pemenuhan kebutuhan hidup yang lain. Tampaknya lokasi suatu kota pada zaman dahulu dipilih berdasarkan berbagai macam pertimbangan yang menyangkut aspek-aspek tersebut di atas. Adalah suatu hal yang menarik bahwa pada periode Islam di Jawa, banyak kota muncul dan berkembang di wilayah pesisir utara Pulau Jawa, sedangkan pada masa sebelumnya tidak banyak kota yang muncul di wilayah tersebut, melainkan di daerah pedalaman. Kemudian pada akhir abad ke-16 wilayah pedalaman kembali muncul dalam percaturan sejarah dengan lahirnya kerajaan Mataram-Islam beserta kota-kota pusat pemerintahannya.

Di Cina, India, dan beberapa kawasan lain di Asia Tenggara serta Eropa masa lalu, kota dikelilingi tembok tinggi atau benteng, tempat rakyat berlindung sewaktu ada bahaya (Weber, 1966:75-77). Keadaan di Indonesia

serupa, tetapi untuk selanjutnya perlu studi yang rinci untuk membandingkan variasi-variasinya. Di dalam *Nagarakertagama* digambarkan bahwa wilayah kediaman raja Majapahit dikelilingi tembok yang tebal dan tinggi (Pigeaud, 1960, I: 7). Demikian pula, data arkeologi dan peta kuno tahun 1596 Masehi menunjukkan bahwa wilayah kota Banten dilingkupi oleh benteng (Rouffaer & Ijzerman, 1915:222). Di Yogyakarta dan Surakarta ada *cepuri*, yakni tembok tinggi yang mengelilingi kompleks kraton, dan ada *baluwarti* yakni benteng yang mengelilingi kompleks kraton dan beberapa kelengkapannya serta hunian-hunian di sekitarnya. Akan tetapi, istana kerajaan Siak Sri Inderapura juga tidak dilindungi benteng, hanya Sungai Siak yang mengalir di satu sisi kota.

Di wilayah Asia Selatan — Asia Barat, keberadaan kota secara arkeologis sudah dapat dibuktikan sejak zaman prasejarah, yaitu dengan terungkapnya antara lain kota Jericho di Israel, catal Huyuk di Turki; serta sejak masa protosejarah yakni dengan keberadaan kota Mohenjodaro di Pakistan. Kota-kota tua tersebut berkembang antara tahun 9000 — 2500 Sebelum Masehi (Hamblin, 1975:12,29,123). Data arkeologi di situs-situs yang bersangkutan menunjukkan adanya kumpulan bangunan, baik berupa rumah tinggal, bangunan fasilitas, maupun prasarana keamanan. Selain itu, ditemukan pula data arkeologi yang menunjukkan adanya hubungan dagang dengan daerah lain, beragamnya sumber mata pencaharian, kehidupan keagamaan, aspek-aspek pertahanan, bahkan aspek rekreasinya.

D. TINGGALAN ARKEOLOGI DI PALEMBANG

Panjangnya rentang kesejarahan Palembang banyak meninggalkan sisa-sisa aktivitasnya di masa lampau, baik dalam bentuk situs arkeologi maupun bangunan-bangunan bersejarah dari masa kejayaan Sriwijaya sampai runtuhnya kesultanan Palembang Darussalam, dan

mulainya kolonial Belanda pada tahun 1823. Tinggalan sejarah masih terlihat sampai saat ini berupa bangunan-bangunan kuna dengan segala bentuk kekhasan gaya arsitekturalnya. Bangunan-bangunan tersebut ditemukan dalam suatu permukiman lama, misalnya di lokasi perkampungan Arab di Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, 9/10 Ulu, 11 Ulu, 12 Ulu, Perkampungan Al-Munawar dan Al-Hadad di Kelurahan 13 Ulu, Perkampungan Arab Al-Habsyi dan Al-Kaff di Kelurahan 14 Ulu, serta perkampungan Arab As-Sagaff di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, Palembang. Selain komunitas Arab di Palembang juga ditemukan komunitas lain, yaitu Tambi, India di Kertapati dan Cina di 7 Ulu dan 10 Ulu. Hanya saja di dua perkampungan terakhir, komunitas tersebut saat ini sudah menjadi minoritas, bahkan sudah hilang.

Komunitas-komunitas tersebut mewakili komunitas asing atau pendatang dari luar kepulauan nusantara. Di luar itu sebagai kota metropolis sejak masa kerajaan Sriwijaya, Palembang juga dihuni oleh komunitas-komunitas dari suku-suku pendatang dari daerah lainnya yang ada di nusantara., yang kemudian mendirikan permukimannya masing-masing sehingga dikenal beberapa toponimi, seperti “Kebangkan”, “Talang Jawa” dan sebagainya. Hal ini menjelaskan bahwa jauh sebelum dikuasai oleh kolonial Belanda, kota Palembang terdiri dari perkampungan-perkampungan dengan segala bentuk dan keanekaragaman budayanya.

Jika toponimi-toponimi di atas dicermati, maka akan menunjukkan adanya sejumlah nama yang merujuk kepada komponen-komponen tatakota lama, berdasarkan status sosial penghuninya, pekerjaan atau fungsinya di masa lalu. Beberapa toponimi yang mengacu pada keberadaan kraton lama dan komponennya antara lain: Pelimbang Lamo, yang merupakan lokasi permukiman bekas kraton Kuto Gawang, yaitu di daerah 1 Ilir; Talang Ratu, Kedipan, Masjid Lamo, Beringinjanggut, Keratuan atau Keraton,

Segaran, dan sebagainya. Toponimi yang mengacu kepada pekerjaan penghuninya, misalnya Sayangan, Pelampitan, Kepandian dan Kapuran.

Berdasarkan pengamatan lapangan, toponimi-toponimi, dan peta-peta kuno dapat diketahui bahwa kota Palembang pada masa kesultanan secara umum sesuai dengan ciri-ciri kota yang tumbuh pada masa Islam. Namun, ternyata terjadi penyimpangan pada salah satu komponen kota dimana pasar yang menurut Hourani terdapat di dekat tempat tinggal penguasa, sedangkan di Palembang berdasarkan data sejarah terdapat di tepi sungai. Tentunya hal ini menjadi permasalahan yang cukup menarik karena dalam menetapkan lokasi komponen-komponen kota tentunya didasari oleh faktor-faktor tertentu antara lain keadaan geografis. Pada dasarnya keadaan geografis dapat mempengaruhi pertumbuhan suatu kota karena berkaitan dengan aksesibilitas kota tersebut dengan daerah-daerah disekitarnya.

Hasil penelitian yang dilakukan Balai Arkeologi Palembang pada tahun 2004 menunjukkan bahwa Kota Palembang pada masa awal Kesultanan Palembang Darussalam memiliki ciri-ciri umum kota Islam yang dikemukakan oleh Hourani. Hal ini juga sesuai dengan analisis peta kuno yang selama ini telah dilakukan.

Pada penelitian tersebut juga berhasil ditentukan batas-batas kota yaitu sebelah selatan: Sungai Musi, utara: Sungai Lunjuk, timur: Sungai Buah: dan barat: Sungai Taligawe. Batas utara Keraton Kotagawang juga berhasil ditemukan, yaitu berdasarkan temuan sisa kayu pagar keliling. Batas tersebut terletak di *greenbarier* PT Pusri yang berada di sebelah selatan Sungai Lunjuk.

Secara kosmologis, pusat pemerintahan ini memiliki unsur-unsur yang umum dipakai pada kota-kota Islam di Jawa, yaitu unsur laut/air dan gunung. Unsur laut/air yang terdapat di Kota Palembang pada masa awal Kesultanan adalah Sungai Musi; sedangkan unsur gunung adalah Situs Sabokingking yang merupakan sebuah

bukit.

Nama-nama perkampungan lama tersebut kemudian diberi nama baru oleh pemerintah kolonial Belanda, yang dimulai dari sebelah Hilir Sungai Musi di sebelah timur, yaitu di muara Sungai Tali-Gawe. Daerah ini kemudian diberi nama 1 Ilir; dan seterusnya ke arah barat Kampung 2 Ilir sampai dengan 36 Ilir. Nama-nama inilah yang sekarang dikenal oleh penduduk Palembang, sedangkan nama lama hanya tersisa sedikit, kalau tidak bisa dikatakan nyaris musnah.

Bahkan nama-nama jalan lama yang masih menunjukkan fungsinya di masa lalu dan juga merujuk pada toponimi masa lalu pun juga nyaris hilang, diganti dengan nama-nama baru, baik dengan nama pahlawan nasional maupun lokal, yang tidak menunjukkan identitas kekunaan kota Palembang.

Selain perkampungan atau permukiman lama, di Palembang juga ditemukan tinggalan-tinggalan arkeologis yang bernafaskan religi dengan berbagai latar keagamaan, yaitu Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan dan Budha atau Khonghucu. Berdasarkan jenisnya, situs-situs religi yang berlatar Agama Islam berupa masjid dan makam. Situs-situs religi yang berlatar agama Kristen Protestan dan Katholik berupa gereja, sedangkan situs-situs religi yang berlatar agama Budha dan Konghucu berupa kelenteng dan makam.

a. Situs-Situs Religi Agama Islam

Makam-makam Islam yang ditemukan di Palembang adalah sebagai berikut:

1. Situs Gede Ing Suro
2. Situs Makam Panembahan
3. Situs Makam Sultan Agung
4. Situs Makam Sabokingking
5. Situs Makam Kawah Tengchurep
6. Situs Makam Kambang Koci
7. Situs Makam Pangeran Syarif Ali
8. Situs Makam Gubah Duku
9. Situs Makam Madi Angsoka
10. Situs Makam Cindewalang
11. Situs Makam Ariodillah

12. Situs Makam Pangeran Nangling
13. Situs Makam Cindewalang B
14. Situs Makam Kebon Gede
15. Situs Makam Talangkerangga
16. Situs Makam Bukit Siguntang
17. Situs Makam KH Abdul Hamid bin Mahmud
18. Situs Makam Kemas Rindo
19. Situs Makam Tuan Putri
20. Situs Makam Tubagus Kuning
21. Situs Makam Temenggungan
22. Situs Makam Alhaddad dan Assegaf
23. Situs Makam Arab 14 Ulu.

Selain bangunan-bangunan pemakaman, di Palembang juga ditemukan sejumlah bangunan suci, tempat melakukan peribadatan, baik berupa langgar (musholla) atau masjid. Adapun masjid-masjid dan musholla yang ditemukan di Palembang antara lain:

1. Masjid Lawang Kidul
2. Masjid Agung
3. Masjid Suro
4. Masjid Ki Marogan
5. Masjid Tambi
6. Langgar Al Faghar
7. Langgar Kota Batu.

b. Situs-Situs Religi Agama Kristen Protestan

Situs-situs yang ditemukan di Palembang yang berasal dari agama Kristen Protestan hanya ditemukan dua bangunan, yaitu Gereja Imanuel dan Gereja Siloam, yang terletak di kawasan Talangsemut, Palembang.

c. Situs-Situs Religi Agama Katholik

Situs keagamaan dari agama Katholik hanya ditemukan satu buah yaitu Gereja Santa Maria, di Bukit Kecil, Palembang.

d. Situs-Situs Religi Agama Budha dan Konghucu

Situs religi yang berasal dari agama Budha dan Konghucu berupa bangunan kelenteng dan

kompleks pemakaman, yaitu Kelenteng 10 Ulu dan Kelenteng Talangsemut. Sementara itu kompleks pemakaman terdapat di Bukit Mahameru, Plaju.

Secara umum pusat-pusat kegiatan peribadatan pada pasca masa Kerajaan Sriwijaya berada di tepi Sungai Musi. Hal ini tidak terlepas dari lokasi hunian masa tersebut yang terletak di sepanjang Sungai Musi. Pengecualian terdapat pada lokasi Gereja Imanuel, Gereja Siloam, Gereja Santa Maria dan Kelenteng Talangsemut. Lokasi situs-situs tersebut tidak terletak di tepi Sungai Musi. Hal ini dikarenakan kawasan pemukiman orang-orang Eropa yang umumnya beragama Kristen Protesten dan Katholik berada di Talangsemut yang terletak cukup jauh dari Sungai Musi. Sedangkan letak Kelenteng Talangsemut yang juga terletak cukup jauh dari Sungai Musi, diperkirakan dibangun untuk memenuhi kebutuhan religi kelompok etnis Cina yang setelah abad ke 19 M yang banyak bermukim di Kawasan Bukit.

Berdasarkan kronologinya keletakan situs-situs religi yang berasal dari masa pra-Kesultanan berada di bagian timur Kota Palembang. Hal ini dapat dikaitkan dengan keletakan keraton pertama Kesultanan Palembang Darussalam, yaitu Kuto Gawang yang terletak di wilayah tersebut. Situs-situs religi yang berlatar Agama Kristen Protestan, Katholik, serta Budha dan Konghucu memiliki kronologi yang lebih muda dengan situs-situs religi yang berlatar Agama Islam. Hal ini dapat dikaitkan dengan kenyataan sejarah yang menyebutkan bahwa pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, kelompok-kelompok etnis asing dilarang bermukim di daratan, tetapi sejak dihapuskannya Kesultanan Palembang Darussalam, penguasa kolonial Hindia-Belanda mengubah kebijakan ini sehingga memungkinkan untuk menempatkan makam-makam tersebut sesuai dengan pola makam para sultan.

E. PENGELOLAAN SUMBER DAYA BUDAYA KOTA PALEMBANG

Dalam menangani suatu benda/situs/benda cagar budaya harus disadari sepenuhnya bahwa benda/situs/benda cagar budaya dan lingkungannya merupakan satu “daerah kegiatan” (*activity area*) yang didefinisikan merupakan satu unit ruang spesifik tempat dilakukannya “sekumpulan kegiatan” (*activity set*) secara berulang-ulang (Struever 1968: 135), serta membentuk “struktur kegiatan” (*activity structure*). Dalam daerah kegiatan tersebut terdapat sejumlah lokasi (*locus*) tempat dilakukannya aktifitas individual. Setiap kegiatan itu sendiri terjadi sebagai akibat dari adanya interaksi antara sekurang-kurangnya satu sumber energi dan satu elemen budaya (Schiffer 1972:157). Dengan demikian dalam penanganan suatu tinggalan arkeologi, sejarah ataupun budaya hendaknya tidak dilihat secara parsial dan fragmentaris, sehingga dengan mengatasnamakan kepentingan bersama (umum) pembangunan akan mengorbankan tinggalan budaya masyarakat setempat. Padahal inti dari lingkungan urban adalah kenyamanan bagi publik – suatu lingkungan binaan yang diciptakan untuk kenyamanan dan aktifitas publik. Oleh karena itu, aktifitas pembongkaran bangunan kuna, apalagi penggusuran suatu permukiman, tidak hanya akan menyalahi konsep lingkungan urban itu sendiri, namun lebih jauh akan mencabut akar budaya masyarakat setempat. Untuk itu kekayaan budaya masa lalu sudah selayaknya dilestarikan dan dimanfaatkan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

Salah satu contoh bangunan kuna yang harus diselamatkan adalah Benteng Kuto Besar dan Kantor Ledeng (Kantor Walikota Palembang). Selain itu masih bisa ditemukan pelabuhan kuna (pabean, sekarang daerah Sekanak), Pasar 16 Ilir, permukiman-permukiman (Kampung Arab, Cina, India/Tambi dan Belanda), pelabuhan baru (Boom Baaru) dan sebagainya. Semuanya merupakan kekayaan arsitektural yang tidak bisa dibilang

sedikit dan mempengaruhi perkembangan sejarah arsitektur kota Palembang. Kekayaan ini selayaknya dan sudah seharusnya menciptakan kecintaan akan kota ini dan membentuk kesadaran terhadap pelestarian lingkungan bersejarah yang dapat memberikan kontribusi sebagai aset wisata di Kota Palembang.

Salah satu sudut kota Palembang yang masih memiliki nilai-nilai historis dan artistik yang tinggi selain yang sudah disebutkan di atas adalah kawasan Pasar 16 Ilir. Ia berada tepat di tepi sungai Musi yang dinaungi jembatan *TORIIL* atau jembatan Ampera yang dibangun pada tahun 1962. Di sekitar kawasan ini pernah berdiri dua buah bangunan peninggalan kolonial yang ikut dibongkar yaitu *Javaasche Bank* (1959), Jalan Tengkuruk (1920) serta Balai Kota yang memiliki tuju dan taman segilima yang mempunyai sudut aksis ke masjid Agung. Pasar 16 Ilir sendiri merupakan salah satu dari permukiman yang dibangun Belanda sejak bermukim (menetap) di Palembang pada tahun 1920. Pada kawasan Pasar 16 Ilir ini masih dapat ditemukan bangunan-bangunan dengan gaya yang khas yaitu *molding*, jendela yang tinggi, besar, dan lebar, *Ducth gable*, penyelesaian sudut yang diukir menyerupai antefik candi, *cornice*, *dormer*, *arch* pada jendela, serta dinding yang berwarna putih, krem atau kuning.

Pasar 16 Ilir merupakan kawasan industrial-ekonomi yang sangat pesat perkembangannya. Sejak kolonial meninggalkan Kota Palembang kawasan ini berkembang menjadi tidak terkendali dan semrawut, sehingga citra tempo dulu yang indah, rapi, teratur dan menawan musnah nyaris tanpa bekas. Bangunan-bangunan cantik yang tersisa semakin tertutup pasar yang semakin penuh mengisi setiap sudut jalan. Apabila kita tidak memperhatikan baik-baik, maka tidak akan pernah disadari bahwa di kawasan itu terdapat suatu kawasan urban-industrial pada masa lampau dengan nilai historis dan ernalmentis yang tidak terbayangkan yang merupakan mata rantai kolonialisme di Indonesia pada umumnya dan

Kota Palembang khususnya. Namun, patut disayangkan tidak ada usaha pemerintah untuk merekonstruksi bangunan-bangunan tersebut dan mengembalikannya ke bentuk semula, sejak Pasar 16 Ilir terbakar pada tahun 1996. Bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu pembangunan ruko dan rukan modern yang membentuk benteng psikologi individualisme yang kuat mengelilingi bangunan-bangunan kuno ini yang bertariikh 1828 pada *dormernya* dengan perpaduan ornamen dari masa pengaruh Hindu-Budha, Cina, Arab, dan lokal, tetapi sekarang sudah terlihat kumuh dan seolah-olah dapat dibongkar dan dimusnahkan kapan saja apabila pemilik ingin menggantinya dengan ruko atau rukan modern.

Urban revitalism sebenarnya sudah dimulai oleh beberapa negara berkembang terutama di kawasan Asia Tenggara, seperti Singapura, Thailand dan Malaysia. Bahkan, Jakarta sebagai ibukota RI dan pernah menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda juga sudah melakukan revitalisasi bangunan-bangunan bersejarah dimaksud (Kompas, Maret 2006). Negara-negara yang disebutkan di atas sudah memiliki kesadaran akan pentingnya sejarah sebagai benih dari tumbuh dan berkembangnya suatu kota, terutama peninggalan-peninggalan sejarah berupa bangunan-bangunan kuno yang memiliki keindahan dan nilai historis yang tinggi. Singapura memiliki kemiripan dengan kota Palembang yaitu sama-sama memiliki sungai besar yang membelah pusat kotanya. Kemiripan yang menonjol adalah pada zaman kolonial pembangunan permukiman Belanda dimulai dengan berdirinya pelabuhan dan pasar pada muara sungai yang langsung berhubungan dengan laut. Hal ini terlihat pada pusat kota lama Singapura, begitu pula dengan bagian kota Palembang yang dibangun oleh Belanda ini atau kawasan 16 Ilir. Pada masa itu kawasan ini sering dilanda banjir sehingga kaki-kaki bangunan tertutup oleh air, dan semakin disebut-sebut sebagai "Venice from The East". Sisa-sisa bangunan kuno yang direvitalisasi dan dibuat sebagai suatu taman sejarah dengan gaya venesianya sebenarnya bisa menciptakan

kenyamanan urban.

Demikianlah akhirnya harus disadari betul bahwa di dalam suatu daerah kegiatan terdapat banyak aktifitas manusia yang berkenaan dengan upaya menciptakan pusat kegiatan serta pemanfaatannya, ketika pusat kegiatan tersebut telah difungsikan. Semua kegiatan sejak penyiapan lahan hingga pemanfaatannya, banyak kegiatan yang mengakibatkan perubahan struktur lapisan tanah dan transformasi benda-benda (energi) yang tidak mungkin mudah diamati begitu saja. Itulah sebabnya maka apapun upaya yang dilakukan dalam rangka penelitian maupun pemugaran benda/situs/ bangunan cagar budaya tidak boleh tidak harus dilakukan oleh arkeolog yang menyadari sepenuhnya mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sebagai akibat dari tindakannya membedah bumi atau apapun istilah yang digunakan. Oleh karena itu jelas bahwa penelitian merupakan bagian yang integral dengan pelestarian/pemugaran.

**DAFTAR KAMPUNG/JALAN DI
PALEMBANG
YANG BERASAL DARI MASA
KESULTANAN DAN KOLONIAL**

A. Seberang Ilir

1. Kampung Kemen
2. Sungai Lais
3. Talang Buah
4. Pelimbang Lamo
5. Sabuk-Kingking
6. Lemah-Abang
7. Lemah-Luhur
8. Kuwiran
9. Lawang-Kidul
10. Sungai Jeruju
11. Seduduk Putih
12. Bukit Talang Sangkal (Bukit yang disangkal)
13. Pasar Kuto
14. Kebangkan
15. Tabak-Ning
16. Petapian

17. Kedipan
18. Terusan
19. Segaran
20. Purban
21. Lorong Basah
22. Kebumen
23. Sayangan
24. Masjid Lamo
25. Kepandian
26. Pelampitan
27. Beringin-Janggut
28. Rimbo Kemuning
29. Ario Damar
30. Talang Ratu
31. Masjid Agung
32. Kapuran
33. Keratuan atau Keraton
34. Kemenduran
35. Kemartan Pulau
36. Kelurahanmadu
37. Kebon Duku
38. Cinde Welang
39. Lorokpakjo
40. Puncak Sekuning
41. Sungai Kebonmanggis
42. Suak Bato
43. Depaten Lama
44. Sekanak Sungai Tawar
45. Surraw
46. Talang Kiranggo
47. Makrayu
48. Bukit Lamo
49. Talang Tuwo
50. Gandorio Pajung
51. Padang Penyaringan
52. Kebon Gedeh
53. Tapak Njari
54. Tal. Makrayu
55. Padang Selasa
56. Kedukan Bukit
57. Tangga Buntung
58. Karang Anyar
59. Gandus
60. Talang kajang Bajan
61. Pulau Kerto
62. Lambidaro

63. Tanggabatu
64. Talang Pangeran

B. Seberang Hulu

1. Kertapati
2. Karang-Berahi
3. Keramasan
4. Kampung Baaru
5. Sungai Goren
6. Perigi
7. Saudagar Kucing (Ju Ching)
8. Sungai Pekapuran
9. Kampung Cili
10. Kampung Bendungan
11. Sungai Tuan Puteri
12. Sungai Kenduruan
13. Terusan Kedukan Anyar
14. Kedemangan
15. Sungai Hawur
16. Sungai Lumpur
17. Sungai Raso
18. Karang Belango (Belangnjo)
19. Pedatuk'an
20. Tumenggungan
21. Sungai Kangkang
22. Tuan Kapar
23. Gunung Meru
24. Seriguna
25. Bagus Kuning
26. Plaju
27. Tangga Takat

Nama-nama jalan:

- a. Alexanderweg
- b. Anna Poulownaweg
- c. Beatrixlaan
- d. Bergenlaan
- e. Bernhardlaan
- f. Bloemenlaan
- g. Bukit Besar
- h. De Ruyterlaan
- i. Emmalaan
- j. Florisweg
- k. Fredriklaan
- l. Irenelaan

- m. Julianalaan
- n. Kerkweg
- o. Kortenaerweg
- p. Nassaulaan
- q. Nassauplein
- r. Oranjelaan
- s. Palmenlaan
- t. Prins Hendriklaan
- u. Raadhuisweg
- v. Regenteslaan
- w. Sophielaan
- x. Stadhouderslaan
- y. Trompweg
- z. Van Speykweg
- aa. Vijverlaan
- bb. Vogellaan
- cc. Weimarlaan
- dd. Wilhelminaalaan
- ee. Willemslaan
- ff. Witte de Wittweg
- gg. Pagaralam
- hh. Kebumen
- ii. Temon
- jj. Kraton
- kk. Guru-guru
- ll. Pasar Baru
- mm. Masjid Lama
- nn. Tengkuruk
- oo. Sekip
- pp. Pabean
- qq. Sekanak
- rr. Talang Jawa Lama
- ss. Bukit Kecil
- tt. Segaran
- uu. Kepandean
- vv. Pasar
- ww. Lemabang
- xx. Boombaru
- yy. Majestic Bioscoop
- zz. Terusan
- aaa. Sayangan
- bbb. Besar
- ccc. Lematang
- ddd. Dempo

KEPUSTAKAAN

- Abdullah Syukri bin Idrus Shahah. 2005. *Ziarah Kubra & Sekilas Mengenai Ulama dan Auliya' Palembang Darussalam*. Palembang: Panitia Pelaksana Ziarah Kubra.
- Azra, Azyumardi. 2002. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Bandung: Mizan.
- Berg, L.W.C. van den. 1989. *Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara*. Seri INIS Jilid III. Terjemahan Rahayu Hidayat. Jakarta: INIS.
- Burger, D.H. 1962. *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Terjemahan Prajudi. Jakarta: Pradjanparamita.
- Cortesao, Armando. 1944. *The Summa Oriental of Tome Pires. An Account of the east, from the Red Sea to Japan, Written in Malacca and India 1512-1515*. London: Hakluyt Society.
- Faille, P. De Roo De. 1971. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Jakarta: Bhratara.
- Graff, H.J. de dan Th. G. Pigeaud. 2001. *Kerajaan-kerajaan Islam Pertama di Jawa tinjauan sejarah politik abad XV dan XVI*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Groenevelt, W.P. 1960. *Historical Notes on Indonesia Malay Compiled from Chinese Sources*. Jakarta: Bhratara.
- Hirth, F. & W.W. Rockhill. 1967. *Chau Ju-kua: His Work on the Chinese and Arab trade in the twelfth and thirteenth centuries, entitled Chu-fan-chi*. Taipei.
- Jumhari dan Iim Imaduddin. 2005. *Arab Palembang dari Masa Kesultanan sampai Kolonial Berlanda Suatu Kajian Sejarah Sosial*. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (belum terbit).
- Marsden, William. 1975. *The History of Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- McRoberts, R.W. 1986. "Notes events in Palembang 1389 – 1511 the everlasting colony", dalam *JMBRAS Vol. LIX. Part 1*, th. 1986. Hlm. 73-84.
- Meilink-Roelofs, M.A.P. 1962. *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Mujib. 1998. "Yang Tersisa dari Situs Makam Koci: Menarik untuk Kajian Filo-Arkeologi, Linguistik, dan Kaligrafi" *Jurnal Arkeologi Siddhayatra Nomor: 2/ III/Nopember/1998*. Palembang: Balai Arkeologi Palembang. Hlm. 35-39.
- . 2004. "Pemukiman Masyarakat Asing di Palembang Pada Masa Kesultanan", *Kalpataru Majalah Arkeologi No. 17*. Jakarta: Deputi Bidang Sejarah dan Purabakala—Asdep Urusan Arkeologi Indonesia. Hlm. 28-52.
- Novita, Aryandini. 2004. "Permukiman Masa Awal Kesultanan Palembang", Laporan Penelitian Balai Arkeologi Palembang Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Belum terbit).
- . 2005. "Situs-situs Religi di Kota Palembang Pasca Masa Kerajaan Sriwijaya", Laporan Penelitian Balai Arkeologi Palembang Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Belum terbit).
- Lohanda, Mona. 1999. "Studi Minoritas dalam Spektrum Kajian Sejarah Indonesia", dalam Henry Chamber-Loir & Hasan Muarif Ambary (editor), *Panggung Sejarah Persembahkan kepada Prof. Dr. Denys Lombard*. Jakarta: EFEO-Puslit Arkenas-Yayasan Obor Indonesia.
- Lombart, Denys. 2000. *Nusa Jawa: Silang Budaya Warisan Kerajaan-kerajaan*

- Konsentris**. Jilid 3. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahim, Husni, 1998. *Sistem Otorasi dan Administrasi Islam. Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Jakarta: Logos.
- Reid, Anthony. 1999. *Dari Ekspansi hingga Krisis II Jaringan Perdagangan global Asia Tenggara 1450 – 1680*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sevenhoven, J.L. van, 1971, *Lukisan Tentang Ibukota Palembang*. Jakarta: Bhratara.
- Syamsu As., Drg. H. Muhammad. 1999. *Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya*. Jakarta: Lentera Baritama.
- Taim, Eka Asih Putrina. 2002. "Pemukiman Tepi Sungai di Kota Palembang dari Masa Ke Masa", dalam *Jurnal Arkeologi Siddhayatra* 7(2) . Palembang: Balai Arkeologi Palembang.
- Tjandrasasmita, Uka (Editor). 1993. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wolders, M O. 1975. *Het Sultanaat Palembang 1811 – 1825*. 'Gravenhage: Martinus Nijhoff.

PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN SITUS DI SUMATERA SELATAN

Winston Sam Douglas Mambo¹

Abstrak

Benda cagar budaya dan situs di Sumatera Selatan merupakan warisan budaya Sumatera Selatan yang perlu dilestarikan bersama nilai dan tradisi lokal, sehingga bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, kepentingan sosial, pariwisata dan kebudayaan dalam arti luas. Namun, pelestarian dihadapkan pada perbedaan persepsi dan kepentingan yang berujung pada konflik berkepanjangan, sehingga berdampak pada penurunan kualitas benda cagar budaya itu sendiri. Selain itu juga dihadapkan pada perubahan alam dan sosial budaya. Oleh karena itu, diajukan konsep pelestarian yang bertumpu pada kemandirian masyarakat lokal, menggugah aspirasi, dan kerja sama antar-pihak terkait.

Kata kunci : pelestarian, cagar budaya, situs, Sumatera Selatan

I. PENDAHULUAN

Potensi benda cagar budaya dan situs di Sumatera Selatan cukup beragam, mulai dari masa prasejarah, masa Klasik (Hindhu-Budha), masa Islam, dan masa kolonial. Peninggalan masa prasejarah umumnya tersebar di dataran tinggi Sumatera Selatan, terutama dari Kebudayaan Pasemah. Tinggalan masa Klasik berupa bangunan/sisa bangunan candi serta temuan lepas yang berupa prasasti, arca, keramik, benda benda perhiasan dan lain sebagainya. Sedangkan tinggalan budaya masa Islam persebarannya cukup luas sejalan dengan perkembangan agama Islam hingga puncak kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam. Warisan kesultanan terutama berada di pusat Kota Palembang, seperti kawasan Benteng Kuto Besak dan Masjid Agung. Peninggalan masa kolonial ditandai dengan adanya bangunan yang berfungsi untuk kantor serta kawasan pemukiman dengan bangunan tempat tinggal bergaya Eropa. Kehadiran bangunan bercorak Eropa telah menciptakan warna tersendiri, Palembang yang semula identik dengan pusat pelabuhan dagang tradisional kemudian berubah menjadi sebuah kota dengan

citra modern seperti halnya kota-kota besar di Hindia Belanda dan Eropa pada umumnya.

Sejarah budaya Sumatera Selatan sebagian tercermin dari keberadaan situs dan benda cagar budayanya. Inilah sebenarnya yang disebut kekayaan warisan budaya Sumatera Selatan. Suatu kekayaan budaya yang membutuhkan perhatian untuk dilestarikan dan secara bersama-sama juga disandingkan dengan pelestarian budaya lainnya (nilai dan tradisi) sebagai hasil karya cipta masyarakat lokal.

Pelestarian benda cagar budaya dan situs sesuai dengan tujuannya adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya di bidang pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, kepentingan sosial, pariwisata dan kebudayaan dalam arti luas. Namun, dalam mencapai tujuannya sendiri tidak selamanya berjalan lancar, banyak tantangan dan kendala yang dihadapi sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Bahkan, seringkali pelestarian juga dihadapkan pada masalah-masalah perbedaan persepsi dan kepentingan yang berujung pada suatu konflik yang berkepanjangan dan pada gilirannya berdampak pada penurunan kualitas benda cagar budayanya sendiri. Kondisi seperti

¹ Drs. Winston Sam Douglas Mambo adalah Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi dengan wilayah kerja Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka-Belitung.

ini tentu harus disikapi dengan bijak dan dibutuhkan suatu kerjasama serta kolaborasi semua pihak yang terkait (*stake holder*).

II. PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN SITUS DI SUMATERA SELATAN

Pelestarian *benda cagar budaya dan situs* di Sumatera Selatan secara instansional dimulai sejak tahun 1990-an, sejalan dengan dibentuknya Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah (Depdikbud) dengan wilayah kerja Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Sejalan dengan dinamika yang terjadi, nama instansi tersebut kemudian berubah menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi (untuk selanjutnya disingkat BP3 Jambi) dengan wilayah kerja Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. BP3 Jambi saat ini merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Peninggalan Purbakala, Direktorat Jendral Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Jenis dan bentuk benda cagar budaya/situs yang ditangani BP3 Jambi cukup beragam mulai dari masa prasejarah, hindu-buddha, Islam sampai masa kolonial. Dalam kaitan ini ***BP3 Jambi mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, perlindungan, pemugaran, dokumentasi, bimbingan, dan penyuluhan, penyidikan dan pengamanan terhadap peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs, termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di ruangan.*** Khusus benda cagar budaya di wilayah Sumatera Selatan penanganan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, meskipun masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu segera diatasi. Kekurangan tersebut tidak lepas dari perubahan lingkungan alam dan dinamika sosial budaya masyarakat yang terus berkembang. Kedua

faktor dominan tersebut tidak jarang menimbulkan masalah-masalah baru berkaitan dengan upaya pelestarian. Faktor pertama perubahan alam, sebagai contoh dapat dilihat dari semakin terancam dan menyempitnya Situs Percandian Bumiayu-Muaraenim akibat erosi yang terus menerus dari Sungai Lematang. Tentu saja hal ini membutuhkan perhatian serius tidak hanya dari BP3 Jambi tapi semua pihak yang terkait untuk secara bersama-sama mengupayakan penanggulangannya. Faktor kedua akibat perubahan sosial budaya masyarakat, indikatornya dapat dilihat dari semakin menurunnya kualitas benda cagar budaya akibat kurangnya perhatian masyarakat akan pemahaman, penanganan, bahkan dalam pemanfaatan situs dan benda cagar budaya sendiri.

Terlepas dari kekurangan tersebut, secara umum hasil pelestarian di Sumatera Selatan antara lain adalah; terselamatkannya beberapa situs dan benda cagar budaya peninggalan masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Terjaganya situs masa kerajaan Islam di Palembang, seperti Makam Gedingsuro, Makam Sido Ing Rejek, Makam Sabokingking, dan banyak lagi benda cagar budaya dan situs yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan masih terus diupayakan pelestariannya, di antaranya dengan menempatkan juru pelihara sebagai tenaga pemelihara dan penjaga situs. Lebih daripada itu pelestarian juga telah memberi peluang dan manfaat sebesar-besarnya terutama dalam penelitian sejarah budaya Sumatera Selatan khususnya dan nasional pada umumnya. Dalam perkembangan selanjutnya pelestarian juga telah memberi kontribusi di bidang kepariwisataan dengan dijadikannya situs atau benda cagar budaya sebagai salah satu destinasi wisata budaya. Hal ini menunjukkan bahwa pelestarian benda cagar budaya/situs yang dilakukan selama ini tidak bersifat statis hanya membangun romantisme masa lalu, namun lebih jauh adalah membangun masa depan yang menyinambungkan berbagai potensi masa lalu dengan berbagai perkembangan jaman.

III. KENDALA PELESTARIAN SITUS DAN BENDA CAGAR BUDAYA DI SUMATERA SELATAN

Penanganan pelestarian benda cagar budaya/situs di Sumatera Selatan secara umum tidak jauh berbeda dengan penanganan pelestarian di provinsi lain di Indonesia. Dalam satu sisi usaha pelestarian telah mencapai kemajuan dan didukung dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat, sementara pada kenyataan lain menunjukkan bahwa banyak benda cagar budaya di Sumatera Selatan terancam bahaya. Usaha pelestarian yang dilaksanakan tidak jarang bukan terkendala oleh masalah teknis, namun lebih mengarah pada rumitnya perbedaan persepsi dan cara pandang terhadap pelestarian benda cagar budaya itu sendiri. Dalam hal ini pelestarian membutuhkan pemahaman dan persepsi yang sama di antara pihak-pihak terkait. Bagaimanapun juga perbedaan persepsi tersebut tampak dalam indikator seperti berikut:

1. Aspek legal yang amat terbatas dalam melindungi benda cagar budaya dan situs. Belum semua Pemerintah Daerah/Kota menerbitkan peraturan setingkat Perda untuk melindungi keberadaan *situs dan benda cagar budaya* yang berada di wilayah masing-masing.
2. Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kota, dan Kabupaten umumnya *keberadaan benda cagar budaya pada suatu lokasi tertentu* tidak dicantumkan secara tegas. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kejelasan arahan pengelolaan *situs dan benda cagar budaya* sebagai kawasan lindung.
3. Keterbatasan SDM dalam mengelola pelestarian benda cagar budaya dan situs.
4. Masih lemahnya koordinasi dan keterpaduan program antar pihak-pihak terkait dalam penanganan pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya/situs.
5. Keterbatasan dana operasional pelestarian benda cagar budaya.

Oleh karena itu pencapaian persamaan persepsi tentang pelestarian harus diusahakan secara terus menerus dengan sistem koordinasi dan kerjasama yang terencana serta terkelola dengan baik.

IV. PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN SITUS DI PROVINSI SUMATERA SELATAN DI MASA MENDATANG

Menyimak dan mempelajari berbagai permasalahan pelestarian di Provinsi Sumatera Selatan perlu kiranya dibuat konsep Program Pelestarian yang bertumpu kepada kemandirian masyarakat lokal, menggugah aspirasi, dan kerjasama antar pihak terkait. Konsep-konsep tersebut diharapkan dapat memberikan satu solusi persoalan pelestarian. Kebutuhan seperti ini didasari oleh:

1. Pelestarian terhadap situs dan benda cagar budaya merupakan tantangan yang harus melibatkan banyak pihak dan lintas sektoral. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, pelestarian dalam konteks benda cagar budaya diberi makna sebagai upaya-upaya untuk memperpanjang usia benda cagar budaya. Dalam prakteknya di Indonesia pelestarian benda cagar budaya dilakukan melalui upaya inventarisasi-registrasi, dokumentasi, perlindungan, pemugaran, dan pemeliharaan.
2. Pada sisi lain, diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang yang luas kepada setiap Daerah Otonom untuk mengelola segala sumberdaya yang dimiliki, termasuk sumberdaya budaya. Namun, jika pengelolaan sumberdaya budaya (benda cagar budaya) kemudian dilakukan hanya dititik-beratkan pada sudut pandang ekonomi dan target PAD tanpa memperhatikan kelestariannya, maka dikhawatirkan akan terjadi proses degradasi kualitas sumberdaya budaya secara cepat.

3. Dalam dimensi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), benda cagar budaya sebenarnya merupakan aset yang dapat dimanfaatkan untuk masa sekarang dan masa depan tanpa merugikan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan rambu-rambu yang jelas berkaitan dengan pelestarian *benda cagar budaya*. Dengan adanya rambu-rambu yang jelas, maka di satu sisi tujuan pelestarian *benda cagar budaya* akan tercapai dan pada sisi yang lain *benda cagar budaya* dapat dimanfaatkan secara optimal untuk masa kini dan masa yang akan datang. Pelestarian benda cagar budaya dapat juga dengan mengintroduksi fungsi dan kegiatan baru yang tanggap terhadap kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang yang dalam penjabarannya dapat dalam bentuk *adaptive reuse* atau *new uses old buildings*. Upaya-upaya awal yang perlu segera dilakukan:

1. Inventarisasi benda cagar budaya

Inventarisasi terhadap *benda cagar budaya* di wilayah Sumatera Selatan untuk menghimpun *data base* perlu segera dilakukan. Inventarisasi tersebut meliputi pembobotan dan zoning *benda cagar budaya*. Pembobotan *benda cagar budaya* perlu dilakukan karena sangat berkaitan dengan perlakuan dalam pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatannya. Selain itu juga berkaitan dengan pembagian kewenangan pengelolaan antara Pusat dan Daerah. Sebagai contoh misalnya *benda cagar budaya* yang memiliki bobot nasional harus dilestarikan sebagaimana bentuk aslinya dan dikelola oleh Pusat, sedangkan *benda cagar budaya* yang memiliki bobot lokal atau daerah dapat dilestarikan dan dikelola⁴⁾ oleh Daerah.

Pada setiap *benda cagar budaya* juga perlu dilakukan zoning kawasan untuk perlindungan dan pelestarian setempat. Hal

ini perlu dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam *benda cagar budaya* terdapat berbagai bentuk tinggalan yang masing-masing memiliki tingkat kerentanan yang berbeda akibat aktivitas manusia maupun alam. Zoning kawasan ini sekaligus untuk mengatur segala bentuk aktivitas manusia yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam *benda cagar budaya* tersebut.

Valuasi benda cagar budaya

Penilaian ekonomi terhadap *benda cagar budaya* perlu dilakukan untuk mengetahui nilai ekonomi (*economic value*) sumberdaya. Valuasi bukan untuk menaksir harga terhadap nilai data yang dikandungnya, tetapi menaksir nilai manfaat dari sisi ekonomi. Semakin tinggi nilai ekonomi suatu sumberdaya arkeologi maka logikanya semua pihak (kalangan akademik, pemerintah, dan masyarakat) akan semakin peduli terhadap kelestarian sumberdaya tersebut. Dengan demikian yang diperoleh dari valuasi adalah nilai manfaat dari sisi ekonomi jika *benda cagar budaya* tersebut dijadikan sebagai sumberdaya modal atau kapital untuk pemanfaatan dan pengembangan yang berorientasi *economic profit*. Salah satu keuntungan diketahuinya *economic value* suatu sumberdaya adalah dapat dipakai sebagai acuan untuk memperhitungkan modal investasi perlindungan, pelestarian, dan pengembangan sumberdaya tersebut.

2. Status dan perlindungan hukum

Sejak diundangkannya UU RI Nomor 5 Tahun 1992 upaya pencagarbudayaan nasional melalui inventarisasi dan sertifikasi benda cagar budaya dan situs yang terdapat di wilayah hukum RI sudah dilakukan. Namun sertifikasi terhadap *benda cagar budaya* dalam skala lokal maupun nasional belum dilakukan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena

itu, untuk memberikan kepastian status hukum dan perlindungan hukum juga dipandang perlu dilakukan inventarisasi untuk sertifikasi *benda cagar budaya*.

Berkaitan dengan status hukum, maka *benda cagar budaya* yang memiliki bobot nasional setidaknya-tidaknya perlu diberikan sertifikat dengan Keputusan Menteri yang berkompeten. Untuk *benda cagar budaya* yang berbobot daerah diberikan sertifikat dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota atau Perda. Dengan adanya kepastian status hukum maka aparat penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) jika terjadi tindakan pelanggaran hukum berkaitan dengan keberadaan *benda cagar budaya*. Masyarakat juga dapat melakukan "perlawanan hukum" jika terjadi penyalahgunaan *benda cagar budaya* oleh pihak-pihak tertentu.

3. Master plan pelestarian dan pemanfaatan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Penataan Ruang seharusnya *benda cagar budaya* yang merupakan kawasan lindung dan tersebar di berbagai wilayah sudah masuk ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun karena instansi di daerah yang memiliki kewenangan menyusun RTRW umumnya belum memahami/berbeda persepsi mengenai *benda cagar budaya*, maka *benda cagar budaya* belum atau tidak pernah dimasukkan ke dalam peta-peta arahan pengelolaan kawasan. Hal ini mengakibatkan suatu *benda cagar budaya* yang sebenarnya merupakan kawasan lindung yang spesifik akan terancam keberadaannya.

Dimasukkannya *benda cagar budaya* dalam dokumen RTRW baru merupakan langkah awal untuk perlindungan dan pelestarian. Agar *benda cagar budaya* tersebut dapat berdaya guna, di satu sisi tetap terlindungi dan lestari, pada sisi lain

sebagai sumberdaya budaya dapat dimanfaatkan secara optimal maka perlu disusun masterplan pengembangan dan pemanfaatannya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip pelestarian benda cagar budaya. Lebih lanjut prinsip dasar pengelolaan *benda cagar budaya* seyogyanya secara terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan dengan tujuan diperoleh bentuk pemanfaatan jangka panjang yang berkesinambungan (*long-term sustainable*).

4. Kolaborasi Stakeholders

Pasal 18 UU RI Nomor 5 Tahun 1992 antara lain menyatakan bahwa pengelolaan benda cagar budaya dan situs adalah tanggung jawab Pemerintah. Masyarakat, kelompok, atau perorangan berperanserta dalam pengelolaan benda cagar budaya dan situs. Sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut, dalam implementasi jangka panjang idealnya *benda cagar budaya* dilestarikan dan dikelola dengan melibatkan *stakeholders* yang terdiri dari unsur-unsur akademis, pemerintah, dan masyarakat luas, termasuk di dalamnya LSM dan swasta pemilik modal yang memiliki kepentingan dalam pemanfaatan *benda cagar budaya*. Dengan demikian maka akan tercipta sinergi sehingga pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan *benda cagar budaya* dapat menguntungkan semua pihak secara optimal.

V. PENUTUP

Masalah pelestarian bukanlah tanggungjawab institusi tertentu, namun menjadi tanggungjawab semua pihak. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kolaborasi antar pihak dalam mencapai sinergi, sehingga pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan benda cagar budaya dapat menguntungkan semua pihak secara optimal, serta terpenting dapat adaptif dengan dinamika masyarakat tanpa harus mengorbankan nilai-nilai sejarah budayanya.

KETIKA BIDUK MEMBUTUHKAN DERMAGA : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN WARISAN BUDAYA

Yudhy Syarofie¹

Abstrak

Kebudayaan bersifat dinamis, sehingga nilai-nilai budaya mengalami pergeseran. Kekuatan masyarakat untuk mempertahankan, melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya saat ini dalam keadaan kritis karena kegagalan transformasi budaya generasi sebelumnya serta kegagalan generasi kini membangun kebudayaan yang sesuai dengan jatidiri bangsa. Hal itu diperparah oleh kebijakan Pemerintah yang mengutamakan kepentingan ekonomi dan menafikan kepentingan politik kebudayaan. Sementara itu, kota Palembang memiliki kekhasan budaya, baik material maupun non-material, yang terbentuk sejak zaman pra-Sriwijaya sebagai cara adaptasi kehidupan tepian sungai. Pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya kota Palembang memerlukan pemberdayaan masyarakat, tetapi sebelumnya diperlukan pemberdayaan Pemerintah karena selama ini Pemerintah belum memiliki political will dalam pembangunan kebudayaan. Hal itu terbukti dari kasus-kasus perusakan warisan sejarah dan budaya di kota Palembang yang berjalan dengan sukses karena kepiawaian Pemerintah mereduksi persoalan. Langkah-langkah perbaikan harus dilakukan, sehingga terwujud Pemerintah dan masyarakat sadar budaya. Langkah pertama adalah koordinasi antar-dinas dan lembaga Pemerintah Daerah dan kemudian koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan instansi luar yang berhubungan dengan sejarah, arkeologi, nilai budaya, nilai tradisi, dan lingkungan. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya akan tumbuh dengan sendirinya dari dalam masyarakat

Kata kunci : pemberdayaan masyarakat, pelestarian, pemanfaatan, warisan budaya

KEBUDAYAAN DAN MASYARAKAT BUDAYA

Tak dapat dielakkan, dalam kemajuan teknologi pada era globalisasi—dengan serba-less-nya, yaitu *wireless*, *paperless*, hingga menuju *borderless*—saat ini, dunia menjadi tiada batas. Batas wilayah negara dengan bangsa di dalamnya, kini tak lebih dari sekadar batas administratif. Masuknya budaya luar, dengan segala nilai dan sistemnya, menjadi suatu keniscayaan. Apa yang dahulu dinilai tabu—dengan sudut pandang nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia—dan tidak layak diikuti, dengan mudahnya

menjelma dalam bentuk perilaku bangsa ini. Sesuatu yang sesungguhnya bermakna *alien* (*asing*) bagi bangsa ini, serta-merta menjadi sesuatu yang sedemikian akrabnya.

Dalam kehidupan, terjadi proses sosial yang berjalan secara alamiah. Proses ini kemudian berkembang ke berbagai arah karena sifat kehidupan yang dinamis. Dinamika kehidupan pada dasarnya adalah dinamika kebudayaan juga sebab kebudayaan merupakan produk dari sebuah kehidupan. Jika kemudian budaya berkembang menjadi sesuatu yang positif ataupun negatif, semua tak terlepas dari proses sosial yang berlangsung itu. Dalam tiap proses inilah, terbentuk nilai-nilai, meskipun—

¹ Yudhy Syarofie, S.Pd. adalah budayawan, jurnalis dan redaktur yang bekerja di Harian Umum *Sriwijaya Post*, Palembang.

terutama bagi masyarakat tradisional— sikap dan perilaku sosial itu tidak disadari sebagai sebuah nilai. Begitupun ketika nilai-nilai itu tumbuh, berkembang, bergeser, atau justru hilang tanpa disadari.

Karena setiap kebudayaan memiliki dinamika, tidak dapat tidak, semuanya turut berkembang. Perkembangan ini bersumber dari faktor dalam (internal) dan faktor luar (eksternal). Kedua faktor ini, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mendorong terjadinya perubahan ataupun pergeseran sistem dalam budaya. Faktor dalam antara lain disebabkan oleh adanya pertukaran generasi yang dihadapkan pada kebutuhan baru dalam proses adaptasi, bencana alam yang mendorong adanya penyesuaian kembali, perubahan dan pemiskinan lingkungan, serta perkembangan hasil pemikiran. Sedangkan faktor luar, antara lain adanya kontak kebudayaan, baik melalui perdagangan, pendidikan, maupun misi kebudayaan yang merangsang munculnya pemikiran baru (S. Budisantoso, 1983).

Mengenai penerimaan yang berakibat kepada perubahan tata nilai dan sistem budaya ini, Fuad Hassan (2003) mengatakan, “Dalam pertemuan antarbudaya, pihak yang didukung teknologi canggih lebih berfungsi sebagai pengalih (*transmitter*) nilai-nilai kebudayaan dan norma-norma kemasyarakatan, sedangkan pihak yang terkebelakang dalam penguasaan teknologi, cenderung menjadi penerima (*receiver*).”

Posisi yang demikian — bangsa kita termasuk *receiver* — mau tidak mau menjadikan kita tak lebih dari objek peralihan tata nilai dan norma asing. Lebih lanjut, Fuad Hassan mengatakan, “Pertemuan antarbudaya bisa mengakibatkan timbulnya heteromoni dalam suatu masyarakat dan sebagai konsekuensinya, kian melonggar pula konformisme perilaku seiring dengan terjadinya reorientasi pada nilai kebudayaan dan norma kemasyarakatan umumnya.”

PERGESERAN DAN DINAMIKA

Kebudayaan tepian sungai, tampaknya merupakan istilah yang paling cocok ditujukan bagi rakyat Palembang. Hingga saat ini, meskipun transportasi di kota ini dominan di wilayah daratan, sungai — pada masa lalu merupakan sarana transportasi utama — tetap memegang peran penting.

Tentu, telah terjadi pula pergeseran jika kebiasaan — dalam konteks kekinian — hidup keseharian itu dilihat pada keseluruhan masyarakat urban di Palembang saat ini. Hal itu terkait dengan perkembangan wilayah pemukiman, yang menyebar hingga jauh ke “darat”. Bahkan, masyarakat yang selama era 1980-an ke bawah mendiami lebak, kini tetap berdiam di lebak tetapi lahannya telah *ditembok* atau ditimbun. Kondisi ini, tidak dapat tidak, arus diakui sebagai konsekuensi logis dari perkembangan masa, yang beriringan dengan perkembangan serta pergeseran tatanan budaya, sosial, ekonomi, dan politik (dalam hal ini, terkait kebijakan Pemerintah).

Pergeseran yang terjadi akibat adanya pengaruh luar, terutama Barat, dalam kehidupan masyarakat perkotaan — bahkan tidak mustahil, juga terhadap masyarakat pinggiran — adalah sebuah keniscayaan. Hal ini terkait dengan kepesatan teknologi — terutama teknologi komunikasi dan informasi — dunia. Faktor ini pun merupakan suatu keniscayaan, tidak dapat ditolak, dan tidak terbantah. Semua orang pun sadar, penolakan terhadap kemajuan adalah sebuah kekonyolan.

Dengan sifat dinamis kebudayaan, tidak dapat dilakukan penolakan terhadap budaya luar sekalipun penilaian yang diberikan kepada “anasir baru” itu adalah negatif. Selain itu, ada pandangan bahwa nilai budaya di semua belahan dunia itu bersifat universal. Dua antropolog, F. Kluckhohn dan Strodtbeck pada tahun 1961 telah menyusun satu kerangka universal yang menjadi tingkat orientasi dari semua sistem nilai budaya di dunia. Salah satu kerangkanya adalah hakikat pembawaan hidup manusia seperti berbuat jahat, biasa, atau kombinasi jahat dan baik. Ada pula konsep antropologi, yaitu tahap kenisbian kebudayaan

(*culture relativision*). Aliran ini memandang bahwa kebudayaan tidak ada yang baik dan juga tidak ada yang buruk. Semua tergantung dari cara orang atau kelompok orang memandangnya.

Dalam konteks kebangsaan (*nation*), nilai-nilai budaya sesungguhnya telah “lahir” lewat tradisi yang berkembang dalam kelompoknya. Nilai-nilai budaya inilah yang selanjutnya membentuk identitas budaya. Lebih jauh lagi, nilai-nilai yang hidup dalam kelompok masyarakat ini menjadi pembangun karakter (*character building*) bangsa.

Pada dasarnya, kebudayaan adalah sesuatu yang tertanam dan berkembang dalam pikiran, perilaku dan tindakan, serta benda-benda yang dihasilkan sebagai karya kelompok masyarakat tertentu. Menurut Parsudi Suparlan (1983), kebudayaan dapat dideskripsikan sebagai makna dari benda, tindakan dan peristiwa dalam kehidupan sosial, dalam pandangan mereka yang menjadi pelakunya. Dalam perwujudannya, kebudayaan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu; (1) apa yang mereka lakukan; (2) apa yang mereka ketahui; dan (3) benda apa yang digunakan dalam kehidupan. Benda apa yang digunakan oleh para pendukung kebudayaan tersebut, dapat diberi makna.

Senada dengan itu, Koentjaraningrat (1985) mengatakan bahwa paling sedikit terdapat tiga wujud kebudayaan. Yaitu (1) wujud sebagai kompleks cita-cita, gagasan, konsep, serta pikiran manusia yang disebut dengan sistem budaya (*culture system*); (2) wujud sebagai kompleks aktivitas sikap tindak, perilaku yang saling berinteraksi dalam masyarakat yang disebut sistem sosial (*social system*); dan (3) wujud sebagai benda-benda fisik hasil karya manusia yang disebut kebudayaan fisik (*material culture*).

Sedangkan para ahli sosiologi hukum, cenderung membagi budaya masyarakat dalam tiga stratifikasi budaya yang meliputi (1) budaya masyarakat yang berada di lingkungan yang sesuai dengan budaya masyarakat pada umumnya (*sub-culture*); (2) budaya masyarakat yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat

pada umumnya (*counter culture*); dan budaya masyarakat yang berada pada posisi peralihan (*transition culture*).

Pada posisi ini, di manakah sebetulnya masyarakat Palembang, terutama yang telah terbentuk sistem budayanya sebagai masyarakat tepian sungai? Terutama, bagaimana sikap mereka terhadap produk budaya yang dihasilkan dan seharusnya dipertahankan, baik yang bersifat konkret (*tangible*) berupa kebudayaan fisik maupun budaya yang bersifat absurd (*intangible*), berupa hasil pendidikan, tradisi, dan adat istiadat..

Kekuatan masyarakat untuk memertahankan, melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya yang telah terbentuk dalam proses selama ratusan tahun itu, saat ini dapat dikatakan pada posisi yang sangat kritis. Kondisi ini merupakan suatu hasil dari kegagalan transformasi budaya dari generasi sebelumnya. Ketika fondasi nilai (yang seharusnya dibangun) generasi pendahulu belum begitu kukuh, generasi selanjutnya telah dihadapkan pada persoalan penerimaan sistem nilai dan budaya baru. Akibatnya, kearifan lokal (*local genius*) yang seharusnya menjadi dasar bagi pengembangan nilai selanjutnya tak lagi berperan karena memang tidak ada. Harus diakui, kondisi ini sesungguhnya lebih disebabkan oleh persoalan bagaimana para penerima serapan budaya itu dapat memilah dan memilih mana yang baik mana yang benar, mana buruk mana yang salah (Yudhy Syarofie, 2002).

Ketika berbicara mengenai kondisi masyarakat serupa ini, tentu tak terlepas dari beragam faktor yang melingkupinya. Persoalan politik ekonomi dan “ekonomi politik” yang lebih sering berbanding terbalik merupakan faktor utama yang membuat kondisi ini semakin parah. Ketika sebagian komponen bangsa berteriak lantang mengenai pentingnya membangun karakter yang berkualitas — dalam pengertian memiliki kepekaan budaya yang tinggi (*high culture sensitivity*) dan jatidiri

bangsa yang kukuh (*strong national identity*) — perangkat (dalam hal ini, Pemerintah) yang seharusnya menjadi penyokong “pembangunan” itu, justru bertindak sebaliknya. Kepentingan politik ekonomi dominan menafikan kepentingan politik kebudayaan.

Yang dimaksudkan dengan politik ekonomi dan politik kebudayaan di sini adalah dua hal yang seharusnya berjalan — dalam ukuran yang relatif — selaras dan seimbang. Jika kebudayaan merupakan produk kehidupan, ekonomi merupakan bagian dari kebudayaan. Sementara politik ekonomi dan politik kebudayaan adalah bagaimana konsep, kiat, visi, misi, dan sebagai “perangkat lunak” yang melengkapi “kekuatan” Pemerintah — sebagai pengambil kebijakan — dalam melangkah.

IDENTIFIKASI KEBUDAYAAN TEPIAN SUNGAI

Seperti telah dituliskan terdahulu, dapat dikatakan bahwa *wong Palembang* adalah *wong sungi*. Sejak zaman dahulu, diperkirakan jauh sebelum masa Kerajaan Sriwijaya (abad VII-XIII M.), segala aktivitas kehidupan berada di wilayah tepian air. Hal ini dapat dilihat pada hasil temuan peneliti dari Balai Arkeologi Palembang. Pada penelitian arkeologi yang berlangsung pada 2001-2005 di kawasan Karangagung Tengah, Musi Banyuasin, itu, tim peneliti menemukan sekurangnya 21 lokasi (bekas pemukiman). Berdasarkan penelitian terhadap tiang-tiang kayu dan tapak —kini menjadi areal persawahan—itu, usianya diperkirakan sekitar 1.600 tahun atau ada pada abad V M (*Sriwijaya Post*, 2006).

Selain menemukan bekas pemukiman, tim peneliti juga menemukan perlengkapan hidup, termasuk perhiasan. Dengan demikian, patut diduga tapak ini merupakan bekas pemukiman yang lebih tua usianya daripada Kerajaan Sriwijaya. Patut pula diduga, kawasan sepanjang aliran Sungai Musi dan kawasan pesisirnya sudah didiami pada masa itu, dan masa-masa sebelumnya.

Ada dua hal yang dapat diambil dari hasil temuan ini. Pertama, memperkuat teori bahwa Kerajaan Sriwijaya memang berada — paling tidak, didirikan — di Palembang. Asumsinya, sangatlah beralasan bagi Dapunta Hyang, yang membawa 20.000 pengikut (*Catatan George Coedes 1930; 1989*), untuk mendirikan wanua atau negeri di wilayah Palembang dengan kondisi ini. Retorika awam tentang hal ini adalah, “Apakah mungkin seorang maharaja mendirikan kerajaan di daerah tak berpenghuni?” Kedua, hasil penelitian itu juga menunjukkan bahwa budaya tepian sungai (pesisir) di daerah ini memang sudah berlangsung sejak masa awal abad Masehi.

Aktivitas yang berlangsung selama berabad-abad itu dengan sendirinya membentuk sistem budaya tersendiri. Seperti halnya Mesopotamia (Irak) dengan Sungai Eufrat dan Tigris, Mesir dengan Sungai Nil, India dengan Sungai Gangga, dan Cina dengan Sungai Kuning, kehidupan masyarakat tepian sungai ini merupakan pembentuk peradaban. Hal itu dimungkinkan oleh interaksi antarbangsa yang memungkinkan terjadinya pertukaran kebiasaan, yang kemudian membentuk sistem budaya sendiri, dari yang sudah ada sebelumnya.

Akan halnya Palembang, berdasarkan catatan-catatan para saudagar asing, merupakan pusat perdagangan yang ramai. Kondisi ini berlangsung berabad-abad, termasuk pula dengan keberadaannya sebagai pusat pendidikan agama Budha pada masa Sriwijaya dan pusat pendidikan agama Islam (dan sastra Melayu pada masa Kesultanan Palembang Darussalam). Kerapatan hubungan dengan bangsa asing —terutama Arab, Cina, dan India — juga merupakan bagian dari perkembangan sejarah kota ini. Salah satunya, izin yang diberikan Sultan Mahmud Badaruddin I Jayo Wikramo bagi asing, termasuk bangsa Arab, untuk mendirikan bangunan bangunan di wilayah darat pada tahun 1700-an (Retno Purwanti, 2006). Sebelumnya, saat Kemas Hindi Pangeran Aryo Kesumo Abdurrohim mengangkat diri sebagai Sultan bergelar

Abdurahman Khalifatul Mukminin Syaiful Imam dan memindahkan keraton ke Beringin Janggut pada tahun 1662 M, bangsa asing tidak diperkenankan berdiam di wilayah darat.

Hal utama pada kebudayaan tepian sungai adalah eksistensi sungai sebagai tempat tinggal dan prasarana transportasi utama, dengan sarananya berupa kapal atau peahu. Hal ini terlihat pada catatan Chau Ju-kua dan Ma Huan, dengan *Ying-yai-sheng-lan-chiao-chu*, dalam Djohan Hanafiah (1995), yang menggambarkan kondisi pemukiman di Palembang pada abad XII dan XIII. Dalam deskripsinya, kawasan adalah kawasan yang dikelilingi air dan rumah rakyatnya berbentuk rakit.

Soal kedekatan dengan air ini, juga dituliskan O.W. Wolters tentang pemakaian perahu di Kesultanan Palembang Darussalam dan Alfred Wallace Russel dalam Djohan Hanafiah (1995). Russel menuliskan kondisi rakyat Palembang pada abad XIX, penduduknya adalah Melayu tulen, yang tak akan pernah membangun sebuah rumah di atas tanah kering selagi mereka masih melihat dapat dapat membuat rumah di atas air, dan tak akan pergi ke mana-mana dengan berjalan kaki, selagi masih dapat dicapai dengan perahu.

Dengan kondisi ini, dapat dikatakan, semua bentuk tinggalan budaya Palembang berada di wilayah tepian air. Hingga kini, warisan — baik dalam bentuk bangunan maupun warisan non-fisiknya — sebagian besar berada di sepanjang tepian Sungai Musi, paling kurang sepanjang 15 km (sesuai batas administratif Kota Palembang).

WARISAN BUDAYA

Jika pengidentifikasian warisan budaya itu dilakukan berdasarkan klasifikasi, akan terlihat suatu pola tertentu. Yang dimaksud di sini adalah warisan budaya yang kini masih tampak, mulai dari masa Kerajaan Sriwijaya hingga masa kolonial. Pembagiannya dilakukan berdasarkan wilayah Ilir dan Ulu (Seberang Ilir dan Seberang Ulu), yang dirunut berdasarkan

urutan nama kampung.

Warisan budaya itu meliputi;

- a. bangunan;
- b. makam;
- c. tradisi (bersifat non-fisik) seperti kitab dengan aplikasi budayanya, dongeng, denggung, cangkriman, dan permainan rakyat;
- d. sandang khas;
- e. pelengkap papan khas; dan
- f. makanan khas (wisata boga).

Dimasukkannya sandang, pelengkap papan, dan makanan khas ini tidak hanya karena ketiga hal itu merupakan warisan budaya tetapi juga merupakan sektor penting bagi kepariwisataan. Terutama, untuk perjalanan wisata sungai yang selama ini dikenal sebagai *Musi Tour*. Selain itu, keberadaan tiga hal yang khas ini sesungguhnya dapat saja dijadikan bahan kajian untuk merunut kondisi sosial ekonomi para pengemban budaya (*culture bearer*)-nya.

Sebagian dari kompleks pemakaman dan perkampungan tepian sungai — termasuk rumah ibadah — di kota ini telah diteliti oleh Balai Arkeologi Palembang pada tahun 1996. Sementara makanan, tradisi khas, barangkali baru berbentuk tulisan-tulisan lepas dalam bentuk artikel di media massa cetak, terutama surat kabar.

Identifikasi terhadap semua warisan budaya di tepian Sungai Musi yang “terserak” karena sedemikian kayanya itu tidak akan dibahas secara khusus dalam makalah ini. Hanya, yang perlu diperjelas adalah konsep pemberdayaan bagi masyarakat, baik yang terkait langsung (sebagai ahli waris akibat pertalian darah) maupun tidak langsung (sebagai bagian dari masyarakat budaya) terhadap pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya itu.

PEMBUDAYAAN PEMERINTAH SEBELUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

“Pembudayaan Pemerintah sebelum pemberdayaan masyarakat”, barangkali

terdengar sarkastis. Namun harus diakui, konsep dan pola pembinaan terhadap masyarakat selama ini dapat dikatakan sangat kurang — sebagai eufemisme dari frasa tidak ada sama sekali — terhadap rakyat (masyarakat)-nya. Hal yang lebih memiriskan hati adalah tidak satu katanya instansi, institusi, dan lembaga di pemerintahan (daerah) terhadap pembangunan kebudayaan. Dengan kata lain, Pemerintah tidak memiliki *political will* yang diharapkan dapat menjadi motivator bagi pembangunan di bidang kebudayaan ini.

Dalam satu dasawarsa saja, Pemerintah di daerah ini merencanakan tiga “perusakan” terhadap tinggalan sejarah budaya di Kota Palembang. Pada tahun 1997 — sebetulnya sudah direncanakan sejak tahun 1993 — Pemerintah Kotamadya (kini Pemerintah Kota) Palembang mengeluarkan kebijakan untuk membongkar Kompleks Pemakaman Kambang Koci di kawasan Pelabuhan Boom Baru, 3 Ilir. Sesuai perencanaan, areal seluas 1.392 meter persegi — setelah dikurangi bagian terbesarnya semasa pemerintahan Belanda pada tahun 1924 dan pihak PT Pelindo pada tahun 1974 — itu akan dijadikan areal penumpukan peti kemas (*container field*). Karena satu dan lain hal, termasuk pecahnya reformasi pada Mei 1998, rencana pembangunan *container field* itu dibatalkan sementara sebagian pagarnya — berdasarkan perjanjian tahun 1975, pemeliharaan dan perawatannya menjadi tanggung jawab PT Pelindo sebagai kompensasi “pemotongan” lahan — sudah telanjur dirusak.

Peristiwa kedua adalah rencana pembangunan pusat perbelanjaan (semacam plaza atau mal) di lokasi eks-Markas Komando Daerah Militer (Madenpom) II Sriwijaya pada tahun 2002-2003. Lagi-lagi atas nama pembangunan, tidak ada pertimbangan aspek sejarah dan budaya pada rencana ini. Gedung, yang sebelumnya juga merupakan kantor restriksi karet pada masa penjajahan Belanda, itu merupakan bagian dari situs Benteng Kuto Besak. Atas desakan komponen masyarakat berbudaya, rencana itu tampaknya terhambat.

Akibat terjadinya pergantian kepala daerah pada Mei 2003, rencana ini pun hilang tertiuip angin.

Pergantian pemerintahan di daerah — gubernur dan walikota — ini, tampaknya tidak juga mengubah pandangan mengenai “kepentingan ekonomi di atas segalanya”. Sekitar September 2005, masyarakat berbudaya — istilah yang dipakai untuk membedakannya dengan masyarakat yang belum memiliki kesadaran budaya — kembali dikejutkan dengan rencana Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemkot Palembang, yang dalam bahasa Jawa disebut *ujug-ujug*. Saat itu, pihak Kecamatan — berikut Camatnya — Ilir Timur (IT) II mengumpulkan warga Kutobatu di Balai Kecamatan. Agendanya, membicarakan rencana pembebasan sekaligus ganti rugi tanah dan bangunan di kawasan itu. Tanah warga, menurut rencana, akan dijadikan lahan pendirian Jembatan Musi III. Beberapa hari kemudian, acara serupa juga diadakan di Kelurahan 13 Ulu, melibatkan warga yang mendiami Kampung Al-Munawar. Dua pertemuan itu didahului dengan pemberian tanda berupa titik-titik dengan cat untuk lokasi pengeboran.

Warga Kutobatu dan Al Munawar — termasuk masyarakat berbudaya lainnya — tentu saja kaget bukan alang kepalang. Palsunya, pihak yang mengajak berdialog itu menyebut diri sebagai konsultan. Pihak konsultan — konon dari Jakarta — ini juga mengaku telah melakukan survei, termasuk sosialisasi kepada masyarakat setempat. Termasuk, ikut sebagai jemaah shalat Jumat. Anehnya, tak satu pun warga mengenal sang konsultan. Hal yang lebih aneh lagi dalam peristiwa ini, survei lahan — kelayakan untuk pendirian tiang pancang — hingga kini ternyata belum pernah dilakukan, sementara konsultan ngotot menyatakan bahwa tidak ada lokasi lain yang cocok untuk pendirian jembatan itu. Sementara pihak Pemerintah, tampaknya lebih memilih pendapat konsultan.

Tiga peristiwa ini sempat mengemuka sehingga warisan sejarah dan budaya itu

sedikitnya mendapat pembelaan. Sebagai catatan, berdasarkan catatan, pemukiman Arab pertama yang dibangun di kawasan darat pada tahun 1700-an, diperkirakan berada di kawasan Kutobatu. Di kampung ini, setidaknya ada tinggalan empat unit rumah bertipe *Indies*, dengan arsitektur utama bergaya Palembang-Melayu. Ini merupakan rumah milik Habib Syekh bin Ahmad, yang diyakini orang pertama yang mendiami kawasan itu, beserta keturunannya. Di samping itu, adanya aliran sungai yang sengaja dikondisikan mengelilingi kampung, yaitu Sungai Musi, Sungai Jeruju, Sungai Bayas, dan satu sungai buatan yang kini dikenal sebagai Lorok Sunggoro, menampakkan tipikal pemukiman masa lalu.

Sementara Kampung Al-Munawar, meskipun hasil penelitian Balai Arkeologi Palembang (1996) menyatakan bahwa tujuh rumah di kawasan itu belum diketahui tahun pembangunannya, dapat diambil simpulan sementara bahwa pembangunannya pada periode awal tahun 1800-an. Hal ini didasarkan pada tipe *Indies* yang tampak pada semua bangunan. Selain itu, berdasarkan catatan, setelah menaklukkan Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1821, Belanda mulai memberikan izin kepada bangsa Arab, Cina, dan India untuk mendirikan rumah di wilayah darat. Pembangunan perkampungan itu diperkirakan mulai dilaksanakan pada tahun 1823-1824, setelah Belanda gagal membangun semacam kantor di kawasan Seberang Ulu dan mengambil alih Keraton Kecil atau Keraton Lamo (kini Museum SMB II dan Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang), setelah terlebih dahulu membongkar dan menghancurkannya. Selain itu, Belanda mengangkat pemimpin kaum dari bangsa Arab (kini rumahnya di Jl. K.H. Azhari 13 Ulu, di bagian depan Kampung Al-Munawar), Cina (Kampung Kapitan 7 Ulu), dan India. Khusus India, kini tidak ada lagi peninggalannya. Namun diperkirakan, di kawasan Ogan, yaitu di belakang Pasar Kertapati dan 8 Ilir, di sekitar Gereja Kristen Pantekosta di Indonesia, dekat Jeramba Geledak (*Catatan Pribadi R.M.*

Hoesin Natodiradjo).

Perusakan yang tidak sempat diketahui pada masa sekarang, adalah pembongkaran gedung eks-Hotel Sehati/Bar Topaz di dekat Kambang Iwak (besar). Berdasarkan ketentuan yang disyaratkan dalam UU No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, bangunan peninggalan Belanda itu sudah memenuhi kriteria sebagai Benda Cagar Budaya. Pada masa lalu, bangunan itu merupakan salah satu hotel top. Berdasarkan catatan, hotel ini merupakan tempat menginap bangsa Eropa, terutama tahun 1930-an. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kerusakan itu? *Wallahu alam bissawab*.

MEREDUKSI PERSOALAN SEBAGAI SENJATA

Saat terjadi benturan kepentingan antara “memajukan” ekonomi dengan memertahankan warisan budaya, pihak-pihak yang berkepentingan selalu sulit menemukan titik temu. Pasalnya, cara pandang masing-masing pihak selalu dari sudut yang berbeda. Maka, yang keluar sebagai “senjata” awal adalah, “proyek dalam rangka...” atau “demi kemajuan...”. “Senjata” ini kemudian berlanjut dengan “peluru” berikutnya, yaitu kepiawaian dalam mereduksi persoalan.

Hal ini dapat dilihat pada kasus per kasus yang mengancam keberadaan warisan budaya di kota ini. Saat merencanakan pembangunan *container field* di areal Kompleks Pemakaman Kambang Koci, Pemerintah beralasan bahwa peningkatan arus bongkar muat barang di Pelabuhan Boom Baru sudah sangat tinggi. “Demi kemajuan dan kelancaran arus keluar masuk barang di Kota Palembang, dibutuhkan perluasan lahan penumpukan peti kemas.” Karena ada penentangan, mulai diembuskan wacana, yang bertujuan mereduksi persoalan. Tokoh-tokoh agama diundang untuk membicarakan “Bagaimana hukum—halal atau haram—pemindahan jasad dari makamnya”.

Saat muncul rencana pembangunan pusat perbelanjaan di lahan eks-Madenpom, wacana

yang muncul adalah “Dalam rangka memajukan kawasan wisata sekaligus kawasan bisnis, gedung tua ini (maksudnya gedung Madenpom) perlu dialihfungsikan”. Ketika muncul aksi penentangan, pihak perencana mulai mengangkat wacana mengenai ciri khas daerah. Sehingga, muncul pendapat “Agar kita memiliki kekhasan, sekaligus memertahankan ciri Palembang, pusat perbelanjaan yang dibangun itu harus diberi sentuhan daerah. Misalnya, atap bangunan dibuat menyerupai atap rumah limas”. Nyatanya, hingga sekarang tidak satu pun bangunan pusat perbelanjaan dan mal, termasuk ruko — yang memenuhi kota sehingga membuat Palembang mengarah kepada “kota kotak sabun” — diwajibkan menampilkan ciri khas daerah itu. Saat pro-kontra terhadap rencana ini berlangsung “panas”, seorang pejabat daerah mengkonter pendapat mengenai usia benda cagar budaya (50 tahun) dengan kata-kata, “Kalau begitu, rumah nenek saya juga cagar budaya karena sudah lebih dari 50 tahun.”

Hal yang sama terjadi saat muncul rencana pembangunan Jembatan Musi III. Proyek “dalam rangka....” yang dimunculkan adalah “dalam rangka mengurangi kemacetan arus lalu lintas dan memajukan pariwisata....” Untuk mengurangi kemacetan, bersifat *debatable*. Soalnya, hingga kini ruas Jl. Jenderal A. Yani di kawasan 13 Ulu — depan Kampus Universitas Muhammadiyah Palembang an depan lorong menuju Universitas PGRI Palembang — merupakan salah satu titik macet yang parah pada jam-jam tertentu. Apakah tidak mungkin, jika kawasan itu menjadi pangkal jembatan, yang berarti menambah dua arus — sangat mungkin empat arus jika bagian bawahnya juga merupakan ruas jalan — justru menambah tingkat kemacetan. Dengan demikian, Pemerintah sangat berhasil memindahkan kemacetan dari kawasan Seberang Ilir ke Seberang Ulu.

Untuk alasan kepariwisataan, jelas logikanya terbalik. Pemikiran bahwa dengan jembatan yang modern dan setara konstruksi jembatan di negara maju bakal mengundang

wisatawan, jelas patut dipertanyakan. Sebab, ukuran yang dipakai adalah sebagai warga penerima arus peralihan tata nilai dan produk kebudayaan (*receiver*) yang terkagum-kagum kepada negara maju sebagai pengalih (*transmitter*). Ketika berharap wisatawan asal *transmitter* akan mengagumi hasil alih teknologi itu, justru konyol.

Alasan khusus yang dipakai untuk Kampung Kutobatu adalah “kondisinya kumuh” sehingga harus ditata dan warga sebaiknya bersedia direlokasi. Istilah ditata dan relokasi ini tampaknya senjata yang selalu dipakai dalam berbagai kesempatan pengurusan. Setelah Kutobatu, alasan yang sama — minus kumuh — dipakai untuk Al-Munawar. Rumah-rumah dan bangunan bersejarah di kampung itu akan direlokasi dan Pemerintah akan menyiapkan lahannya. Dari pemberitahuan pertama yang menyatakan bahwa hanya satu rumah yang terkena megaprojek Musi III, akhirnya bergeser pada pernyataan satu rumah akan dipertahankan.

Jargon yang telah lama “hilang”, muncul kembali. Yaitu, “Pembangunan memang butuh pengorbanan”, “Nenek moyang kita rela mengorbankan jiwa raga demi negara ini. Sebagai warga negara, tak ada salahnya kita korbankan rumah dan tanah demi negara”, “Jika pembangunan itu akan mengenai rumah dan tanah saya, akan saya berikan tanpa meminta ganti rugi”. Masih banyak lagi kalimat persuasif yang dipakai tetapi tidak satu pun yang menyentuh esensi masalahnya, bahwa bangunan yang akan dikorbankan itu merupakan aset sejarah dan budaya bangsa yang harus dipertahankan kelestariannya.

Eufemisme gaya Orde Baru, yaitu istilah “bantuan” juga menjadi andalan. Jika Jembatan Musi III tidak jadi dibangun, maka pemberi bantuan dari Jepang, yaitu JBIC, akan mengalihkan dananya untuk pembangunan jembatan di provinsi lain. Padahal, uang bernilai ratusan miliar itu sama sekali bukan hibah (*grantie*) melainkan utang (*loan*). Betapa pun lunaknya sifat utang, berapa pun kecil bunganya, betapa pun ringan cara mencicilnya,

tetap harus dibayar.

Ada lagi pendapat yang disampaikan untuk mendukung program Pemerintah ini. Ada tokoh yang secara naif menafsirkan situs dan benda cagar budaya dalam UU No. 5 Tahun 1992. Bahwa situs tidak boleh diganggu, sementara benda cagar budaya boleh dipindah. Untuk itu, harus dibentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai elemen. Sekarang, cobalah tengok bekas Museum Rumah Bari, yang dipindahkan ke Museum Balaputera Dewa karena lahan tempatnya "berdiri" dahulu, dijadikan halaman parkir DPRD Palembang.

PEMERINTAH DAN MASYARAKAT SADAR BUDAYA

Ancaman kehilangan bagi masyarakat bukan hanya warisan budaya bersifat fisik serupa bangunan, kompleks makam, atau perkampungan yang semuanya bersifat kuno. Sekarang pun, kehilangan serupa ini sesungguhnya sudah terasa. Di masyarakat Palembang, termasuk masyarakat Sumsel secara umum, tidak banyak lagi yang melaksanakan tradisi, yang pada masa lalu merupakan aktivitas keseharian. Misalnya, tidak banyak lagi orangtua yang men-dengung (tembang menidurkan anak), tidak ada lagi anak-anak yang bermain *cangkriman* (teka-teki) sebagai sarana permainan, juga jarang terdengar kakek dan nenek mendongeng kepada cucunya untuk memberi pelajaran hidup.

Hal serupa juga terjadi pada makanan, yang sekian lama menjadi kekhasan daerah ini. Pertanyaannya, ke mana 146 jenis makanan khas Palembang, yang dibuat hanya dari tiga bahan baku, yaitu tepung beras atau ketan, kelapa, dan gula, itu? Ke mana para gadisnya, yang pada masa lalu mengisi waktu sore meng-gilis *peleting* (semacam gulungan benang berbentuk serupa stik) untuk benang emas atau benang pakan untuk menenun songket? Ke mana para jejaka yang seusai shalat Isya belajar pencak? Ke mana pula kaum dewasa yang biasa mengkaji kitab-kitab tinggalan ulama

Palembang dalam acara *cawisan* usai shalat Subuh atau Ashar. Barangkali, semua kehilangan itu akan menjadi catatan sejarah untuk sebagian orang dan nostalgia untuk sebagian yang lain.

Ini adalah kehilangan yang tak terasa. Kalaupun harus digali kembali, tentu bukan perkara mudah. Program paling mudah adalah sekadar mengangkat kembali semangatnya. Soalnya, di balik tradisi itu, ada nilai yang ingin ditanamkan. Tinggal lagi, bagaimana cara membangkitkan semangat itu. Salah satunya, menjadikan tradisi ini sebagai muatan lokal dalam pendidikan, mulai jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

Tentu saja butuh kerja ekstra keras untuk mengembalikan, atau paling kurang, membangkitkan kembali semangat tradisi. Namun, bukanlah hal yang sukar untuk menjaga sesuatu yang masih ada. Sebagai contoh, warisan budaya yang masih ada hingga saat ini, baik berupa bangunan, makam, perkampungan, ataupun kawasan penghasil sandang, pangan, dan pelengkap papan khas di Kota ini. Untuk memelihara semua itu, dibutuhkan kemauan semua pihak, baik Pemerintah maupun rakyatnya.

Pemerintah, dapat memprogramkan usaha pelestarian, sekaligus pemanfaatan warisan budaya ini dengan melibatkan masyarakat pendukung kebudayaan itu. Dari pihak Pemerintah, usaha yang dilakukan merupakan program lintas sektoral — karena berdasarkan *job description* insitusi dan lembaga di birokrasi tampak berbeda, tetapi ternyata banyak persamaan — yang melibatkan beberapa instansi sekaligus. Jika boleh diberikan sumbang saran, instansi yang berkepentingan besar terhadap pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tata Kota, Dinas Kebersihan dan Keindahan, serta Dinas Pekerjaan Umum.

Hal pertama yang harus dilakukan adalah koordinasi antardinas dan lembaga di

Pemerintah (daerah), untuk kemudian melakukan langkah koordinasi eksternal dengan lembaga yang posisinya tidak dalam satu jalur birokrasi. Antara lain, lembaga yang urusannya berhubungan dengan nilai budaya, sejarah, arkeologi, lingkungan, dan nilai-nilai tradisi.

Jika dua hubungan ini (internal dan eksternal) ini sudah dilakukan, rasanya banyak hal yang dapat dilakukan. Program pembangunan yang dilakukan pun akan bersifat multimanfaat. Tidak ada lagi "saling lempar" tanggung jawab mengenai pemeliharaan, pembinaan, dan pelestarian warisan budaya. Juga, dapat saling menjaga kepentingan masing-masing dinas dan lembaga di luarnya.

Kekuatan yang terbentuk oleh kesatuan visi dan misi ini kemudian dapat dijadikan "modal" dalam memberdayakan masyarakat. Sebagai contoh, Kepala Daerah Tingkat II Walikotamadya (sekarang sebutannya Walikota) Palembang telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Tentang Sentra Industri Kerajinan (Khas) Palembang pada tahun 1996. Sentra itu meliputi Sentra Kerajinan Songket di kawasan 30-35 Ilir (dikenal sebagai kawasan Suro); Sentra Kerajinan Tajung dan Jumputan di kawasan 1 Ulu; Sentra Kerajinan Pempek, Kerupuk, dan Kempelang di 2 Ulu-5 Ulu; serta Sentra Ukiran di Jl. Faqih Djalaluddin (Jl. Guru-guru). Kesan yang terasa selama ini, instansi yang sangat berperan terhadap pembinaan sektor-sektor itu adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hal ini menyangkut nilai komoditasnya.

Lewat kesatuan visi dan misi — tentu harus dimulai dari kesadaran budaya kepala daerah — ini, masyarakat pendukung produk budaya itu dapat diberdayakan. Yaitu, dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap aktivitas yang beraitan dengan kebudayaan. Masyarakat setempat, tanpa perlu membuat macam-macam slogan, harus diberi peran aktif. Minimal, peran yang dapat diberikan adalah sebagai pemandu wisata. Masyarakat setempat dapat memberikan keterangan yang pas mengenai warisan budaya

yang menjadi objek wisata di daerahnya. Mereka pun dapat menjadi narasumber untuk penelitian atau pengkajian benda budaya.

Seperti dikemukakan terdahulu, warisan sejarah dan budaya di Kota Palembang umumnya berada di sepanjang tepian Sungai Musi. Sementara saat ini, paket wisata andalan Pemerintah Kota Palembang adalah pelayaran di Sungai Musi (*Musi Tour*). Sebaiknya, wisatawan yang diajak berlayar itu, diberi kesempatan pula untuk berlabuh di, paling kurang 35 titik lokasi wisata tepian sungai. Untuk itu, hal yang mendesak untuk segera dilakukan adalah pembangunan dermaga wisata di tiap titik lokasi objek wisata — beragam, mulai dari wisata religius, sejarah, makanan, hingga sandang khas — itu.

Jika semua ini sudah dilakukan, keterlibatan masyarakat dalam melestarikan, memanfaatkan warisan budaya sebagai bagian penggiat usaha pariwisata — Bali dan Yogyakarta sebagai contoh nyata — akan tumbuh dengan sendirinya. Pepatah "Di mana ada gula, di situ ada semut" tentu akan berlaku. Dalam artian, dengan potensi yang mereka miliki, masyarakat dapat memanfaatkannya, misalnya usaha dagang — untuk menunjang kehidupan perekonomian.

Sudah saatnya biduk dilayarkan. Tentu, sang biduk butuh dermaga untuk bersandar. Lalu, apakah Pemerintah dapat menjadi dermaga bagi rakyatnya?

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian (ed.). 1985. *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*. Jakarta: Gramedia.
- Hanafiah, Djohan. 1995. *Melayu-Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat. 1982. *Sejarah dan Antropologi Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- . 1986. "Peran Local Genius dalam Akulturasi," dalam buku *Kepribadian*

Budaya Bangsa. Ayatrohaedi (ed.). Jakarta: Pustaka Jaya

Moerdjanto, G., Rahmanto, J. Sudarminta. 1993. *Tantangan Kemanusiaan Universal*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Mujib. 1996. *Situs-situs Arkeologi di Wilayah Seberang Ulu Kotamadya Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Laporan Penelitian*. Palembang: Balai Arkeologi Palembang.

Rahmat, Jalaluddin. 1985. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Karya CV.

Syarofie, Yudhy. 2005. *Palembang Kota Wisata Sungai*. Palembang: Humas Pemkot Palembang.

Toda, Dami N.. 1984. *Hamba-hamba Kebudayaan*. Jakarta: Sinar Harapan.

Makalah

Hassan, Fuad. 2003. *Catatan Perihal Dinamika Kebudayaan*. Makalah dalam **Pertemuan Antarbudaya Global**. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Suparlan, Parsudi. 1982. *Penelitian Bagi Menunjang Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional* (diktat). Jakarta: Konsorsium Antar Bidang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Syarofie, Yudhy. 2002. *Identitas Budaya; Aku dalam Budaya Lokal, Nasional, dan*

Global. Makalah Disampaikan dalam Dialog Budaya Pra-Kongres Kebudayaan Nasional V. Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjung Pinang.

———. 2003. *Kebudayaan ataukah Pembudayaan*. Makalah disampaikan pada Seminar Tradisi Sebagai Nilai. Palembang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjung Pinang-Dinas Pendidikan Nasional Sumsel.

Artikel

Purwanti, Retno. *Hilangnya Jatidiri Wong Kito*. Palembang: *Sriwijaya Post*, 20 November 2005.

Syarofie, Yudhy. *Megaproyek Musi III; Jangan Biarkan Tinggalan Sejarah-Budaya Rusak Binasa*. Palembang: *Sriwijaya Post*, 11 September 2005.

———. *Dari Kuto Berziarah Kubro*. Palembang: *Sriwijaya Post*, September 2005.

———. *Mari Menjadi Murid Belanda yang Baik; Bongkar-membongkar Bangunan Bersejarah*. Palembang: *Sriwijaya Post*, 16 Oktober 2005.

———. *Mari Menjadi Murid Belanda yang Baik; Yang Baik Justru tidak Diadopsi*. Palembang: *Sriwijaya Post*, 23 Oktober 2005.

RUMUSAN HASIL LOKAKARYA “SEBIDUK DI SUNGAI MUSI : PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA KOTA PALEMBANG”

Selama dua hari berturut-turut dari tanggal 30-31 Mei 2006 di Hotel *Swarna Dwipa*, Balai Arkeologi Palembang bekerjasama dengan Harian Umum *Berita Pagi*, mengadakan lokakarya yang dihadiri sekitar 200 orang undangan. Lokakarya ini membahas dan menyatukan visi dalam kegiatan pengelolaan warisan budaya di Kota Palembang oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Pada kegiatan ini diadakan juga ekskursi mengunjungi situs-situs arkeologi yang berada di sepanjang Sungai Musi.

Dari hasil pemaparan dan diskusi pada lokakarya ini berhasil dirumuskan beberapa pokok penting mengenai pengelolaan warisan budaya oleh tim perumus yang terdiri dari Drs. Bambang Sulistyanto, M.Hum. (Ketua), Djohan Hanafiah, S.E. (Anggota), Drs. Bambang Budi Utomo (Anggota), Drs. Didi M. Joenada (Anggota), Yudhy Syarofie (Anggota), Drs. Tri Marhaeni S. Budisantosa. (Anggota). Adapun hasil dari rumusan tersebut sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah perlu mendukung penelitian dan pelestarian warisan budaya (*tangible* dan *intangible*) beserta pengembangannya secara multidisipliner dan interdisipliner yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.
2. Melakukan inventarisasi dan registrasi terhadap seluruh potensi warisan budaya yang ada di Palembang, untuk dijadikan sebuah buku pedoman perencanaan pembangunan kota.
3. Perencanaan pembangunan harus berwawasan pelestarian dan berkelanjutan yang mampu mengembangkan dan meningkatkan vitalitas, serta menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang telah pudar.
4. Diperlukan kebijakan pengelolaan warisan budaya secara profesional, komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan serta mampu mengakomodasi berbagai kepentingan, agar warisan budaya terlestarikan.
5. Terkait dengan otonomi, pemerintah daerah dan DPRD perlu mendorong setiap kabupaten/kota untuk membuat peraturan daerah (perda) tentang penelitian, perlindungan, dan pengelolaan Benda Cagar Budaya agar warisan budaya dapat bermanfaat secara optimal.
6. Warisan budaya pada hakikatnya adalah milik masyarakat, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya budaya tersebut, perlu sepengetahuan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, maka sistem pengelolaan warisan budaya harus diubah dari kiblat ‘arkeologi negara’ (*archaeology in the service of the state*) menjadi arkeologi untuk masyarakat (*public archaeology*).
7. Sehubungan dengan munculnya berbagai konflik pemanfaatan warisan budaya di Palembang, maka semua komponen dalam masyarakat perlu segera mengubah paradigma pengelolaan dari para penganan kepurbakalaan yang bersifat legislator menjadi mediator dan fasilitator.
8. Sistem pengelolaan warisan budaya yang selama ini didominasi oleh pemerintah, terbukti kurang akomodatif, maka pengelolaan warisan budaya harus melibatkan tiga komponen pokok; yaitu pemerintah, akademisi dan masyarakat.
9. Penataan lingkungan sumber daya budaya di Palembang tidak hanya dipusatkan di wilayah yang berpotensi memiliki benda

cagar budaya, tetapi juga daerah aliran sungai dan kawasan industri tradisional.

- 10. Guna menciptakan sistem pengelolaan warisan budaya yang akomodatif, maka organisasi nonpemerintah penting untuk lebih meningkatkan perannya sebagai mitra pemerintah dalam melestrariikan warisan budaya.

- 11. Revitalisasi budaya kehidupan kawasan sungai (*riverine culture*) diperlukan guna mendukung program Palembang Sebagai Kota Wisata Sungai.

- 12. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal, guna menjaga keberlangsungan pewarisan nilai-nilai budaya.

Dari hasil pembaruan dan diskusi pada lokakarya ini berhasil dirumuskan beberapa pokok penting mengenai pengelolaan warisan budaya oleh tim perumus yang terdiri dari Dr. Bambang Sulistyanto, M.Hum. (Koran), Djohan Hartajah, S.E. (Anggor), Dr. Bambang Budi Lihono (Anggor), Dr. Dharma (Anggor), Yudiy Syarif (Anggor), dan Tri Mahesri S. Budiantoro (Anggor). Adapun hasil dari rumusan tersebut sebagai berikut: *Peraturan Menteri Kebudayaan dan Kesenian No. 16 Tahun 1997*.

1. Pemerintah daerah perlu mendukung penelitian dan pelestarian warisan budaya (tangible dan intangible) beserta pengembangannya secara multidisipliner dan interdisipliner yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

2. Melakukan inventarisasi dan registrasi terhadap seluruh potensi warisan budaya yang ada di Palembang untuk dijadikan sebuah buku pedoman perencanaan pembangunan kota.

3. Perencanaan pembangunan harus berwawasan pelestarian dan keberlanjutan yang mampu mengembangkan dan meningkatkan vitalitas serta menghubungkan kembali nilai-nilai luhur yang telah pudar.